

Menyemai

BENIH PERUBAHAN

*Kumpulan Pembelajaran Program Kemitraan
Pokja AMPL NTB, Mitra Samya dan UNICEF*

Ir. I Nyoman Oka, MM.
Purnama Sidhi





“MENYEMAI BENIH PERUBAHAN”

**mengakhiri Buang Air Besar Sembarangan,
meningkatkan layanan sanitasi layak menuju sanitasi aman**

**Kumpulan Pembelajaran Program Kemitraan Pokja AMPL NTB,
Mitra Samya dan UNICEF”**

PENGARAH :

DR. IR. H. AMRI RAHMAN Kepala Bappeda Provinsi NTB
YUDHISTIRA YEWANGOE Kepala Kantor Perwakilan
UNICEF NTT & NTB
HUSNUZZONI Direktur Mitra Samya

PENULIS :

IR. I NYOMAN OKA, MM.
PURNAMA SIDHI

LAYOUTER :

APRIAN ERMANSYAH
WAHYU RAMDANI

KONTRIBUTOR :

Agustina Yusiana Poy	Siswa SMKN 1 Maluku
Apip	Dinas LHK Lombok Timur
Arief Prayadi	Fasilitator SMS Kabupaten Sumbawa Barat
Baiq Winingsih	Enumerator Survey Kabupaten Lombok Timur
Darmawan Aryandani	Siswa SMKN 1 Selong
Deni Apriyanto	Bappeda Provinsi NTB
Dhita	Dinas LHK Provinsi NTB
Fivin Trisna Andriati	Enumerator Survey Kabupaten Lombok Timur
Herman Affandi, SKM	Pendamping Pokja AMPL Kabupaten Lombok Timur
Husnuzzoni	Direktur Mitra Samya
Indah, ST.	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi NTB
Lalu Agus Supardi	Fasilitator SMS Kabupaten Lombok Timur
Made Pranaya	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Rahyatul K.	Guru SMKN 1 Selong
Rita Bunga Familia	Guru SMKN 1 Maluku
Saharudin	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat
Subhan	Bappeda Litbang Kabupaten Lombok Timur
Taufik Hari Suryanto	Bappeda Provinsi NTB
Yayat Hidayat	Provincial Facilitator, Safely Managed Sanitation UNICEF

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR SINGKATAN	V
KATA PENGANTAR POKJA AMPL	VIII
KATA SAMBUTAN UNICEF	X
KATA PENGANTAR MITRA SAMYA	XIV
BAGIAN I - CIKAL BAKAL PROGRAM KEMITRAAN POKJA AMPL, MITRA SAMYA DAN UNICEF	2
BAGIAN II - MEMAHAMI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK YANG AMAN “ <i>Pengertian dan Bagaimana Mencapainya?</i> ”	10
BAGIAN III - PERUBAHAN TERJADI DIMANA-MANA	16
1. Jatuh Bangun Meletakkan Landasan Pemahaman Sanitasi Aman “ <i>Tutur Para Pelaku</i> ”	17
2. Mendalami Sanitasi, Memahami 5 Pilar STBM (“ <i>Pengalaman Kabupaten Sumbawa Barat</i> ”)	53
3. Perjuangan dalam Membangun Gerakan BASNO Menuju Sanitasi Aman	62
4. Pendayagunaan Dana ZIS, Mendukung Gerakan BASNO Menuju Sanitasi Aman	73
5. Promosi Membangun Pengetahuan Perilaku Masyarakat Menuju Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga Aman	80
6. <i>Youth Sanitation Influencer</i> Mencetak Generasi Milenial sebagai Agen Perubahan Bidang Sanitasi	91
BAGIAN IV – CERITA DARI WORKSHOP PENDOKUMENTASIAN BEST PRACTICE PROGRAM LAYANAN SANITASI AMAN	98
BAGIAN V – MENGGAGAS AGENDA WASH NTB 2021, MERAIH IMPIAN BASNO MENUJU SANITASI AMAN	120

DAFTAR SINGKATAN

AELI	<i>Asosiasi Eksperiential Learning Indonesia</i>
AMPL	Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
ASN	Aparatur Sipil Negara
ATK	Alat Tulis Kantor
BAB	Buang Air Besar
BABS	Buang Air Besar Sembarangan
BASNAZ	Badan Amil Zakat Nasional
BASNO	Buang Air Besar Sembarangan Nol
BABINSA	Bintara Pembina Desa
BLC	<i>Building Learning Comittment</i>
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
CTPS	Cuci Tangan Pakai Sabun
DBD	Demam Berdarah Dengue
DLH	Dinas Lingkungan Hidup
DPDGR	Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DPUPRPP	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman
FASKAB	Fasilitator Kabupaten
HP	<i>Hanphone</i>
IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPALD	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik
IPLT	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
ISPA	Infeksi Saluran Pernafasan Akut
IT	Informasi Teknologi

JAGA	Jamban Keluarga
KK	Kartu Keluarga
KSB	Kabupaten Sumbawa Barat
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LLTT/L2T2	Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
LAZ	Lembaga Amil Zakat
MAHYANI	Rumah Layak Huni
MAN	Madrasah Aliyah Negeri
MCK	Mandi Cuci Kakus
MoT	<i>Master of Trainer</i>
MUI	Majelis Ulama Indonesia
NTB	Nusa Tenggara Barat
ODF	<i>Open Defecation Free</i>
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PALD	Pengelolaan Air Limbah Domestik
PAMMRT	Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga
PF-SMS	Provinsial Facilitator-Safely Managed Sanitation
PHBS	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PMI	Palang Merah Indonesia
POKJA	Kelompok Kerja
PPW	Prasarana Permukiman Wilayah
PU	Pekerjaan Umum
RAD-AMPL	Rencana Aksi Daerah-Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
RKAT	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RT	Rukun Tetangga
SBS	Stops Buang Air Besar Sembarangan
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SIM	Sistem Informasi Manajemen
SKM	Sarjana Kesehatan Masyarakat
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMKN	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
SMS	<i>Safely Managed Sanitation</i>
SPAL	Sistem Pengelolaan Air Limbah
SPALD	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
SPALD-S	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Setempat
SPALD-T	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Terpusat
SPAM	Sarana Penyediaan Air Minum
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SSK	Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
STBM	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
SUSENAS	Survey Sosial Ekonomi Nasional
TP PKK	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
UPTD	Unit Pengelola Teknis Daerah
WA	WhatsApp
WASH	<i>Water Sanitation and Hygiene</i>
WC	<i>Water Closet.</i>
YSI	<i>Youth Sanitation Influencer</i>
ZCD	<i>Zakat Community Development</i>

KATA PENGANTAR POKJA AMPL NTB

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh

Alhamdulillah, Pokja AMPL Provinsi NTB dan Mitra Samya dengan dukungan UNICEF telah melakukan kerjasama yang cukup dinamis dalam rangka mendukung program program percepatan Bidang Air bersih dan sanitasi.

Selama implementasi program tentunya telah banyak pembelajaran penting yang dihasilkan dari kerjasama tersebut baik diinternal POKJA AMPL Provinsi maupun POKJA AMPL Kabupaten/Kota. Semua pembelajaran penting yang di rasakan sebagai hasil perlu terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari dukungan program pembangunan dimas yang akan datang.

Pendokumentasian cerita dan pengalaman baik ini merupakan salah satu inovasi yang diharapkan akan lebih menggerakkan para penggiat pembangunan khususnya pada bidang WASH di NTB.

Menurut Data BPS 2019, Angka Kemiskinan di NTB masih sekitar 13,88%, artinya sebanyak 705.860 jiwa penduduk Provinsi NTB adalah masyarakat miskin, dimana akses yang rendah terhadap sarana penyediaan air minum dan sarana sanitasi menyumbang terhadap angka kemiskinan tersebut. Untuk meningkatkan akses terhadap sarana air minum dan sarana sanitasi khususnya sistem pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya membangun sinergitas antar pihak dan OPD guna mengoptimalkan berbagai sumber SDM dan pendanaan yang ada. Pemerintah perlu merintis inovasi yang lebih SMART dalam mengisi GAP akses sanitasi layak dan aman.

Melalui cerita dan pengalaman yang terdokumentasi melalui buku “MENYEMAI BENIH PERUBAHAN” harapannya dapat menemukan jalan untuk berinovasi tentunya oleh semua aktor dan penggiat di Bidang pembangunan air bersih dan sanitasi. Para pihak dapat belajar dari pengalaman baik atau kegagalan yang dialami oleh pihak pelaku sebelumnya.

Semoga dengan hadirnya buku Best Practice ini dapat menjadi bahan refleksi bersama dalam implementasi program sejenis di NTB.

Wassalaamuálaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Dr. Ir. H. Amri Rahman

Sekretaris Pokja AMPL Provinsi NTB,



KATA PENGANTAR UNICEF

UNICEF adalah lembaga PBB yang diberi mandat untuk menjamin bahwa hak-hak anak itu terpenuhi, hak untuk mendapat pelayanan, hak untuk dilindungi, hak untuk dikasihi dan disayangi. Karena itu semua program dan kegiatan UNICEF menjamin hak-hak anak dimana salah satunya adalah hak untuk mendapat akses air bersih dan sanitasi.

Air bersih dan sanitasi adalah hak dasar manusia, setiap orang berhak atas layanan air bersih dan sanitasi yang memberikan privasi, menjamin martabat dan keamanan serta dapat diakses dan terjangkau secara fisik. Sanitasi disemua bagiannya, toilet untuk menampung limbah, cara yang aman untuk mengangkut dan mengelola limbah dan akhirnya membuang atau menggunakan kembali limbah, membantu melindungi anak dan keluarga serta lingkungan dari pathogen berbahaya.

Sanitasi adalah sarana publik memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dalam peningkatan kesehatan serta membangun ekonomi dan sosial. Namun bagi sebagian besar orang diseluruh dunia toilet dirumah, tempat kerja, sekolah dan rumah sakit serta pengelolaan limbah yang aman masih jauh dari target.

UNICEF bersama Pemerintah Provinsi NTB mendukung percepatan pencapaian “Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Implementasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Yang Aman” di masyarakat, sekolah dan puskesmas. Hal ini juga banyak diulas dan diupayakan secara global dan juga menjadi mandat Pemerintah Pusat dan Daerah, seperti tercantum dalam dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Tujuan 6.2 yaitu pada *tahun 2030 mencapai akses terhadap Sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua dan menghentikan*

praktik buang air besar ditempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan.

Sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan tujuan pembangunan berkelanjutan bahwa target sanitasi layak adalah 90% dan 15% diantaranya adalah sanitasi aman. Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota di NTB terus berupaya untuk meningkatkan layak dalam bidang sanitasi, salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi yaitu dengan dikeluarkannya peraturan Gubernur No.9 Tahun 2013 tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO).

Berdasarkan data BAPPENAS yang bersumber dari hasil SUSENAS BPS tahun 2018 capaian Sanitasi layak Provinsi NTB mencapai 75% dan meningkat menjadi 90% pada tahun 2019, Sedangkan capaian Sanitasi Aman Provinsi NTB tahun 2018 baru mencapai 4,6% sehingga masih ada selisih sebesar 6% dari 10 Kabupaten/Kota. Baru ada satu Kabupaten yang mencapai BASNO yaitu Kabupaten Sumbawa Barat. Sudah ada beberapa Kabupaten/Kota yang melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik yang Aman yang masih belum optimalisasi dalam pelaksanaan.

Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di NTB terus berupaya meningkatkan layanan air bersih, sanitasi dan hygiene, ini ditunjukkan dengan adanya satu Kabupaten yang telah ODF (Open Defecation Free) Kabupaten Sumbawa Barat sementara beberapa Kabupaten/Kota lain akses sanitasinya sudah di atas 80%.

Dengan gerakan BASNO Provinsi NTB yang merupakan salah satu daerah yang inovatif dan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam pengelolaan sanitasi. Gerakan BASNO telah dilakukan sejak tahun 2010, diharapkan melalui gerakan BASNO kondisi sanitasi di NTB dapat

meningkat secara signifikan, sehingga berbagai penyakit berbasis lingkungan dapat ditekan yang pada akhirnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta dampak jangka panjang untuk dapat menekan angka stunting, sehingga kualitas SDM di NTB semakin meningkat.

UNICEF bekerjasama dengan MITRA SAMYA dalam mendukung Provinsi NTB melakukan peningkatan kapasitas serta penguatan POKJA AMPL di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTB. UNICEF bersama MITRA SAMYA mendukung pemerintah NTB dalam implementasi pengelolaan air limbah domestik yang aman di dua Kabupaten Pilot yaitu, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Target utama kedepannya adalah mendorong Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota di NTB untuk melakukan investasi dalam lima akselerator utama, dapat menjadi jalan menuju pencapaian sanitasi yang aman, yang pertama Tata Pemerintahan yang baik (Good Government) dimulai dengan kepemimpinan politik yang kuat koordinasi dan regulasi yang efektif, yang kedua Keuangan Publik yang cerdas (Smart Public Finances) untuk meletakkan dasar bagi layanan sanitasi yang aman mendukung mereka yang paling rentan dan menarik investasi swasta, yang ketiga Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) diseluruh sector sanitasi termasuk pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, penelitian dan inovasi, yang keempat Data Yang Dapat Diandalkan (Reliable Data) untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan akuntabilitas yang lebih kuat, dan yang terakhir Inovasi (Inovation) untuk membuka pendekatan yang lebih baik dan memenuhi tantangan yang muncul seperti urbanisasi dan perubahan iklim.

UNICEF bekerja melalui Pemerintah Provinsi NTB menyumbangkan sumber-sumber daya potensial untuk bersama-sama dengan Pemerintah NTB mewujudkan misi besar Eliminasi Perilaku Buang Air Besar Sembarangan Dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Yang Aman melalui kolaborasi semua pihak bersama mendukung perencanaan dan keberlanjutan sistem penyediaan sarana sanitasi yang layak dan aman bagi NTB. Harapannya Anak-anak NTB terpenuhi hak dasar dasar hidupnya, untuk setiap anak sanitasi yang layak dan aman.

Salam hormat,

YUDHISTIRA YEWANGOE

KEPALA KANTOR PERWAKILAN UNICEF NTT & NTB



KATA PENGANTAR MITRA SAMYA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh

Program penguatan kapasitas kelembagaan POKJA AMPL kerjasama antara UNICEF dengan Mitra Samya telah dilaksanakan selama 9 bulan mulai sejak Januari-Desember 2020. Selain memperkuat kelembagaan POKJA AMPL di Provinsi juga dilakukan penguatan kelembagaan POKJA AMPL di 2 Kabupaten yaitu Sumbawa Barat dan Lombok Timur. Secara umum tahapan kegiatan yang dilakukan meliputi: 1). Persiapan Administrasi, 2). Desain Program, 3). Sosialisasi, 4). Pelaksanaan Program, serta 5). Pelaporan dan Pendokumentasian. Dalam program ini telah melibatkan perwakilan POKJA AMPL Provinsi, perwakilan POKJA AMPL, Perwakilan Pemerintah dan POKJA AMPL Kabupaten Sumbawa Barat, Perwakilan Pemerintah dan POKJA AMPL Kabupaten Lombok Timur, BAZNAS, Kementerian Kesehatan dan AKKOPSI.

UNICEF bersama Pemerintah Provinsi NTB mendukung percepatan pencapaian “Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Implementasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Yang Aman” di masyarakat, sekolah dan puskesmas. Hak ini juga banyak diulas dan diupayakan secara global dan juga menjadi mandat Pemerintah Pusat dan Daerah, seperti tercantum dalam dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Tujuan 6.2 yaitu pada tahun 2030 mencapai akses terhadap Sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua dan menghentikan praktik buang air besar ditempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan.

Selama implementasi program tentunya telah banyak pembelajaran penting yang dihasilkan dari kerjasama tersebut baik diinternal POKJA AMPL Provinsi maupun POKJA AMPL Kabupaten/Kota. Semua

pembelajaran penting yang di rasakan sebagai hasil perlu terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari dukungan program pembangunan dimasa yang akan datang.

Pendokumentasian cerita dan dan pengalaman baik ini merupakan salah satu inovasi yang diharapkan akan lebih menggerakkan para penggiat pembangunan khususnya pada bidang WASH di NTB.

Melalui cerita dan pengalaman yang terdokumentasi melalui buku “MENYEMAI BENIH PERUBAHAN” harapannya dapat menemukan jalan untuk berinovasi tentunya oleh semua aktor dan penggiat di Bidang pembangunan air bersih dan sanitasi. Para pihak dapat belajar dari pengalaman baik atau kegagalan yang dialami oleh pihak pelaku sebelumnya.

Semoga dengan hadirnya buku Best Practice ini dapat menjadi bahan refleksi bersama dalam implementasi program sejenis di NTB .

Wassalaamuáaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam Hormat,

HUSNUZZONI

Direktur Mitra Samya



“Rahasia perubahan adalah memusatkan semua energi Anda, bukan untuk melawan yang lama, tetapi untuk membangun yang baru”

[Socrates]



BAGIAN 1

CIKAL BAKAL PROGRAM KEMITRAAN
POKJA AMPL, MITRA SAMYA
DAN UNICEF

MULAI DARI AKHIR

Target Sustainable Development Goals (SDGs):

Tujuan 6 : *Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.*

Target 6.2 : *Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.*

Target 6.3 : *Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.*

Amanat pusat dalam hal peningkatan **akses ke Jamban Sehat/Layak untuk NTB di tahun 2024 adalah 84-85% dan dengan 11% diantaranya adalah angka akses Sanitasi Aman**. Target tersebut harus dicapai hingga tahun 2024. Jika dinarasikan sesuai target indikator SDGs maka pada tahun 2030, mencapai akses universal ke air minum yang adil, aman dan terjangkau untuk semua serta mencapai akses ke sanitasi dan kebersihan yang layak dan adil untuk semua serta mengakhiri buang air besar sembarangan. Termasuk memberikan perhatian khusus pada kebutuhan wanita dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan.

BAGAIMANA KONDISI SANITASI 2019 DI NTB?

Capaian indikator SDGs NTB tahun 2019 adalah sebagai berikut:

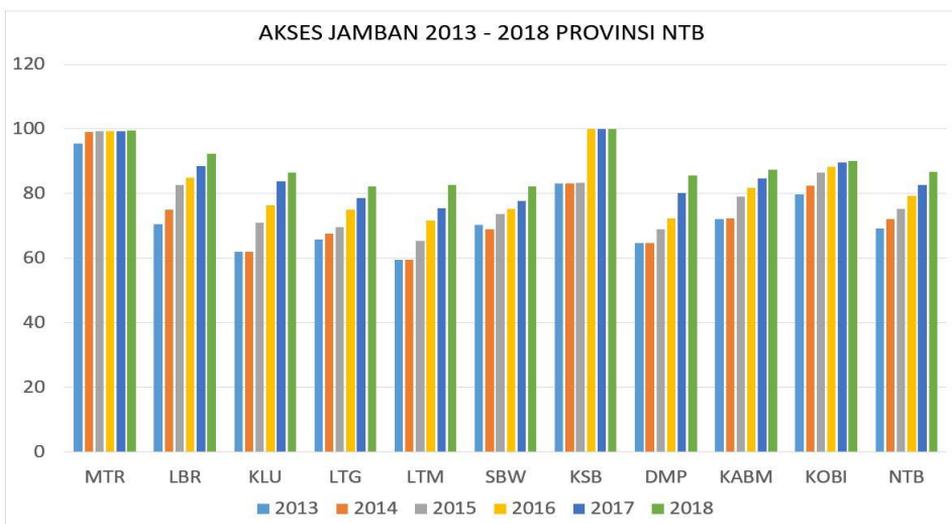
1. Indikator 6.2.1 (a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mencapai 52,30 %.

2. Indikator 6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan mencapai 67,39 %.
3. Indikator 6.2.1(c) Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencapai 1137 desa/kelurahan.
4. Indikator 6.2.1 (d) Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal mencapai 10 Kab/Kota.
5. Indikator 6.3.1.(a) Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), tercapai 1 kabupaten.

Hingga Desember 2019, Desa/Kelurahan yang sudah mencapai status ODF/SBS/BASNO adalah 543 (47.8 %), sementara status akses sanitasi layak baru mencapai 78,80% dan 4,29% diantaranya adalah akses sanitasi aman.

BAGAIMANA SEJARAHNYA DAN APA TANTANGANNYA?

Pada Tahun 2012, Provinsi NTB telah menyusun Roadmap atau peta jalan Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO) dengan rentang periode 2012 - 2017. Beberapa kondisi dan perkembangan yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun dianggap cukup signifikan. Beberapa target yang tertuang dalam Roadmap pada tahun 2013 - 2018 dapat dilihat dalam diagram dibawah ini:



Berdasarkan data progres yang tertuang dalam laporan RPJMD Propinsi NTB target desa/kelurahan ODF NTB belum tercapai sesuai peta jalan. Sampai Februari 2019, 86,7% masyarakat NTB telah terakses jamban namun baru 538 desa/ kelurahan (52%) yang telah terverifikasi ODF/SBS dari 1142 total desa/kelurahan yang ada di NTB. Masih ada sebanyak 599 desa/kelurahan yang belum ODF.

Sejak tahun 2017, Pemerintah NTB telah berupaya melibatkan BAZNAS NTB dalam mendukung program BASNO melalui alokasi dana Zakat, Infak dan Sedekah untuk pembangunan sanitasi bagi masyarakat miskin. Meskipun kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berkontribusi terhadap target NTB tentang sanitasi, namun masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan di Kabupaten/Kota dan provinsi antara lain:

- * Meskipun sudah ada regulasi pendukung di tingkat kabupaten/kota dan provinsi namun belum ada dukungan komitmen dari kabupaten/kota untuk BASNO-NTB. Tidak ada kewenangan Dinas Teknis untuk membangun infrastruktur, karena sanitasi adalah padat modal,
- * Dana desa belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk kepentingan sarana sanitasi dan air bersih di tingkat Desa,
- * Pemahaman parapihak tentang Sanitasi Aman dan bagaimana mengimplementasikannya di tingkat lapangan masih rendah,
- * Kelembagaan MUI termasuk kelembagaan BAZNAS di tingkat desa masih belum terbentuk dalam rangka mendukung pelibatan BAZNAS NTB di tingkat Desa. Disisi lain, belum tersedianya panduan teknis BAZNAS dalam rangka mengoperasional-kan strategi dukungan di tingkat lapangan,
- * Masyarakat masih mengharapkan bantuan untuk pembangunan jamban keluarga. Hal ini menghambat proses percepatan perubahan perilaku,
- * Koordinasi antara Dinas Pekerjaan umum dan Dinas Kesehatan belum terbangun secara optimal termasuk komitmen Kepala Daerah,
- * Keterbatasan ketersediaan air bersih di tingkat komunitas.

APA MIMPI DAN AGENDANYA?

Berdasarkan kondisi di atas, dan sejalan dengan strategi global untuk air, sanitasi dan kebersihan 2016 - 2030 serta sesuai target SDGs, maka UNICEF hadir memberikan dukungan. Fokus dukungan UNICEF adalah air, sanitasi dan kebersihan di rumah tangga serta penguatan kelembagaan Pokja Provinsi serta Kabupaten/Kota di wilayah NTB. Harapan jangka panjangnya hingga tahun 2030 adalah:

- * Mencapai akses universal air minum yang adil, aman dan terjangkau untuk semua,
- * Mencapai akses ke sanitasi dan kebersihan yang layak dan adil untuk semua dan mengakhiri buang air besar sembarangan, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan wanita dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan.

Untuk mencapai goal tersebut, UNICEF bersama Mitra Samya (Perkumpulan Lembaga Studi Partisipasi Ekonomi dan Demokrasi) terus mendukung Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka penguatan agenda sanitasi. Dukungan mencakup 3 komponen; (1) percepatan ODF (BASNO), (2) sanitasi yang dikelola dengan aman di 2 kabupaten, dan (3) memperkuat peran Pokja AMPL dalam manajemen pengurangan resiko.

Dalam percepatan BASNO, UNICEF mendukung Pemerintah Provinsi NTB menyusun roadmap untuk BASNO, meningkatkan kapasitas Pokja AMPL dan fasilitator dalam advokasi ODF dan STBM 5 pilar, memperkuat kapasitas BAZNAS untuk memperluas dukungan dana zakat untuk ODF, dan mendukung advokasi serta pembelajaran horizontal untuk meningkatkan komitmen pemerintah kabupaten dan kota di NTB dalam mempercepat ODF dan menerapkan sanitasi yang aman.

Selain percepatan BASNO, UNICEF juga mendukung provinsi NTB untuk bergerak menuju sanitasi yang dikelola dengan aman untuk mencapai manfaat maksimal bagi perilaku hidup bersih dan sehat. Meskipun prioritas Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana

tertuang dalam RPJMN 2020-2024, nampak belum ada operasional yang jelas terkait definisi dan model tentang sanitasi yang dikelola dengan aman dalam konteks yang berbeda, seperti:

- * Sanitasi yang dikelola dengan aman untuk kabupaten dengan daerah pedesaan dengan kepadatan rendah, menengah hingga tinggi.
- * Sanitasi yang dikelola dengan aman untuk kota-kota di daerah perkotaan dengan kepadatan tinggi.

Mengingat keberhasilan NTB dalam memperjuangkan eliminasi buang air besar sembarangan lintas provinsi di Indonesia, UNICEF mendukung pemerintah untuk:

- * Mengembangkan model implementasi penyediaan berkelanjutan yang dikelola dengan aman sanitasi di tingkat subnasional (baik provinsi maupun kabupaten) yang menggabungkan pengelolaan lumpur tinja ke dalam strategi komunikasi perubahan perilaku, peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran, keuangan, teknologi sanitasi pilihan dan dukungan lain untuk kelompok rentan.
- * Mengembangkan kapasitas untuk meningkatkan pengelolaan lumpur tinja sebagai bagian dari implementasi sanitasi yang dikelola dengan aman.
- * Memberikan demonstrasi di tingkat subnasional tentang bagaimana memenuhi standar pelayanan minimum sebagaimana diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

APA TARGET HASIL DAN INDIKATORNYA?

Ada 2 target hasil dalam mendukung goal dan agenda NTB yaitu:

Target Hasil 1, Meningkatnya komitmen dan kapasitas pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten terpilih untuk mengakhiri buang air besar sembarangan dan meningkatkan layanan sanitasi dari sanitasi dasar ke sanitasi yang aman.

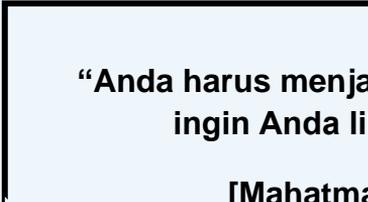
Indikator Kinerjanya adalah:

- * Kelembagaan yang dapat melakukan akselerasi BASNO dan pengelolaan sanitasi aman,

- * Jumlah rencana kesepakatan/komitmen hasil pertemuan yang ditindaklanjuti,
- * Tersusunnya Roadmap BASNO Provinsi NTB Tahun 2020-2024,
- * Adanya Peraturan Gubernur terkait Roadmap BASNO Provinsi NTB,
- * Jumlah anggota Pokja AMPL dan fasilitator menerima pelatihan advokasi,
- * Jumlah “*Policy Brief*” untuk advokasi percepatan BASNO,
- * Jumlah kabupaten/kota yang menetapkan target untuk BASNO dan mengembangkan strategi dan rencana aksi untuk percepatan BASNO.

Target Hasil 2, Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten terpilih memiliki kapasitas untuk menerapkan sanitasi yang dikelola dengan aman. Indikator Kinerjanya adalah:

- * Jumlah rumah tangga telah mengubah perilaku menuju sanitasi yang dikelola dengan aman,
- * Ketersediaan naskah akademik tentang pengelolaan air limbah,
- * Ketersediaan strategi dan materi advokasi,
- * Ketersediaan rencana pengelolaan lumpur tinja,
- * Ketersediaan data kabupaten/kota tentang kesiapan untuk menerapkan sanitasi yang dikelola dengan aman,
- * Praktik terbaik tentang sanitasi yang dikelola dengan aman didokumentasikan dan disebarluaskan,
- * Jumlah pemerintah daerah dan fasilitator yang menerima pelatihan,
- * Ketersediaan aplikasi seluler untuk pengelolaan lumpur tinja,
- * Ketersediaan laporan pelaksanaan program sanitasi yang dikelola dengan aman di provinsi dan kabupaten/kota.



**“Anda harus menjadi perubahan yang
ingin Anda lihat di dunia”**

[Mahatma Gandhi]

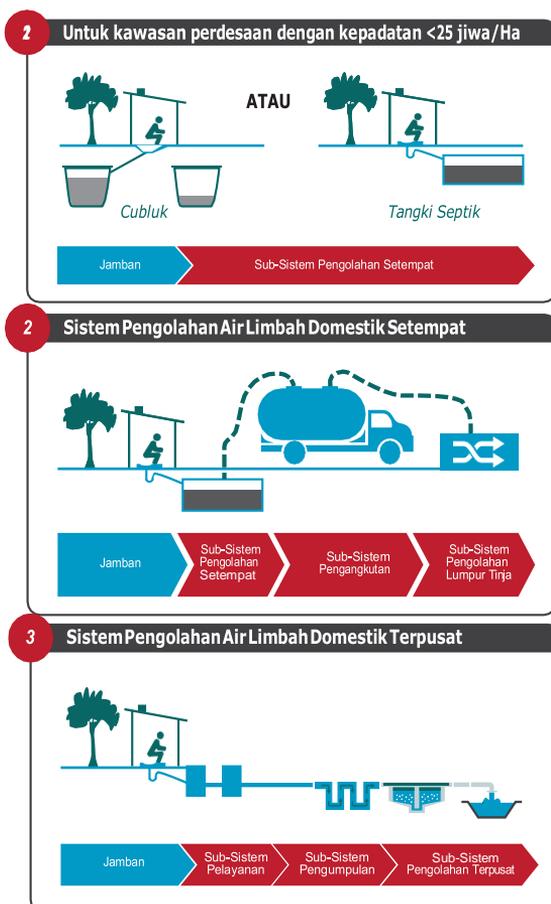


BAGIAN 2

**MEMAHAMI PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK YANG AMAN**

Pengertian dan Bagaimana Mencapainya?

Keberhasilan pemerintah Indonesia dengan berbagai strategi dan program dalam meningkatkan akses terhadap sanitasi dari 58,77% di tahun 2017 menjadi 74,58 % di tahun 2018, juga diikuti oleh pemerintah Provinsi NTB. Melalui gerakan BASNO periode 2013 - 2017 dengan bukti data hingga akhir 2019, Provinsi NTB telah menunjukkan perubahan yang signifikan, yaitu 99% Desa/Kelurahan telah dipicu, sudah ada 650 (57%) Desa/Kelurahan yang mencapai ODF/SBS dan 1 Kabupaten (Sumbawa Barat) yang sudah mendeklarasikan sebagai Kabupaten SBS/ODF. Akses KK ke Sanitasi baik JSSP, JSP maupun dengan jamban bersama mencapai 88,89%, dan masih ada 11,63% (168.943 KK) yang masih BABS.



Berdasarkan data SDGS Indikator 6.2.1(b), maka capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan hingga 2019 di NTB adalah 67,39%. Namun Pemerintah Provinsi NTB tidak akan lengah, tetap menyadari bahwa tantangan kedepan semakin berat karena amanat SDGs untuk memastikan capaian menuju Sanitasi Aman (11% di tahun 2024 dari 84% Sanitasi Layak). Masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan menuju Sanitasi Aman 2023, sehingga pengertian dan bagaimana mencapai Sanitasi Aman menjadi penting digambarkan dalam

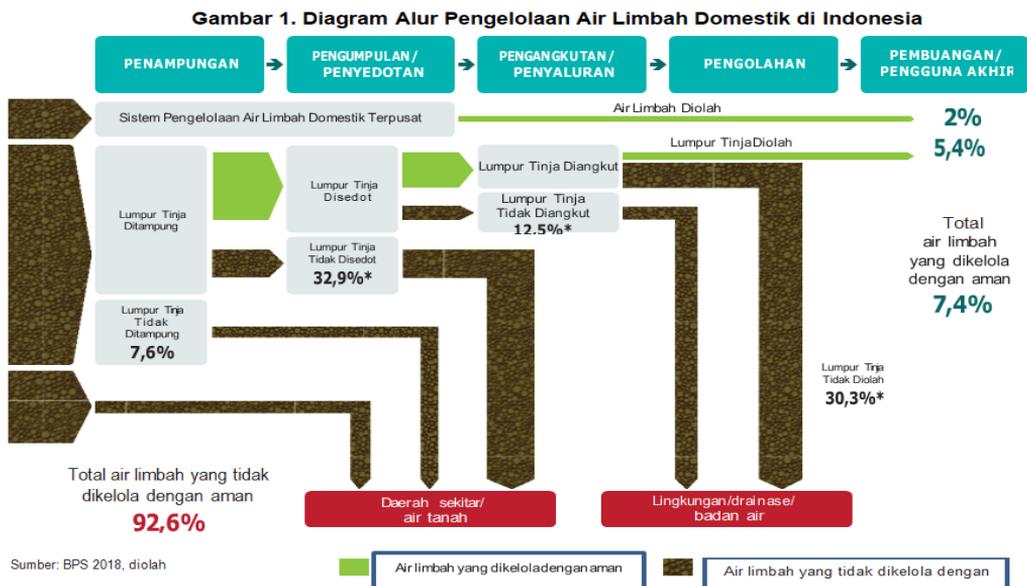
bagian ini. Gambar diatas menunjukkan jenis layanan pengelolaan air limbah domestik sesuai SPM. Bersumber dari Standar Teknis; Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-urusan Air Limbah Domestik.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK YANG AMAN?

Masyarakat menggunakan sarana sanitasi layak, yang tidak digunakan secara bersama dengan rumah tangga lain serta terdapat pengolahan air limbah domestik, baik secara setempat maupun terpusat. Pengelolaan air limbah domestik melingkupi keseluruhan rantai layanan sanitasi, mulai dari rumah tangga hingga pembuangan/pemanfaatan akhir. Untuk sistem setempat, pengelolaan aman mencakup tangki septik yang kedap, penyedotan, dan pengolahan lumpur tinja di Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) hingga pemanfaatan kembali hasil olahan dari lumpur tinja tersebut. Adapun untuk sistem terpusat, pengelolaan aman terdiri dari sistem perpipaan air limbah dari rumah tangga yang terhubung dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dibuang secara aman ke lingkungan.

SEBERAPA PENTING PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK YANG AMAN?

Pengelolaan air limbah domestik yang aman dapat mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan sumber air yang digunakan oleh masyarakat. Di Indonesia kondisinya cukup mengkhawatirkan karena walau lebih dari 70%



warga telah mendapatkan akses layanan sanitasi, hanya 7,42 % rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air limbah domestik yang aman (BPS,2018, diolah).

Dengan kata lain, hampir 93% air limbah domestik di Indonesia dibuang secara tidak aman ke lingkungan. Situasi ini berkontribusi langsung pada angka kesakitan dan kematian anak di Indonesia.

APAKAH KITA TELAH MEMILIKI REGULASI YANG MENDASARI INI?

Beberapa peraturan yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik yang aman, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah salah satunya untuk memberikan layanan air limbah domestik yang aman;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.4 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.68 Tahun 2018 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik untuk memastikan air limbah yang telah diolah dapat dibuang secara aman ke lingkungan.

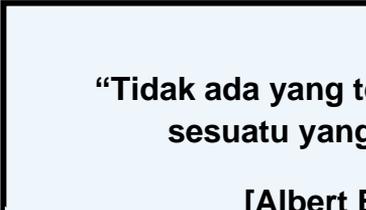
APA YANG HARUS DILAKUKAN?

1. Memastikan setiap rumah tangga terhubung dengan fasilitas dan layanan sanitasi yang aman, baik sistem setempat maupun terpusat sehingga air limbah domestik telah terolah dengan baik sebelum kembali ke lingkungan;
2. Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran untuk menjamin penyediaan akses dan layanan air limbah domestik yang aman untuk semua;

3. Mengidentifikasi berbagai inovasi pembiayaan untuk mendukung pemerintah daerah dalam memberikan layanan air limbah domestik yang aman;
4. Memastikan institusi-institusi lokal yang terlibat dalam pengelolaan air limbah domestik yang aman memiliki kapasitas yang cukup, dari sisi sumber daya manusia, teknis maupun keuangan, sehingga dapat menjalankan peran perencanaan, penetapan standar, promosi, pembangunan fisik, pemberian layanan, pengawasan, pemantauan atau monitoring dan penegakan peraturan;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat, motivasi dan kebutuhan yang berkelanjutan terhadap akses dan layanan air limbah domestik yang aman;
6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta untuk menyediakan sumber pendanaan alternatif, menyelenggarakan kegiatan promosi, pengembangan inovasi teknologi baik sistem setempat maupun terpusat, peningkatan kapasitas untuk institusi lokal, peningkatan cakupan dan kualitas layanan, pengumpulan tarif, serta penerapan resource recovery (penggunaan ulang hasil olahan air limbah domestik) untuk memaksimalkan manfaat dari pengelolaan air limbah yang aman.

APAKAH SUDAH ADA PERUBAHAN?

Cerita di bawah ini yang akan menuturkan berbagai pengalaman dan perubahan yang dapat dibuktikan oleh parapihak yang terlibat langsung dalam program. Semoga tutur di bawah ini dapat menjadi pembelajaran dalam pengembangan sanitasi menuju sanitasi aman selanjutnya.



**“Tidak ada yang terjadi, kecuali ada
sesuatu yang digerakkan”**

[Albert Einstein]



BAGIAN 3

PERUBAHAN TERJADI DI MANA-MANA

1. JATUH BANGUN MELETAKKAN LANDASAN PEMAHAMAN TENTANG SANITASI AMAN

“*Tutur Para Pelaku*”

”MULAI DARI DIRI DAN KELUARGA”

Agustina Yusiana Poy, seorang gadis, 18 tahun Siswa SMKN 1 Maluk. Sebagai perwakilan siswa dalam program ini merasakan dan melihat banyak perubahan yang terjadi dengan melibatkan diri dalam sebuah tim pengembang video promosi sanitasi aman. Agustina menjadi lebih tahu tentang bagaimana menggunakan kamera dengan tepat sesuai teknik yang benar. Dan banyak pengalaman lainnya seperti penggunaan *clapper* yang sebelumnya tidak tahu, harus digunakan seperti apa serta ilmu perfilman yang asing baginya. Aspek yang *dicapture* tentang Sanitasi membawa Agustina merasa beruntung dapat dua hal yaitu teknik perfilman dan ilmu sanitasi. Pada awalnya Agustina merasa pembuatan film itu mudah. Setelah turun lapangan dan merasakannya sendiri, ternyata sangat sulit dan banyak rintangannya. Perubahannya sekarang adalah setiap pengambilan video, menjadi lebih hati-hati dan mencoba untuk lebih stabil agar menghasilkan gambar dan video terbaik. Awalnya meremehkan tentang pengambilan video, sekarang lebih berhati-hati, mencoba lebih stabil dan tertib dalam pengambilan video.

Disisi lain, dari ilmu sanitasi yang Agustina dapatkan, sekarang lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Seperti misalnya melihat sungai di desa-desa, Agustina melihat dan berfikir apakah sungai tersebut



termasuk sanitasi aman atau layak?. Perubahan yang dirasakan untuk sekarang ini, ingin lebih banyak bercerita kepada masyarakat tentang sanitasi yang aman itu seperti apa.

Sekarang memperhatikan sanitasi yang ada di keluarga terlebih dahulu. Kemudian melihat sanitasi di lingkungan sekitar dan merasa ingin merubahnya ketika melihat sanitasi belum layak agar berubah menjadi sanitasi yang aman. Ketika ditanya, bagaimana dan mengapa perubahan tersebut dapat terjadi?, Agustina berucap "*Ketika saya melihat satu desa yang masih belum mempunyai tangki septik, saya langsung berpikir kalo desa tersebut masih menjadi desa yang belum paham tentang sanitasi yang aman. Kini saya mendapatkan banyak ilmu tentang sanitasi aman itu seperti apa dan bagaimana sehingga banyak sekali perubahan yang dirasakan pada saat ini*".

Banyak pihak seperti teman dan keluarga yang menyebabkan Agustina merasakan perubahan tersebut. Mereka semua mendorong dan memberi motivasi kepada Agustina untuk melakukan hal yang berbeda dan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Agustina berkata "*saat melihat teman yang sedang mengambil video, dan ada kesalahan dalam pengambilannya, disitulah terkadang saya mengajari dan memberitahu teman saya tentang teknik yang baik*". Sedangkan untuk isu sanitasi, harus terjadi di lingkungan keluarga terlebih dahulu dan tetangga sekitar. Saat mengetahui tentang sanitasi, kemudian memeriksa tangki septik yang ada di rumah terlebih dahulu. Pada awalnya tidak ada kepikiran untuk menyedot tangki septik, sekarang ada kepikiran untuk rutin menyedot tangki septik di rumah sendiri.

Beberapa alasan yang dituliskan Agustina, mengapa perubahan tersebut signifikan/ penting?. Karena kebersihan untuk keluarga dan lingkungan sekitar itu sangat penting. Bisa berdampak juga untuk diri kita masing-masing. Jadi penting dari dampak yang dirasakan setelah perubahan

tersebut. Agustina-pun sudah merasakan apa dampak yang lebih luas yaitu kini di desa-nya lebih memperhatikan tangki septik rumah tangga. Sehingga pihak setempat ingin menghubungi IPLT yang ada di daerah-nya. Kemudian akan melaksanakan penyedotan tinja secara rutin sesuai dengan waktu yang sudah diajarkan atau diberitahu. Akhirnya Agustina merasa bangga dan berkata *“Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mitra Samya, UNICEF, dan guru pendamping saya yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman. Selanjutnya, “penting bagi kita untuk mengetahui sanitasi aman. Karena sangat banyak dampak yang akan terjadi jika kita mengabaikan ataupun tidak mengikuti ketentuan sanitasi aman”*. Agustina dan teman-temannya menghimbau dan mengajak dengan berucap *“Marilah sama-sama kita menjaga kebersihan dan lingkungan kita agar tidak terkontaminasi dengan air sungai yang kotor ataupun tinja dari lingkungan masih BABS”*.

“PERUBAHAN SANITASI YANG KUINGINKAN”

Survey dan promosi tentang pengelolaan air limbah domestik adalah salah satu kegiatan dalam program kemitraan ini.

Baiq Winingsih, 46 tahun, adalah salah seorang enumerator yang bertugas di wilayah Lombok Timur, merekam perubahan mendasar yang terjadi di lapangan yaitu:

1) Pengetahuan masyarakat terkait sanitasi aman dan pengelolaan limbah domestik yang aman; 2) Kemampuan masyarakat dalam menjawab kuesioner secara online dengan pembatasan waktu yang selama ini tidak pernah dilakukan (biasanya menjawab secara langsung



dengan form kuesioner *hard copy* dan *face to face*); 3) Ketekunan masyarakat dalam mengikuti proses mulai dari tahapan *baseline*, promosi oleh sanitarian sampai dengan pengisian kembali *endline*; 4) Pengenalan kembali promosi kesehatan yang dilakukan dengan media video (menonton bareng) yang selama ini jarang dilakukan oleh masyarakat; dan 5) Terhadap Sanitarian menjadi pengalaman yang baru untuk melakukan kegiatan survey berbasis online dengan media promosi yang selama ini, tidak pernah dilakukan di tingkat masyarakat.

Perubahan tersebut terjadi dan dituturkan oleh Baiq Win dalam proses pengumpulan informasi bersama Ibu-ibu di desa. Pada awal pengisian *baseline* survey, masyarakat masih ber-tanya terkait jawaban yang akan diberikan dalam mengisi jawaban kuisisioner. Setelah adanya promosi oleh Sanitarian, masyarakat tanpa bertanya bias langsung menjawab pertanyaan *endline*, serta waktu yang dibutuhkan menjadi lebih cepat dibandingkan saat pengisian *baseline*. Masyarakat menjadi paham terkait sanitasi aman, serta bisa menilai terkait kondisi sanitasi yang dimiliki saat ini (termasuk aman atau tidak). Baiq Win juga mencatat beberapa alasan mengapa perubahan tersebut terjadi, diantaranya adalah; 1) Adanya penjelasan yang detail baik oleh enumerator dan Sanitarian dalam setiap proses pelaksanaan survey berbasis online; 2) Adanya kerjasama baik dari pihak desa/kelurahan dengan enumerator dan sanitarian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut; dan 3) Peran kader desa/kelurahan yang cukup aktif dalam membantu suksesnya kegiatan survey berbasis online yang pertama kali dilaksanakan dan menjadi pengalaman baru bagi mereka.

Perubahan terkait dengan peningkatan pemahaman masyarakat yang diuraikannya itu terjadi karena kontribusi dan dorongan/motivasi banyak pihak. Pihak tersebut adalah Pemerintah desa/kelurahan, enumerator, sanitarian dan kader desa/kelurahan. Kontribusi pihak desa/

kelurahan, terjadi pada saat pra kegiatan survey, dimana pihak desa/ kelurahan melakukan identifikasi peserta yang akan dihadirkan dengan kriteria yang ditentukan, serta mengkoordinasikan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan. Kontribusi dari enumerator terjadi pada saat pra survey, ketika melakukan koordinasi dengan pemerintah desa/ke-lurahan dalam penentuan responden, serta dengan sanitarian untuk penentuan jadwal dan kelengkapan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan. Sedangkan pada saat pelaksanaan survey, enumerator memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan survey *baseline* dan *endline*-nya. Pihak sanitarian, terjadi dalam pelaksanaan promosi kesehatan serta bekerjasama dengan enumerator dalam memandu masyarakat untuk pelaksanaan survei berbasis online. Sedangkan dari pihak Kader desa/ kelurahan, terjadi pada saat pra survey (membantu enumerator dalam penentuan responden yang memiliki kriteria) dan pada saat survey berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Beberapa alasan tentang mengapa perubahan tersebut signifikan/penting adalah; 1) dengan adanya perubahan pengetahuan masyarakat terkait sanitasi aman dan pengelolaan air limbah domestik yang aman, diharapkan mampu merubah perilaku/kebiasaan dan pola pikir masyarakat dalam pengelolaan sanitasi ke depannya; 2) dengan bertambahnya ilmu pengetahuan di tingkat masyarakat terkait sanitasi dan limbah domestik yang aman diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan di desa/kelurahan terkait penanganan masalah sanitasi di masyarakat; dan 3) dengan pola promosi kesehatan yang dilakukan pada saat survey oleh sanitarian, mem-berikan pengalaman baru untuk dikembangkan lagi kedepannya, dalam pengembangan media promosi di tingkat masyarakat sehingga tidak monoton seperti yang terjadi selama ini.

Baiq Win juga menceritakan beberapa bukti perubahan yang sudah terjadi yaitu; masyarakat mampu menjawab kuesioner berbasis *online* baik dalam *baseline* maupun *endline*. Waktu menjawab *baseline* dengan *endline* cukup signifikan (*endline* lebih singkat, karena pertanyaan dalam kuesioner sudah dipahami dengan adanya berbagai penjelasan dari Sanitarian. Baiq Win berharap kedepannya bahwa masyarakat tidak lagi “gaptek” jika ada survey sejenis yang berbasis online (sudah mahir dalam mengaplikasikannya) serta pemahaman yang bertambah terkait dengan sanitasi aman akan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, Baiq Win berucap sambil berharap “*Diharapkan hasil survey ini akan memberikan gambaran secara umum mengenai perubahan pengetahuan terkait sanitasi aman dan pengelolaan limbah domestik yang aman di tingkat masyarakat, sehingga akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja ke depan baik bagi pemerintah desa/kelurahan dan kabupaten guna mendukung program pemerintah menuju kecamatan dan kabupaten ODF*”. “*Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat mampu menilai kondisi sanitasi yang dimiliki saat ini, apakah sudah termasuk dalam kategori aman atau tidak. Jika tidak, apa yang harus kita lakukan ke depannya?*”. Sanitarian yang diajak berpartner di lapangan oleh Baiq Win juga berucap “*semoga Pemerintah Desa/Kelurahan ke depannya bisa bekerja sama dengan pihak Puskesmas, dalam menyusun rencana kegiatan untuk mendukung percepatan menuju kecamatan ODF*”. Pihak Kepala Desa dan Lurah yang menjadi lokasi survey dan promosi memiliki dorongan yang kuat untuk sebuah perubahan dan berkata “*Kami berkomitmen untuk selalu mendukung program pemerintah terutama dalam menuju kecamatan ODF, dan harapan ke depannya semoga UNICEF tidak hanya melakukan survey saja tetapi juga memberikan dukungan kegiatan kepada kami terutama dalam penanganan masalah sanitasi di masyarakat*”.

“SANITASI AMAN, MASA DEPAN CERAH”

Darmawan Aryandani laki-laki, 17 tahun adalah seorang siswa/ pelajar dari SMKN 1 Selong yang

ikut dalam program pengembangan media promosi sanitasi. Darmawan memiliki harapan yang besar karena masa depan akan cerah jika sanitasi aman. Darmawan merasakan banyak sekali hal yg berubah



setelah mengikuti kegiatan ini, mulai dari merubah pola hidup menjadi semakin bersih dan lebih peduli tentang lingkungan yang ada di sekitar terutama mengenai BABS.

Sebelum Darmawan mengikuti kegiatan ini, dia kurang paham dan kurang memperhatikan kondisi sanitasi yang ada di lingkungan masyarakat, serta tidak mengerti apa dampak dari BABS. Tetapi setelah mengikuti kegiatan ini, Darmawan menjadi lebih paham mengenai sanitasi aman, dan tentunya dapat ikut serta dalam mengkampanyekan BASNO secara lebih aktif lagi. Perubahan tersebut terjadi semenjak Darmawan berpartisipasi dalam kegiatan ini, dia mendapat banyak sekali ilmu terutama dalam masalah sanitasi. *“Kita tahu bahwa NTB belum mencapai BASNO sehingga sepatutnya saya sebagai anak muda untuk dapat berpartisipasi agar harapan yang kita inginkan dapat tercapai”* katanya sambil menunjukkan raut wajah yang semangat dan termotivasi. Tentu perubahan yang dirasakannya adalah karena selain dorongan dari dalam dirinya, juga karena para mentor dari kegiatan ini seperti Mitra Samya dan UNICEF dan pihak yang memberikan dan memperluas ilmu tentang sanitasi.

Darmawan juga berpendapat bahwa perubahan yang dirasakan tersebut adalah hal penting karena dengan perubahan tersebut mereka semakin

menjadi lebih baik dan semakin peduli terhadap diri sendiri dan orang lain, sehingga harapan yang diinginkan dapat tercapai. Lantas apa dampaknya yang lebih luas?, tentu dapat merubah pola hidup dan perilaku didalam dirinya, seperti yang diharapkannya. Harapan kedepannya yang dikatakan Darmawan adalah *"semoga dengan perubahan ini saya dapat menjadi role model bagi masyarakat khususnya kaum muda agar lebih peduli tentang sanitasi yang ada dilingkungan kita"*. Hal tersebut sesuai dengan slogan yang dikatakannya bahwa *"Kami muda, kami bisa!, bahwa perubahan untuk generasi milenial"*. Ucapan tersebut juga mendapat dukungan kuat dari partnernya Humairoh yang berucap *"Jangan takut akan perubahan, kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan memperoleh sesuatu yang lebih baik lagi kedepannya"*

"IMAGE SANITASI, BARU BAGIKU"

Fivin Trisna Andriati, 27 tahun adalah seorang enumerator dalam kegiatan survey dan promosi di program ini yang bertugas di Sumbawa Barat. Fivin melihat bahwa hal yang berubah secara mendasar adalah; 1) Kemampuan masyarakat untuk membuka link-aplikasi survey, yang selama ini tidak pernah



dilakukan; 2) Kemampuan masyarakat dalam menjawab kuesioner secara on-line dengan pembatasan waktu dengan pertanyaan sama dalam dua tahapan; 3) Pengetahuan tentang sanitasi aman bagi enumerator yang selama ini tidak pernah diketahui sedetail saat ini; dan 4) Pengenalan kembali promosi kesehatan yang dilakukan dengan media berupa video dan menonton secara bersamaan hasil karya anak SMA/SMK yang selama ini jarang dilakukan oleh masyarakat.

Jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, Fivin melihat bahwa pada awal pengisian *baseline* survey, masyarakat masih banyak yang tidak bisa membuka link survey akibat tidak pernah menggunakan HP Android untuk kegiatan seperti ini (biasanya mereka hanya menggunakan HP android untuk membuka WA saja) namun pada saat *endline* mereka sudah lancar dalam membuka link-survei dan menjawab pertanyaan. Fivin sebagai enumerator juga menjadi lebih paham tentang sanitasi dan pengelolaan limbah domestik setelah dilakukan penjelasan oleh Sanitarian ditambah lagi dengan adanya media promosi berupa gambar dan video. “Sanitasi” adalah hal yang baru bagi seorang Fivin.

Ketika ditanya bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi?, Fivin menjelaskan bahwa perubahan dapat terjadi akibat adanya penjelasan yang detail baik oleh Enumerator dan Sanitarian dalam setiap proses pelaksanaan survey berbasis online. Adanya kerjasama baik dari pihak desa/kelurahan dengan Enumerator dan Sanitarian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah faktor lain yang menjadi penyebab perubahan tersebut.

Fivin tidaklah sendirian dalam perubahan ini. Ada banyak pihak yang mendorong terjadinya perubahan ini yaitu; 1) **Pihak Desa/kelurahan**: Terjadi pada saat sebelum kegiatan survey (yang mana pihak desa/kelurahan melakukan identifikasi terkait peserta yang akan dihadirkan dengan kriteria yang ditentukan, serta mengkoordinasikan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan); 2) **Pihak Sanitarian**: dalam pelaksanaan kegiatan survey melaksanakan promosi kesehatan serta bekerjasama dengan enumerator dalam memandu masyarakat dalam pelaksanaan survey berbasis online; 3) **Kader desa/kelurahan** : pada saat sebelum survey (membantu enumerator dalam penentuan responden yang memiliki kriteria yang telah ditetapkan serta membuat grup WA untuk responden yang akan dihadirkan pada saat pelaksanaan survei). Beberapa alasan yang terungkap mengapa perubahan tersebut penting,

yaitu; 1) Memberikan pengalaman baru bagi masyarakat dalam pelaksanaan survey dengan menggunakan HP android dan secara online menjawab pertanyaan yang ada; 2) Memberikan ilmu pengetahuan yang baru bagi enumerator dan masyarakat terkait sanitasi aman dan pengelolaan limbah domestik yang bisa dikembangkan di tingkat masyarakat; dan 3) Memberikan pengalaman baru dengan menonton bareng video terkait sanitasi dan perubahan yang terjadi (inovasi dilakukan di beberapa desa) terkait sanitasi.

Fivin memiliki bukti dan harapan kedepan tentang perubahan tersebut bahwa masyarakat mampu menjawab kuesioner berbasis online baik dalam *baseline* maupun *endline* dengan adanya perbedaan durasi waktu yang dibutuhkan sebelum dan sesudah promosi. Harapan ke depannya adalah masyarakat mampu mengoperasikan HP Android secara baik, terutama jika ada lagi survey berbasis online sejenis yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Ungkapan langsung Fivin bahwa “*Dengan kegiatan ini, diharapkan enumerator dan masyarakat mampu menilai kondisi sanitasi yang dimiliki saat ini, apakah sudah termasuk dalam kategori aman atau tidak, Terutama bagi lingkungan sekitarnya*” adalah bagian lain atas perubahan penting ini. Pihak Sanitarian juga berharap dengan berkata “*harapan kami semoga tahun 2021, pihak desa/kelurahan bisa lebih aktif bekerjasama dengan kami (Sanitarian) dalam menuntaskan masalah sanitasi di tingkat masyarakat (STBM 5 Pilar)*”; Sedangkan pihak Desa/Kelurahan yang menjadi ujung tombak di lapangan berharap dan berkata “*diharapkan untuk tahun 2021 pihak UNICEF akan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk penyediaan Tanki septick komunal yang aman*”.

“BUAH DARI SURVEI ONLINE DAN PROMOSI KESEHATAN”

Herman Affandi, S.KM, laki-laki 26 tahun sebagai Pendamping Pokja AMPL di Kabupaten Lombok

Timur, memberikan catatan tersendiri dalam kegiatan survey dan promosi kesehatan. Perubahan mendasar sebagai capaian yang dapat disimpulkan oleh Herman dari kegiatan ini adalah bahwa; 1) Mengetahui kebiasaan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat; 2) Mengetahui



Pengetahuan masyarakat tentang sanitasi aman; 3) Mengetahui permasalahan/Kendala masyarakat dalam membangun sanitasi aman dan 4) Menambah Pengetahuan masyarakat tentang sanitasi aman.

Berdasarkan capaian kegiatan tersebut di atas maka terjadi perubahan perilaku masyarakat ke hal yang lebih positif. Hal tersebut terlihat dari bertambahnya pengetahuan masyarakat dan sikap masyarakat yang setuju dengan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) yang aman sehingga besar kemungkinan sanitasi yang akan terbangun di kalangan masyarakat kedepannya adalah sanitasi yang aman. Jika dibandingkan dengan sebelumnya Herman mencatat bahwa sebelum dilakukannya survei dan promosi Kesehatan, masyarakat tidak mengetahui apa itu sanitasi aman/SPALD yang aman, masyarakat tidak mengetahui mamfaat sanitasi aman dan masyarakat tidak mengetahui dampak tidak menggunakan sanitasi aman. Ternyata setelah dilakukannya promosi kesehatan, maka situasi saat ini adalah; 1) Masyarakat mengetahui apa itu sanitasi aman/SPALD yang aman; 2) Masyarakat mengetahui manfaat sanitasi aman; 3) Masyarakat mengetahui dampak tidak menggunakan sanitasi aman dan 4)

Masyarakat setuju dengan SPALD yang aman dan kedepannya akan membangun sanitasi yang lebih aman.

Beberapa situasi tentang bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi, Herman juga menemukan bahwa dengan adanya survei dan promosi kesehatan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan merubah pola pikir serta sikap masyarakat sehingga menyetujui untuk membangun dan menggunakan sanitasi yang lebih aman. Sudah tentu ada pihak yang juga ikut mendorong atas perubahan tersebut yaitu tim survei dan promosi kesehatan serta pemerintah desa yang menyediakan aula di desa tersebut pada saat survei dan promosi Kesehatan. Alasan mendasar mengapa perubahan tersebut penting adalah karena dengan pengetahuan akan merubah pola pikir dan sikap serta tindakan seseorang.

Atas perubahan tersebut telah memberi harapan akan dampak yang lebih luas kedepan yaitu dengan adanya pengetahuan masyarakat tentang sanitasi aman, maka pola pikir dan sikap masyarakat-pun berubah. Hal tersebut terlihat dari persetujuan masyarakat untuk membangun dan menggunakan sanitasi yang lebih aman. Herman akhirnya memberikan semangat dan motivasi dengan berkata *“Jika kita selalu menjaga dan melestarikan lingkungan, maka hidup kita akan terus sehat dan sejahtera”*. Pihak Pemerintah Desa juga menghimbau *“Mari kita menerapkan pola hidup sehat dengan membangun dan menggunakan fasilitas sanitasi yang aman”*

“SANITASI MENYADARKAN MASYARAKAT”

Ibu Indah adalah seorang PNS yang berusia 43 tahun pada tahun 2020. Sebagai anggota POKJA AMPL NTB, Ibu Indah menemukan pembelajaran penting bagaimana isu Sanitasi mampu menyadarkan masyarakat. Beberapa perubahan mendasar yang ditemukan adalah adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup bersih dan

sehat, kepedulian masyarakat terhadap sarpras yang terbangun meningkat dan adanya peningkatan kinerja Pokja AMPL dalam memfasilitasi kegiatan di tingkat kabupaten dan desa. Secara kongkrit perubahan yang terjadi jika dibandingkan dengan situasi awalnya adalah bahwa sebelum ada pendampingan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi masih sangat kurang. Kepedulian masyarakat terhadap sarpras terbangun sangat kurang. Sekarang sudah banyak yang peduli, tetapi perlu ditingkatkan kembali. Keaktifan Pokja AMPL yang semula kurang kelihatan, setelah ada pendampingan dari Mitra Samya sudah berjalan dengan baik.



Perubahan tersebut terjadi karena adanya pendampingan, sering diikutkan dalam workshop atau pelatihan, adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dan adanya monitoring bersama secara berkala. Karena ini kemitraan, maka pihak yang mendorong terjadinya perubahan yaitu UNICEF melalui Mitra Samya baik di wilayah kerja provinsi maupun Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Timur. Alasan mendasar mengapa perubahan tersebut signifikan/penting adalah, karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dan meningkatnya kinerja pokja AMPL Provinsi maupun Kabupaten. Dampak yang lebih luas bisa ditunjukkan Ibu Indah adalah bahwa Kabupaten Sumbawa Barat telah dinyatakan ODF dan sudah deklarasi. Dari keberhasilan tentang perubahan tersebut, Ibu Indah berkata *“Harus dengan kesadaran dan kerja keras dari berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan mengenai sanitasi dan air bersih di masyarakat”*.

“MENITI JALUR MENUJU ODF, SANITASI LAYAK DAN AMAN KAB. LOMBOK TIMUR 2024”

Lalu Agus Supardi laki-laki 48 tahun Fasilitator SMS Kabupaten Lombok Timur melihat perubahan mendasar yang sudah terjadi dalam konteks program ini adalah bahwa Pokja AMPL Kab. Lombok Timur aktif untuk proses ODF Lombok Timur menuju Sanitasi Layak dan Aman tahun 2024. Sejak tahun 2006, Pokja AMPL Lombok Timur sudah mulai berproses dan mengkampanyekan program STBM 5 pilar untuk melahirkan Desa ODF. Dalam kegiatan kampanye program STBM di masyarakat tersebut memerankan Sanitarian Puskesmas sebagai aktor utama dalam rangka perubahan perilaku hidup bersih dan pola pikir masyarakat agar secara sadar membangun jamban sendiri. Sanitarian juga mengadvokasi Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk mendukung program STBM di wilayahnya masing-masing.



Setelah 16 tahun tepatnya per Desember 2020, jumlah Desa ODF di Lombok Timur adalah 112 Desa/Kelurahan, tetapi belum ada satupun wilayah Kecamatan yang meraih predikat ODF/SBS/BASNO. Pada 15 Desember 2020, Pokja AMPL mengadakan Rapat Koordinasi Percepatan ODF Kabupaten Lombok Timur menuju sanitasi aman. Rapat dihadiri 68 Kepala Desa/Lurah, 5 Camat, 9 Puskesmas, Pokja AMPL Kabupaten, Pokja AMPL Provinsi NTB. Pada Rakor tersebut dilakukan penandatanganan Deklarasi Komitmen ODF/SBS 5 Kecamatan (Sakra Barat, Selong, Wanasaba, Aikmel dan Pringgasela) Tahun 2021. Sehingga tahun 2021 menjadi puncak lahirnya ODF/SBS Kecamatan pertama di kabupaten Lombok Timur sejak berproses selama 16 tahun.

Penandatanganan komitmen deklarasi ODF/SBS tahun 2021 di 5 Kecamatan tersebut, oleh peserta Rakor karena; 1) Kepala Desa/Lurah menyadari bahwa masyarakatnya akan bisa sehat bebas dari stunting, diare, DBD, Ispa dll dan meningkat IPM kalau Desa/Kelurahannya sudah ODF (BASNO); 2) Dukungan UNICEF dan Mitra Samya yang memfasilitasi kegiatan tersebut, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur semangat serta aktif untuk mencapai ODF 5 Kecamatan tahun 2021 dan ODF Kabupaten Lombok tahun 2024; dan 3) Kepala Desa mempunyai kekuatan dengan adanya Dana Desa untuk memberikan stimulan bagi masyarakat untuk mencapai ODF Desanya.

Target aksi perubahan, yang semula ODF Desa menjadi ODF 5 Kecamatan tahun 2021, didorong oleh Pokja AMPL Lombok Timur. Ide awalnya adalah dari Dinas Kesehatan (pak Zakaria), karena kegiatan STBM di Lombok Timur sudah 16 tahun, namun belum bisa melahirkan ODF Kecamatan. Kemudian dipilih 5 Kecamatan yang mendekati ODF untuk difokuskan dikeroyok rame-rame dengan melakukan aksi oleh setiap OPD bersama Kepala Desa, Lurah, Camat, Puskesmas sesuai dengan tupoksinya sampai 4 Kecamatan tersebut menjadi Kecamatan ODF.

Kegiatan Penandatanganan Deklarasi Komitmen ODF tahun 2021 di 5 Kecamatan tersebut, oleh peserta Rakor adalah perubahan signifikan karena dahulunya hanya target Desa ODF. Dengan adanya 5 Kecamatan ODF tahun 2021, maka ada beberapa hal penting yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur yaitu; 1) Pembangunan perubahan perilaku manusia khususnya STBM pilar 1 akan lebih terfokus pada 5 kecamatan tersebut; 2) Kecamatan yang sudah ODF akan memberikan respon positif terhadap Kecamatan lain untuk termotivasi dalam mencapai ODF Kecamatan. Lalu Agus sebagai Fasilitator-pun memiliki harapan besar dan berkata *“Sudah 16 tahun Kabupaten Lombok Timur berproses dengan program STBM untuk melahirkan Desa ODF yaitu Desa Bebas*

Buang Air Besar Sembarangan, tetapi indah rasanya Jika 5 kecamatan ODF tahun 2021 mejadi Kecamatan ODF yang lingkungannya nyaman, bersih dan masyarakatnya sehat". Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur juga ikut merasakan dan berkata *"bangga rasanya kalau Lombok Timur mempunyai 5 Kecamatan ODF tahun 2021 dengan 68 Desa/Kelurahan".*

"PENASARAN BERUJUNG KESADARAN TENTANG SANITASI AMAN"

Subhan adalah seorang PNS bekerja di Bappeda Kabupaten Lombok Timur. Perubahan yang didapat adalah sebuah kesadaran untuk perubahan. Pada awal Mitra Samya membawa konsep tentang sanitasi aman, pak Subhan sempat menunjukkan ketidakpercayaan. *"Kami kaget karena selama ini kami merasa telah memakai dan menerapkan sanitasi layak".* Kemudian Pak Subhan semakin penasaran ingin mengetahui lebih jauh tentang Sanitasi aman itu bagaimana? UNICEF melalui Mitra Samya masuk dengan berbagai aktifitasnya di Lombok Timur. Pada saat mengikuti joint monitoring di desa Sembalun, Tim yang diikuti oleh pak Subhan melihat presentasi tentang sanitasi aman yang disampaikan oleh pak Andre dari Bekasi. Beliau ceritakan tentang Cara membuat septictank layak dan aman.*"Kami yang selama ini menganggap bahwa leher angsa itu saja sudah cukup aman, ternyata membuat septiktank dengan leher angsa dan memperhatikan seluruh salurannya kedap air dan dicor rapi, itu juga bisa tahan gempa"* Pikir pak Subhan. Maka dari presentasi dan cerita itu membuat pak Subhan sadar akan pentingnya sanitasi aman untuk terhindar dari pencemaran dan tahan gempa.



“MEMBIASAKAN YANG TIDAK BIASA SELAGI MUDA”

Rita Bunga Familia seorang guru di SMKN 1 Maluk, berusia 38 tahun.

Dalam program ini sebagai pembimbing tim siswanya mengikuti lomba pengembangan media film untuk promosi kesehatan sanitasi. Sebagai seorang guru, jelas bahwa perubahan terjadi dari tidak tahu menjadi tau, dari tidak peduli menjadi peduli



dan ingin membuat konten yang menarik dalam bidang sanitasi. Jika dibandingkan dengan kapasitas sebelumnya, maka Ibu Rita melihat bahwa situasi awal tidak pernah berfikir untuk membuat film bertema sanitasi, tidak pernah terpikirkan oleh siswa untuk peduli dengan perilaku hidup sehat, tidak pernah membayangkan akan mendapat ilmu dan pengalaman baru yang biasanya hanya didapat dibangku kuliah. Sedangkan situasi saat ini, siswa lebih semangat dan percaya diri untuk terus belajar dengan hal-hal baru, lebih banyak tahu tentang perilaku hidup sehat, lebih berpengalaman lagi untuk membuat sebuah film yang kreative. Ibu Rita pun menuturkan dengan mudah bahwa: *“Perubahan terjadi karena siswa diberi kesempatan untuk berkarya dengan seluas luasnya, dengan kepercayaan bahwa mereka mampu, keyakinan serta dukungan dari berbagai pihak, komitmen belajar pada saat covid melalui zoom mampu memotivasi keingintahuan siswa, tugas-tugas yang diberikan merupakan proses belajar untuk bertanggung jawab”*. Kata Ibu Rita sambil menunjukkan semangat bagaimana siswanya berkreasi.

Dalam mencapai perubahan ini, Ibu Guru Rita tidak sendirian, tetapi ada para penggerak yang lebih dulu bekerja dan peduli dengan sanitasi, baik pada saat memberikan materi pada proses pembekalan maupun pada saat siswa mewawancarai narsum. Hal tersebut sangat membantu siswa

melakukan proses pembuatan film serta terjun kelapangan langsung untuk memperoleh fakta-fakta yang terjadi tentang sanitasi. Alasan mendasar yang Ibu Rita katakan mengapa perubahan tersebut sangat penting adalah ibarat pepatah lama mengatakan “*menanam pepaya akan berbuah papaya*”, “*menanam kebaikan akan berbuah manis kedepannya*”, Kata Ibu Guru Rita. Pandemi covid memang belum berlalu tetapi kampanye harus tetap dilakukan dengan cara-cara yang sesuai di masa covid ini.

Kemudian Ibu Guru Rita meyakini dampak yang lebih luas dan berkata bahwa “*dengan adanya kepedulian, saya meyakini tentang pengalaman dan kepedulian siswa, mereka akan menceritakan pengalaman mereka kepada orang-orang terdekat, mempraktikkan ilmu yang diperoleh serta membuat sebuah karya sesuai dengan usia dan minat generasi muda*”. Ibu Guru Rita juga berkata sebagai harapan kepada para pihak yang peduli dan siswanya “*Dengan belajar dan diajarkan untuk peduli, maka yang tidak biasa akan terbiasa untuk berbagai hal yang bersifat positif*”. Dan juga berharap kepada parapihak untuk terus membimbing, membagikan ilmu dan kesempatan kepada para siswa agar kampanye-kampanye ini diminati oleh generasi muda.

“JALAN BERLIKU MENUJU PERUBAHAN”

Saharudin, laki-laki 41 tahun PNS, Anggota POKJA AMPL Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menceritakan perubahan panjang terjadi di KSB. Perubahan mendasar yang terjadi sebagai akibat proses yang panjang adalah;

- 1) Lebih mudah memperkenalkan Program STBM terhadap masyarakat karena didukung sepenuhnya



oleh Lintas Pogram maupun Lintas Sektor; 2) lebih mudah mendapatkan dukungan dari pemerintah Desa dalam menjalankan Program Sanitasi Aman; 3) kondisi lingkungan terlihat lebih bersih dan 4) Ketersediaan sumber daya manusia (*leader* STBM) di tingkat masyarakat semakin bertambah dan sudah memiliki pengetahuan tentang 5 Pilar STBM dan Sanitasi Aman. Jika dibandingkan dengan situasi sebelumnya, maka pak Saharudin mencatat secara rinci tentang apa yang berubah dari situasi sebelumnya seperti berikut ini :

No	Situasi Awal	Situasi Saat Ini
1	Sulitnya mendapat dukungan dari lintas Sektor dalam menjalankan program	Lebih mudah mendapat dukugan dari lintas Sektor dalam menjalankan program
2	Memperkenalkan Program STBM dan Sanitasi Aman hanya di lakukan oleh OPD Terkait	Promosi Program STBM dan Sanitasi Aman Sudah di lakukan oleh Pemerintah Desa dan unsur lainnya.
3	Sulit melakukan pemicuan secara maksimal dikarenakan kurangnya tenaga terlatih.	Pemicuan bisa dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah tenaga terlatih sudah mencukupi.
4	Program STBM dan Sanitasi Aman belum dianggap menjadi program penting oleh Pemerintah Desa.	Lebih mudah mendapatkan dukungan dari pemerintah Desa dalam menjalankan Program STBM dan Sanitasi Aman

Program STBM dan Sanitasi Aman dimulai pada tahun 2016 dengan program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu dengan pembangunan jamban bagi masyarakat menengah kebawah yang belum memiliki jamban. Tenaga kesehatan khususnya di tingkat Puskesmas melakukan penyuluhan pemanfaatan jamban secara massive dan terus menerus. Dibentuk-lah tim kerja STBM dari tingkat Peliuk (193) Tim, Tim

Desa, Tim kecamatan dan Tim Kabupaten. Beberapa bentuk kegiatan STBM dan Sanitasi Aman di KSB sejak Feb 2017 hingga akhir tahun 2020 adalah; 1) Deklarasi Tuntas Pilar 1 STBM Tingkat Desa dan Kecamatan ; 2) Verifikasi oleh Tim STBM Provinsi; 3) Launching Program STBM; 4) Pembersihan sampah di aliran dan bantaran sungai dalam kota Taliwang serta fasilitas umum; 5) Pelatihan Tim Kerja STBM Tingkat Peliuk 193 orang; 6) Sensus Pengumpulan Data/Informasi Program STBM pada semua rumah tangga di KSB dengan 965 tenaga sensus (5 orang per Peliuk), dari ASN Pendamping, Agen Pemberdayaan Gotong Royong dan Tenaga Kesehatan Lapangan/Kader/Relawan; 7) Tabulasi dan analisis data Program STBM; 8) Lomba Kinerja Institusi dan Personalia Tim Kerja STBM Tingkat Peliuk/Blok Wilayah; 9) Lomba Implementasi 5 Pilar Progran STBM di Tingkat Peliuk/Desa se-Kab.Sumbawa Barat; 10) Lomba Kampung Sehat; 11) Verifikasi Pilar 2 dan 3 Tingkat Desa dan Kec.; 12) Deklarasi Pilar 2 dan 3 Tingkat Desa dan Kec.,; dan 13) Deklarasi Pilar 2 dan 3 Tk. Kabupaten.

Kegiatan yang mendukung program Sanitasi Aman di KSB adalah; 1) Peningkatan Kualitas Jamban (Pengelolaan Septik Tank) Thn 2017-2018 Rp 36.424.000.000, untuk 10.660 Unit Jamban (Thn 2019 Rp 28.000.000.000, untuk 8.000 Unit); 2) Pembangunan IPAL Komunal (& IPLT): dikelola oleh UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, pada Dinas PUPRPP KSB; dan 3) IPAL Komunal: instalasi pengolahan air limbah yang menerima dan mengolah air limbah rumahtangga dan/atau lumpur tinja rumah tangga. Total IPAL Komunal/IPAL Kawasan dan MCK sebanyak 40 unit, dengan sebaran: Kec. Poto Tano 5 unit untuk 750 KK, Kec. Seteluk 9 unit untuk 1.200 KK, Kec. Taliwang 10 unit untuk 1.650 KK, Kec. Brang Rea 1 unit untuk 500 KK, Kec. Brang Ene 4 unit untuk 500 KK, Kec. Jereweh 5 unit untuk 650 KK, Kec. Maluk 3 unit untuk 200 KK, Kec. Sekongkang 3 unit untuk 600 KK.

Ada beberapa pihak yang berkontribusi terhadap perubahan tersebut yaitu Tim Kerja STBM mulai dari Tingkat Peliuk s/d Tingkat Kabupaten dan adanya pelibatan Aparatur Sipil Negara sebagai tenaga pendamping di setiap Peliuk. Perubahan tersebut di atas cukup penting karena dilakukan secara menyeluruh di semua Wilayah, dilakukan oleh Tim dari Tingkat terbawah s/d tertinggi, dilakukan evaluasi secara terstruktur oleh Tim Kabupaten dan tingkat keberhasilan di lombakan sehingga memicu parapihak untuk gerakan perubahan ini.

Pak Saharudin dapat melihat dampak lebih luas bahwa yang terjadi adalah menurunnya angka Penyakit Berbasis Lingkungan di KSB dari tahun 2016 s/d 2020, meningkatnya kualitas kebersihan lingkungan, meningkatnya kualitas air bersih dan menurunnya angka stunting. Pak Saharudin memberikan motivasi dan berkata "*tanyakan pada dirimu sendiri, hari ini....sudahkah saya berbuat baik untuk masyarakat dan orang lain?*". Bupati KSB juga memberikan motivasi yang kuat atas perubahan ini dan berucap "*jadikan diri kita sebagai Agen Perubahan untuk Sumbawa Barat yang lebih baik*". Sementara Wakil Bupati Bapak Fuad Syaifuddin, ST berkata singkat dan padat yaitu "*kalo Bukan Kita Siapa... kalo Bukan Sekarang kapan*".

MELURUSKAN ARTI "TANKI SEPTIK" DAN MEMBANGUN PEMAHAMAN TENTANG SANITASI AMAN

Yayat Hidayat, 43 tahun sebagai Povincial Facilitator, Safely Managed Sanitation UNICEF wilayah NTB. Pak Yayat melihat bahwa yang mendasar sudah berubah karena program ini adalah adanya peningkatan pengetahuan dan perubahan mindset terkait sanitasi aman, bahwa pengelolaan air limbah domestik yang aman itu dimulai dari

penggunaan kloset leher angsa, penampungan awal yang kedap/tidak bocor, penyedotan tanki septik secara berkala 3-5 tahun sekali hingga pembuangan lumpur tinja di IPLT. Masyarakat dan pemerintah daerah masih ada berpikir bahwa tanki septik yang baik adalah tanki septik yang tidak pernah penuh sehingga tidak perlu disedot atau membuat tanki septik yang baru. Pemahaman



tersebutlah yang perlu diluruskan secara bertahap dengan bukti-bukti di lapangan dan peningkatan kapasitas.

Perubahan terjadi karena adanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan kegiatan promosi serta pembuatan media promosi (video dan lembar informasi) pengelolaan air limbah domestik aman bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Perubahan tersebut merupakan kontribusi banyak pihak seperti Pokja AMPL Provinsi dan Kab/Kota, Sanitarian, Tenaga Penggerak masyarakat, Anggota *Youth Sanitation Influencer*. Pak Yayat sebagai perwakilan UNICEF di NTB melihat bahwa perubahan terjadi karena berbagai kegiatan seperti pelatihan-pelatihan, promosi dan jambore sanitasi.

Perubahan tersebut menjadi penting karena sangat jelas untuk percepatan pencapaian ODF/SBS menuju sanitasi aman, sehingga bisa mengurangi angka kesakitan akibat penyakit berbasis lingkungan. Dampak luasnya sudah bisa diprediksi oleh pak Yayat misalnya Pemerintah daerah memberikan bantuan tanki septik pabrikan biofilter atau membangun tanki septik kedap serta membangun IPAL Komunal. Pemerintah daerah juga diharapkan bisa menyediakan truk sedot tinja dan IPLT dengan pengelolaan yang sesuai SOP. Dari perubahan tersebut, pak Yayat berharap dan berucap "*Perlu penciptaan enabling environment yang dapat mendukung terlaksananya percepatan ODF dan*

sanitasi aman, baik dari pemerintah sebagai regulator dan operator, juga dalam menciptakan demand yang sesuai”.

Banyak sekali pembelajaran yang pak Yayat dapat ambil dari proses pendampingan dan mengawal gerakan sanitasi menuju Sanitasi Aman diantaranya adalah;

- * Pemetaan profil sanitasi pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan dengan menggunakan *Instrument WASH Enabling Environment* dapat meningkatkan pemahaman Pokja AMPL Kab/Kota tentang kondisi daerah masing-masing dan juga Pokja AMPL Provinsi untuk menentukan prioritas pendampingan. Instrument monitoring Pokja AMPL Provinsi ke Kab/Kota yang baru dilaksanakan untuk Kab. Sumbawa Barat dan Kab. Lombok Timur dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap 8 Kab/Kota lainnya sehingga Pokja AMPL Provinsi bisa memahami kondisi capaian sanitasi seluruh daerah
- * Tersusunnya Roadmap BASNO Menuju Sanitasi yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 70/2020 bisa menjadi acuan bagi Pemprov maupun Pemda dalam menitegrasikan pilihan kegiatan ke dalam RKPD dan juga rencana kerja stakeholder lainnya. Salah satunya adalah untuk perumusan kegiatan WASH 2021. Fasilitasi perumusan usulan kegiatan WASH tahun 2021 sesuai dengan kebutuhan yang ada akan mempermudah Pokja AMPL Provinsi untuk mengidentifikasi peluang implementasi dari OPD Teknis di provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan mitra kerja lainnya. Peluang yang sudah didepan mata adalah pendayagunaan ZIS yang sudah diatur dalam bentuk panduan teknis. Panduan Teknis Pendayagunaan ZIS untuk Layanan Air Minum dan Sanitasi dapat menjadi acuan bagi BAZNAS maupun LAZ lainnya dalam melaksanakan program. Koordinasi antara BAZNAS dan LAZ lainnya dengan Pokja AMPL

Kab/Kota perlu ditingkatkan supaya lebih bersinergi dalam pelaksanaan program air minum dan sanitasi

- * Peserta pelatihan pembuatan video promosi yang berasal dari 10 sekolah bisa memfasilitasi uji coba penggunaan media dalam promosi di masyarakat. Hal ini bisa menjadi peluang untuk melakukan kampanye sanitasi kepada masyarakat melalui media online. Kegiatan promosi oleh Sanitarian mendapat respon yang cukup baik karena menggunakan video promosi hasil produksi dari pelajar di wilayahnya sehingga diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman. Promosi yang dilakukan juga diuji seberapa mampu meningkatkan pengetahuan warga masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik. Pengujian dilakukan melalui survey secara online. Pelaksanaan survey secara online bisa mempermudah proses pengisian kuesioner maupun analisis namun perlu diperhatikan terkait kepemilikan sarana serta jaringan
- * Kegiatan Jambore Sanitasi bagi pelajar bisa meningkatkan pengetahuan dan komitmen untuk ikut serta dalam promosi atau kampanye pengelolaan air limbah domestik di masyarakat dan lingkungan pendidikan. Kegiatan jambore melahirkan aktivis muda sebagai influencer untuk kampanye sanitasi. Terbentuknya Youth Sanitation Influencer (YSI) NTB bisa memicu sinergitas anggota dari pelajar untuk terus berkarya membuat media promosi dan melakukan kampanye di masyarakat melalui akun Facebook dan Instagram maupun media promosi lainnya. Terbentuknya YSI menuntut peran Pokja AMPL Provinsi maupun Kab/Kota untuk tetap menjaga komitmen dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka
- * Kegiatan *Advocacy Horizontal Learning* memberikan jalan bagi daerah untuk saling berbagi pengalaman dan pembelajaran positif

sehingga membuka peluang untuk replikasi. Komitmen Kepala Daerah yang cukup kuat terhadap program sanitasi dapat mendorong percepatan ODF dan sanitasi aman sehingga kegiatan advokasi perlu dilakukan kepada legislatif maupun eksekutif. Salah satu bentuk hasil yang bisa dilihat adalah perancangan Perda tentang PALD yang memayungi peta jalan atau road map PALD. Adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dan menjadi salah satu pendukung dalam mencapai Kabupaten/Kota ODF serta sanitasi aman. Tersusunnya Roadmap PALD kabupaten bisa memberikan arahan bagi OPD terkait dan pelibatan mitra WASH dalam pelaksanaan program pengelolaan air limbah domestic

- * Pengembangan aplikasi berbasis android dan website untuk mendukung Layanan Lumpur Tinja Terjadwal maupun Tidak Terjadwal akan mempermudah operator maupun masyarakat dalam mendapatkan layanan penyedotan tanki septik. Tersusunnya Perencanaan Teknis LLTT bisa menjadi acuan bagi OPD terkait dalam melaksanakan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal maupun Tidak Terjadwal Diperlukan dinergitas antara regulator dan operator pelaksana PALD di daerah sehingga bisa berjalan optimal
- * Peningkatan kapasitas operator dan regulator layanan pengelolaan air limbah domestic dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan layanan.

“JUJUR, IKHLAS DAN BERTANGGUNGJAWAB”

Arief Prayadi, Laki-laki 41 Tahun adalah Koordinator Kabupaten atau Faskab SMS wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Selama pendampingan yang dilakukannya sudah melihat beberapa perubahan mendasar baik pada diri pak Arief maupun stakeholder

dampingannya yaitu; 1) Ada penambahan Pemahaman dan Pengetahuan tentang 5 Pilar STBM dan pendalaman serta menambah wawasan terkait sanitasi Layak, Sanitasi Aman serta L2T2; 2) Lebih bertanggungjawab; 3) Bangga bisa bekerja sama dengan orang-orang yang hebat dan professional di Mitra Samya dan UNICEF; 4) Bangga



menjadi bagian dari tim perencanaan maupun tim penyusun program ataupun kegiatan bersama tim hebat yang ada di Mitra Samya; 5) Suatu kebanggaan tersendiri dikenal menjadi bagian dari Mitra UNICEF; 6) Dapat membantu dan bekerjasama dengan Pokja AMPL. Perubahan yang terjadi jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya berkaitan dengan pengalaman dan dimintai pendapat serta masukan terkait dengan PALD, diminta bantuan untuk melakukan sesuatu hal, ada yang menawarkan pekerjaan sampingan.

Setelah ditanya bagaimana dan mengapa perubahan tersebut dapat terjadi?. Pak Arief menguraikan *“Mungkin karena ekspektasi dan kepercayaan orang lain terhadap saya dan dianggap bisa, dapat membantu, jujur, ikhlas dan bertanggungjawab dan bisa diandalkan maka saya harus memperbaiki diri menjadi lebih baik sekemampuan saya dan jangan sampai mengecewakan orang lain”*. Penjelasan pak Arief bahwa perubahan tersebut juga karena kontribusi besar dari semua tim Mitra Samya pada semua kegiatan di kabupaten maupun di Provinsi, baik sebelum kegiatan, saat dan pasca kegiatan dilaksanakan. Tim UNICEF dan beberapa orang yang ada di Pokja AMPL adalah pihak yang sangat penting dalam perubahan yang dirasakan pak Arief.

Perubahan yang dirasakan pak Arief tersebut begitu penting karena menyangkut kepercayaan orang lain terhadap pak Arief dan untuk

mendukung atau mensupport pak Arief dalam pekerjaannya. “*Sehingga saya dapat memberikan hal yang terbaik dan baik bagi orang lain maupun pekerjaan saya*” Kata Arief. Dampaknya sudah dapat dirasakan, karena pada awalnya diragukan, kurang dilibatkan kemudian akhirnya dipercaya, diberikan tanggungjawab, dan berharap terus dipercaya dan semoga tidak mengecewakan. Pada akhirnya banyak kata-kata dan kalimat yang jujur dan ikhlas keluar dari pak Arief yaitu “*Selalu Jujur, Ikhlas dan Bertanggungjawab*”, “*Semuanya pasti bisa dilakukan selama ada kemauan*”, “*Orang Lain Bisa Kenapa Saya Tidak Bisa, Saya Pasti Bisa*”, “*Team Work Yang Baik/Kerjasama Yang Baik Adalah Kunci Keberhasilan Sesuatu Kegiatan*”, “*Jangan Kecewakan dan Jangan Rusak Kepercayaan Orang Lain*”, “*Selalu Belajar dan Terus Belajar Ilmu Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain*”. Termasuk dapat motivasi dari partner kerjanya dengan ucapan “*Saya Yakin Kamu Pasti Bisa*” dan “*Kamu Harus Bisa*”.

“BENIH BAIK DARI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK INDONESIA”

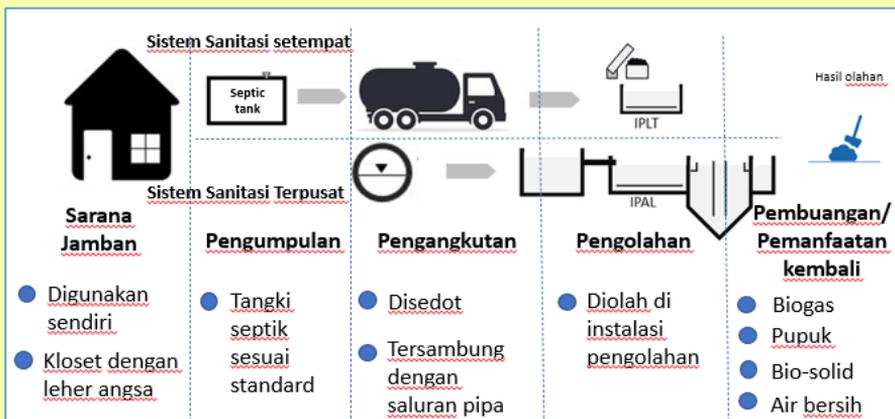
Maraita Listyasari, **WASH Specialist UNICEF Indonesia** ; Bekerja sama dengan pemerintah daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Pemerintah Propinsi NTB, Pemda Kabupaten Sumbawa

Barat dan Pemda Kabupaten Lombok Timur dalam mengupayakan pengelolaan air limbah domestik yang aman sungguh merupakan pengalaman yang luar biasa. *Leadership* dan komitmen dari pemerintah daerah dalam memperbaiki kondisi sanitasi patut diacungi jempol. Banyak



sekali ragam inisiatif yang dapat menginspirasi daerah lain dalam memulai pengelolaan air limbah domestik yang aman.

Melanjutkan komitmen dalam mencapai BASNO, Pemda Kabupaten Sumbawa Barat terus melakukan upaya perbaikan sanitasi dengan menciptakan gerakan sosial (*social movement*) sehingga sanitasi tidak hanya diperlakukan sebagai program pemerintah, melainkan kebutuhan semua pihak. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi ditingkatkan. Untuk itu, berbagai dinas maupun perangkat pemerintah hingga desa turut dikerahkan untuk bersama dengan masyarakat memperbaiki kondisi sanitasi. Pemasangan tangki septik yang sesuai standard turut digiatan sehingga lumpur tinja di rumah tangga dapat terkelola dengan baik mulai dari sumbernya. Penambahan armada truk sedot tinja terus ditingkatkan sehingga mampu melayani penduduk, terutama dalam memberikan layanan lumpur tinja terjadwal. Lebih lanjut, kinerja pengolahan di IPLT juga tidak luput dari perhatian. Kelengkapan SOP dalam mengoperasikan dan merawat IPLT terus dibenahi sehingga IPLT -sebagai pengolahan terakhir dari lumpur tinja- dapat membantu mengurangi risiko pencemaran oleh air limbah domestik.



Gambar 1 – Rantai Layanan Sanitasi

Beberapa hal menarik lainnya yang ditemui di Kabupaten Sumbawa Barat adalah adanya inisiatif pemda dalam melakukan pendataan masyarakat (*by name, by address*) yang diintegrasikan dengan perencanaan sanitasi, khususnya dalam merancang program layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT). Upaya monitoring ini dilengkapi dengan pendataan kualitas tangki septik yang sangat baik sebagai dasar perencanaan dalam perbaikan tangki septik. Selain itu, sebuah aplikasi yang berbasis android telah dibuat -dikenal dengan *Go Pinki-*, selain untuk membantu perencanaan dan implementasi LLTT, aplikasi juga digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam meminta layanan penyedotan.

Dari sisi keterlibatan pengusaha lokal, Kabupaten Sumbawa Barat patut diacungi jempol. Keberadaan pengusaha lokal dalam menyediakan tangki septik yang sesuai standard dengan harga terjangkau memudahkan masyarakat maupun pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas sarana sanitasi setempat di rumah tangga.

Berbagai hal menarik juga ditemui saat dampingan UNICEF di Kabupaten Lombok Timur. Kuatnya komitmen pemerintah dalam melanjutkan upaya perbaikan kondisi sanitasi, yang dimulai dengan percepatan pencapaian BASNO dan meneruskan ke pengelolaan air limbah domestik yang aman perlu diacungi jempol. Sebagai daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, pengelolaan air limbah domestik yang aman merupakan hal yang perlu dilakukan sehingga permasalahan sanitasi dapat tuntas diselesaikan. Upaya ini dituangkan dalam roadmap pencapaian BASNO dan pengelolaan air limbah domestik yang aman yang akan menjadi dasar penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Lombok Timur.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi, khususnya pengelolaan air limbah domestik yang aman, juga terus digiatkan. Pelibatan kaum muda dalam kampanye sanitasi aman bersama dengan Kabupaten Sumbawa Barat, diharapkan menjadi pengalaman inspiratif yang dapat diacu oleh kota/kabupaten lain dalam melibatkan kaum muda

dalam pengelolaan air limbah domestik yang aman; dimulai dari mendengarkan aspirasi dan juga turut melibatkan mereka sehingga dapat berperan aktif dalam memperbaiki kondisi sanitasi di lingkungan mereka. Hal lain yang cukup menarik adalah perhatian Kabupaten Lombok Timur yang tinggi atas dampak dari perubahan iklim terhadap peningkatan kualitas sanitasi, yang saat ini tengah menjadi isu penting, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi di tingkat global. Kabupaten Lombok Timur terlibat secara aktif dalam mengumpulkan berbagai bukti mengenai dampak dari bahaya terkait iklim (seperti banjir, kekeringan, angin kencang maupun naiknya muka air laut) yang mempengaruhi akses, layanan maupun perilaku terkait dengan sanitasi. Dari kajian yang dilakukan, beberapa dampak dari bahaya iklim terhadap sanitasi adalah sebagai berikut: (a) mempengaruhi ketersediaan air untuk menggunakan toilet, (b) keberfungsian sarana jamban, (c) kesulitan untuk menggunakan jamban karena banjir, dan (d) keengganan masyarakat untuk menggunakan jamban karena sulit digelontor (flushing), yang kemudian mempengaruhi perilaku terkait sanitasi. Kesulitan mengakses jamban membuat sebagian masyarakat kembali melakukan praktek buang air besar sembarangan yang kemudian mempengaruhi pencapaian BASNO sebagaimana diharapkan. Untuk itu, berbagai upaya advokasi tentang pentingnya sinergi antara perubahan iklim dan program sanitasi menjadi upaya tindak lanjut kedepan, termasuk merefleksikan sinergitas tersebut di dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Lombok Timur.



Gambar 2 – Salah satu Hasil Kuesioner pada Masyarakat di Kabupaten Lombok Timur

Hal lain yang diharapkan mampu menginspirasi propinsi lain di Indonesia adalah mengenai komitmen Kepala Daerah beserta jajarannya, termasuk Pokja AMPL, dalam menuntaskan permasalahan sanitasi. Pemerintah Propinsi NTB menyediakan dana APBD untuk menyediakan 11 fasilitator yang ditempatkan di Bappeda propinsi dan kabupaten/kota untuk membantu proses advokasi, perencanaan dan koordinasi dalam pengelolaan air limbah.

Dari segi pendanaan, penggunaan dana ZISWAF (zakat, infaq, wakaf dan shodaqoh) sebagai salah satu alternatif pendanaan untuk sanitasi, baik untuk mempercepat pencapaian BASNO maupun pengelolaan air limbah domestik yang aman, dapat dijadikan referensi yang sangat baik bagi daerah lain. Panduan penggunaan dana ZISWAF disusun untuk menjadi acuan sehingga dapat direplikasi oleh amil zakat lain selain dari BAZNAS, yang merupakan penggerak inisiatif ini.

Dalam rangka peningkatan pendampingan pada kabupaten/kota, Pemerintah Propinsi NTB juga turut serta dalam pengembangan perangkat (*tool*) untuk menilai kesiapan *enabling environment* (lingkungan yang mendukung) yang perlu diupayakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penyediaan akses dan layanan sanitasi. Penilaian ini

menjadi dasar bagi pemerintah propinsi untuk memberikan upaya pendampingan, dan juga menjadi perangkat advokasi yang sangat baik bagi kota/kabupaten melalui penyusunan benchmarking kota/kabupaten sebagai dasar monitoring.

Berbagai upaya ini diharapkan mampu menjadi benih yang baik untuk kemudian disemai, tidak hanya untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Timur, ataupun Propinsi Nusa Tenggara Barat, tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“INOVASI PEMBIAYAAN UNTUK BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN NOL (BASNO)”

Rostia La Ode Pado, WASH Officer Kantor Perwakilan UNICEF NTT & NTB ; Provinsi

Nusa Tenggara Barat (NTB) memprakarsai gerakan untuk mencapai status buang air besar sembarangan (BAB) yang disebut BASNO. Pada tahun 2017, hanya 82,6 persen desa dan satu dari 10 kabupaten yang telah mencapai status ODF. Peluang untuk mempercepat program tersebut muncul ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang memungkinkan mobilisasi dana zakat dan zakat (ZISWAF) untuk mendukung penyediaan akses air dan sanitasi bagi masyarakat miskin. Fatwa tersebut menjadi dasar hukum Badan Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengembangkan program bersama yang terdiri dari intervensi peningkatan akses sanitasi layak bagi masyarakat miskin dan perbaikan rumah tidak layak huni dan fasilitas sanitasi. Kegiatan ini dilaksanakan di dua kota (Mataram, Bima) dan delapan kabupaten (Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur,



Lombok Barat, Lombok Utara, dan Lombok Tengah), kegiatan ini merupakan kemitraan multi-stakeholder antara lembaga-lembaga kunci pemerintah, kelompok kerja air dan penyehatan lingkungan (Pokja AMPL), dan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat provinsi dan kabupaten, perangkat desa, dan puskesmas. Kegiatan ini masuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi.

Tujuan intervensi adalah untuk mempercepat kemajuan pencapaian status ODF di antara desa-desa di provinsi, dengan berfokus pada dukungan kepada anggota masyarakat yang paling miskin. Intervensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan mekanisme koordinasi lembaga-lembaga kunci pemerintah, khususnya kelompok kerja provinsi dan kabupaten dan otoritas desa. Status BASNO antar desa ditetapkan sebagai sasaran melalui sejumlah kegiatan yang melibatkan instansi pemerintah, BAZNAS, sanitarian, puskesmas kecamatan, dan masyarakat.

Strategi ini terutama bertujuan untuk berkontribusi pada Tujuan 6, dengan dua keluaran utama: meningkatkan jumlah desa yang telah mencapai status bebas buang air besar sembarangan di provinsi ini dan menyediakan fasilitas jamban dan rumah layak huni termasuk sanitasi didalamnya bagi anggota masyarakat miskin. Praktik ini sangat selaras dengan prioritas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, terutama melalui penggunaan peta kemiskinan milik pemerintah sebagai alat penargetan dan berkontribusi pada SDG Goal 1, dengan mengatasi kemiskinan multidimensi.

Pemerintah provinsi, melalui Bappeda dan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) memberikan kepemimpinan keseluruhan untuk program tersebut. Untuk memastikan penargetan yang tepat, Bappeda mengembangkan daftar penerima bantuan desa sementara, melalui konsultasi dengan dinas kesehatan provinsi, dengan menggunakan peta kemiskinan milik pemerintah sebagai dasar. Rencana

kerja dirancang untuk menjangkau desa-desa terpilih di kabupaten percontohan, dan implementasi aktual dilakukan melalui kemitraan antara Pokja AMPL dan BAZNAS di tingkat kabupaten, serta perangkat desa, sanitarian, dan puskesmas.

BAZNAS tingkat kabupaten ditugaskan untuk memverifikasi daftar penerima manfaat sementara, bekerja sama dengan otoritas lain. Verifikasi oleh dinas kesehatan kabupaten terutama terkait dengan ketersediaan fasilitas jamban di rumah tangga, sedangkan BAZNAS mempertimbangkan kriteria yang selaras dengan hukum Islam untuk memastikan kelayakan penerima. Pembangunan jamban dan perbaikan rumah diawasi bersama oleh pemerintah desa, sanitarian Puskesmas, dan kader kesehatan dan ABRI/BABINSA yang sesuai. Selama tiga tahun pertama, BAZNAS menanggung seluruh biaya pelaksanaan, memberikan kontribusi Rp 3,7 miliar (USD 253.000) pada tahun 2017, Rp 4,5 miliar (USD 307.700) pada tahun 2018 dan 2019; dan Rp 5,7 miliar (USD 360.000) pada tahun 2020.

UNICEF memberikan dukungan teknis kepada Bappeda dan Pokja AMPL serta koordinasinya dengan BAZNAS sejak tahun 2017. Advokasi kabupaten juga dilakukan untuk mendorong adopsi pembiayaan inovatif ini dan mempromosikan kesetaraan dan inklusi dalam Air Sanitasi dan Hygiene, termasuk peningkatan kapasitas untuk kelompok kerja AMPL dan pemantauan dan evaluasi program pada tahun 2018.

Pada tahap awal tahun 2017, BAZNAS Provinsi NTB berhasil merenovasi 200 unit rumah layak huni dan membangun 361 unit jamban keluarga. Selama tiga tahun pelaksanaan, intervensi telah menyelesaikan renovasi 645 rumah dan pembangunan lebih dari 880 fasilitas jamban di 36 desa. Secara keseluruhan, intervensi telah memberi manfaat bagi lebih dari 7.700 penduduk. Di setiap kabupaten sasaran, intervensi dilakukan di desa-desa terpilih, sedangkan kegiatan kampanye dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dari desa-desa non percontohan dengan

menggunakan sumber daya mereka sendiri. Lokasi proyek terus berkembang dari enam desa di enam kabupaten menjadi 10 desa di 10 kabupaten.

Di provinsi, mereka termasuk Dinas Kesehatan Provinsi, Pokja AMPL, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di kabupaten, diupayakan kemitraan antara dinas kesehatan kabupaten, BAZNAS, Bappeda, dan Pokja AMPL. Untuk memperkuat koordinasi, BAZNAS dimasukkan dalam kelompok kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL). Pada tahap implementasi melibatkan pemangku kepentingan di tingkat bawah, seperti pemerintah desa, sanitarian, dan puskesmas.

Faktor pendukung utama di balik keberhasilan implementasi adalah kelancaran koordinasi antara pemerintah tuan rumah dan BAZNAS sebagai donor. Surat Edaran Gubernur NTB meletakkan dasar yang kuat untuk implementasi dan replikasi. Pemerintah provinsi dan BAZNAS secara aktif berbagi praktik yang baik, yang mengarah pada adopsi di desa-desa non-percontohan. Pedoman teknis disusun dan disebarluaskan kepada pemangku kepentingan lokal dengan melibatkan panelis dari kementerian utama dan BAZNAS Nasional serta mensosialisasikan instrumen Indeks BAZNAS untuk keberlanjutan Air Bersih dan Sanitasi. Kendala utama termasuk kontribusi keuangan pemerintah yang terbatas.

Pada tahun 2020, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat edaran yang meminta pemerintah kabupaten untuk mereplikasi program dengan menggunakan pendekatan inovasi pembiayaan serupa. Untuk mendukung komitmen tersebut, Pokja AMPL NTB dengan dukungan kerjasama UNICEF dan Mitra Samya melakukan penyusunan dokumen petunjuk teknis pelaksanaan program BAZNAS BASNO, Air Bersih dan Sanitasi Aman yang disebarluaskan di 10 kabupaten/kota serta sosialisasi instrument Indeks BAZNAS untuk keberlanjutan Air

Bersih dan Sanitasi/ BAZNAS Index for Sustainable Water and Sanitation (BI-WAS) kepada BAZNAS kabupaten/kota. Pemerintah Mataram, Sumbawa, Lombok Utara, dan Lombok Barat merespon telah memulai upaya replikasi.

Pada tahun 2021, direncanakan melakukan mekanisme blended financing diciptakan bersama untuk meningkatkan jumlah mitra non-pemerintah dan lembaga keuangan mikro lainnya, yang akan diujicobakan di kabupaten Lombok Timur.

Bappeda dan BAZNAS NTB aktif berbagi pengalaman di berbagai acara, antara lain The Advocacy Horizontal Learning di Provinsi Sulawesi Selatan. BAZNAS kabupaten dan organisasi amal lainnya didorong untuk mereplikasi dan menyelaraskan dengan program pemerintah tentang pengurangan stunting, dan bantuan sosial dana desa untuk mencapai status ODF. NTB diakui sebagai tempat pembelajaran daerah dari provinsi lain tentang keberhasilan pelaksanaan Dana BAZNAS untuk sanitasi.

Pada masa Covid-19 saat pelaksanaan dana BAZNAS untuk percepatan ODF, misalnya kegiatan verifikasi data di lapangan Tim BAZNAS, Tim Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Tim Sanitarian di kecamatan setempat bersama aparat desa, tetap melaksanakan kegiatan ini dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Semoga dengan adanya inovasi pembiayaan ZISWAF BAZNAS ini bisa mempercepat pencapaian BASNO menuju Sanitasi Aman di Provinsi NTB dan menjadi pembelajaran serta pengalaman baik bagi penggiat sanitasi lainnya.

2. MENDALAMI SANITASI, MEMAHAMI 5 PILAR STBM PENGALAMAN PELATIHAN 5 PILAR STBM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Gerakan sanitasi dan perubahan perilaku hidup bersih sehat di Kabupaten Sumbawa Barat memang berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya di NTB. Dapat dikatakan bahwa KSB menjadi pionir karena sejak akhir tahun 2017, warga masyarakatnya sudah terbebas dari kebiasaan BABS dan sudah mendeklarasikan sebagai Kabupaten yang SBS/ODF (Pilar 1 STBM). Gerakan KSB tidak berhenti sebagai peraih predikat SBS (capaian pilar 1 STBM yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan). Tetapi gerakan pencapaian predikat untuk PHBS dari pilar ke pilar dalam STBM terus digencarkan. Hingga Sept. 2020 KSB berhasil kembali mendeklarasikan capaian Pilar 2 (Cuci Tangan Pakai Sabun atau CTPS) dan Pilar 3 (Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga-PAMM-RT). Semangat dan komitmen politik 100 hari pertama kerja Bupati dan Wakil Bupati menjadi pemicu gerakan tersebut. Pilar 4 (Pengamanan Sampah Rumah Tangga) dan Pilar 5 (Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga) menjadi agenda berikutnya yang akan dituntaskan di wilayah KSB. Secara khusus penanganan sampah rumah tangga sudah dimulai sejak awal 2019 dengan gerakan bersih-bersih sampah, dimulai dari aliran dan bantaran sungai di dalam kota Taliwang serta Fasilitas umum.

Untuk membekali secara utuh pendekatan STBM dengan 5 pilar, maka parapihak dan pelaku dari Desa/Kelurahan hingga tingkat Kabupaten dilatih STBM dengan 5 Pilar-nya menuju Total Sanitasi dan Sanitasi Aman. Pesertanya sebanyak 75 orang dari unsur DPUPRPP, Bappeda, Pendamping Pokja AMPL, DPMD, PDPGR, UPTD/PKM/Puskesmas, DLH, Dikes, Kantor Camat, TP PKK. Pengelolaan pelatihan dibagi dalam 2 kelas dan diselenggarakan selama 6 hari.

Selama 6 hari adalah menjadi waktu yang tepat selain mendalami 5 pilar melalui latihan di kelas dan praktik lapangan, juga sebagai tempat untuk menyampaikan pesan khusus tentang banyak hal yang berkaitan dengan WASH oleh berbagai pihak.

Pelatihan 5 pilar STBM ini menggunakan variasi metode yang cukup kaya seperti; Pre dan Post Test untuk menguji peningkatan pemahaman peserta, Bina Suasana untuk membangun dinamika proses, BLC untuk memastikan komitmen di awal proses belajar dan suasana friendly terbangun, Film sebagai media belajar 4 dimensi, Diskusi untuk kecerdasan pikiran, Simulasi untuk mencoba mengalami, Penugasan individu dan kelompok untuk membangun hubungan antar peserta serta pengambilan keputusan, Yel-yel untuk tetap menyemangati dinamika yang sudah terbangun, Aturan Main belajar mengajar untuk mengatur dan menetapkan batasan-batasan apa yang boleh dan apa yang harus dihindari, Ice breaking untuk menghancurkan kebuntuan kelas, tim learning untuk membangun mekanisme belajar dalam kelompok, Praktik Lapangan-Pemicuan untuk memberikan kesempatan peserta mengalami secara langsung, Umpan balik untuk membantu pemahaman dari sisi lain dan keseluruhan proses dipandu dan dikawal seorang MoT dari Bapelkes Mataram.

**PESAN PENTING PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA BARAT(BUPATI, POKJA AMPL,
KEPALA DINAS KESEHATAN).**

Terkait dengan kebijakan pemerintah KSB, maka komitmen kita melaksanakan STBM melalui Peraturan Bupati 20 tahun 2019. Ketika komitmen Bupati untuk melaksanakan STBM kemudian menuntaskan pilar 4 dan 5, ini artinya komitmen pemerintah daerah. Kita tidak cukup dengan pilar 1.2.3, kita masih memiliki PR besar yaitu pilar 4 dan pilar 5 STBM dan ini akan kita tuntaskan di tahun 2021. Kita tidak bekerja sendiri, ada keterlibatan Sanitarian, Agen-agen PDPGR, pemerintah Desa maupun tingkat kecamatan, sebagai kekuatan untuk mampu meningkatkan sanitasi. Tahun 2021 KSB sedang menggodok regulasi untuk merevisi Perda no 03/2016 tentang pemberdayaan gotong royong.

Dalam perda PDPGR ini ada instrument penggerak yang masuk dalam penanganan program STBM. Kami berharap perda tentang PDPGR akan diupayakan melalui tenaga kesehatan, para Sanitarian, agen PDPGR, Babinsa dan BABINKAMTIB, bersama-sama ikut gotong royong.

Regulasi yang digagas kembali berkaitan dengan program STBM ini akan berdata, sehingga diperlukan instrument untuk bergerak dalam menuntaskan 5 pilar ini serta betul-betul berdaya secara Ekonomi dan Social. Regulasi ini untuk memperkuat pilar-pilar yang sudah dideklarasikan di KSB ini, sehingga ke 5 pilar akan berjalan konsisten dan kuat.

Atas raihan KSB untuk berbagai predikat dalam konteks PHBS tersebut maka pada 20 Okt. 2020, Bupati KSB ditetapkan sebagai Kepala Daerah terbaik dan masuk dalam 56 Kepala Daerah lainnya.

Peserta dalam pelatihan 5 pilar ini adalah para aktifis lingkungan, aktifis kesehatan dan bagian dari masyarakat. Dengan pelatihan ini diharapkan mendapatkan out put dan merunutkan terkait dengan STBM. STBM di KSB sudah tidak asing, dari tingkat pliuik, desa. Ketika kita menyampaikan ke masyarakat, sudah bisa ditangkap STBM itu apa?. STBM di KSB menjadi bagian dari prilaku hidup bersih dan sehat. Dengan Komitmen

Dinas Kesehatan, banyak menciptakan lingkungan kita bersih sehat. Inilah dasar-dasar sehingga KSB mengangkat STBM. KSB punya cerita yang unik, kenapa kita meraih pilar 1 (Stop BABS)?. Uniknya: Pertama: KSB memulai dengan program jambanisasi, saat itu belum mengenal STBM itu apa?. Pada 17-2-2016, saat Bupati KSB dilantik di Mataram, Beliau ditanya oleh wartawan, Apa program 100 hari Bapak?. Kedua: Pernah bertemu dengan tokoh di Semarang yang menginspirasi, kemudian membantu warganya dengan Program rumah layak jamban. Tingkat kemiskinan masyarakat KSB waktu itu masih tinggi (15,7%). Ketika melihat SDG's Poin 6, itu adalah salah satu target. Untuk KSB bisa tekan angka kemiskinan, salah satunya menyangkut dengan sanitasi.

KSB membantu masyarakat menyelesaikan sanitasinya dan rumah layak jambannya, CARANYA: membuat rilis bahwa 100 hari Bupati Sumbawa Barat akan menuntaskan rumah warga layak jamban. KSB perlu melahirkan Perda PDPGR, yang mengatur tentang STBM (2016). Bagaimana caranya agar agen PDPGR

yang belum di lembagakan tetapi ditugaskan kembali untuk melakukan pendataan warga yang tidak memiliki jamban. Sementara warga yang punya jamban kita tinggalkan dulu. Yang betul-betul belum punya jamban saat itu didata, sehingga didapatkan data akumulasi secara total. Ada 6.227 warga yang sama sekali tidak memiliki jamban. Dalam 100 hari bekerja dalam memenuhi jamban bagi warga, 6.227 kemudian jamban layak dipenuhi. Itulah yang disebut jambanisasi 100 hari pemerintahan terpilih waktu itu.

Pada 2017, diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk mengajukan, peningkatan kualitas jamban. Ada 18.600 bantuan septick tank yang diberikan kepada pemerintah KSB dan 100% tuntas dilaksanakan. Pemerintah pusat melihat bahwa KSB sungguh-sungguh dalam urusan menuntaskan sanitasinya. Dinas Kesehatan mencoba mengangkat kembali kemampuan KSB dalam menuntaskan komitmen buang air besar sembarangan nol (BASNO), ditambah dengan program BASNO (TUBABAS) yang sinergi.

Dengan keberadaan jambanisasi, ikut serta mendongkrak kualitas gerakan BASNO atau program Tubabas yang sudah dicanangkan di provinsi NTB. Tim verifikasi hadir dari Kementerian untuk memverifikasi di Sumbawa Barat. Pada tahun 2018 dari 23 daerah di seluruh Indonesia, KSB terpilih menjadi kabupaten ODF pertama di NTB, yang menuntaskan pilar 1. Komitmen Bupati KSB selanjutnya harus menuntaskan secara perlahan, menuju ke pilar 2.3.4 dan pilar 5. Prosedur dan strateginya dilakukan secara benar dengan arahan kementerian kesehatan, melibatkan semua pihak.

Verifikasi dilakukan dari tingkat RT dan kemudian desa, melibatkan masyarakat ditingkat bawah. Arahan yang menjadi komitmen bersama ini adalah menuntaskan 5 pilar STBM sebagai perilaku Total Sanitasi untuk selanjutnya menuju Sanitasi Aman.

Khusus pilar-2 dengan Program Pengelolaan sampah melalui Zero Waste, dilakukan dengan; 1) Pemilahan/pemeliharaan sampah organik; 2) Pelatihan pada masyarakat dalam komposting (alat sederhana) dan pemanfaatannya; 3) Kerja sama dengan penjual bunga, hotel dan dinas pertanian dan perkebunan; dan 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pengelolaan sampah. Walaupun kendala lama masih saja ada seperti: Masyarakat terbiasa dengan subsidi, pendekatan yang berbeda setiap program (kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat untuk perubahan perilaku dan berbeda dengan PNPM dan PU) serta kendala lain adalah sistem money data dan pelaporan yang belum pernah tuntas.

Kepentingan menuntaskan 5 pilar STBM ini, karena ada penyakit yang sangat berpengaruh terutama masalah gizi (stunting). Beberapa jenis penyakit karena sanitasi dan lingkungan yang buruk pada 3 tahun terakhir sudah sangat menurun secara signifikan, seperti sakit diare dan disentry sebagai dampak predikat SBS/ODF. Berbicara stunting 30% stunting itu dipengaruhi oleh kesehatan lingkungan. Angka 30% bukan angka kecil karena dari 100 anak ada 30 yang stunting. Maka dari itu dengan semangat gotong royong kita yakin pertengahan 2021 bisa deklarasi pilar 4 dan 5 serta mampu membuktikan bahwa STBM betul-betul punya kontribusi pada penurunan angka stunting di KSB.

Semangat, antusias dan keseriusan peserta dalam sharing pembelajaran nampak kelihatan khususnya dari Petugas Puskesmas dengan komentar dan pendapatnya. Seperti yang disampaikan **Ibu Neni Iriani (Puskesmas Seteluk)**: *“Memberi itu adalah: karena ada keikhlasan dan membagi itu adalah seperti ada yang memang harus di bagi masing-masing sesuai dengan tupoksinya”*. Disisi lain, dengan semangatnya nampak karena sebagian peserta pelatihan sudah pernah memicu wilayah kerjanya, sehingga masih menjadi pertanyaan, seperti yang sampaikan **Ibu Haryani Partuti (Puskesmas Jereweh)**: *“Pengalaman di Jereweh di awal kita dikasi melakukan pemucuan, terbentuklah usaha sanitasi, yang kami kelola dan ada satu pekerja, ada perubahan yang pernah kita buat sanitasinya dan bahkan sampai bekerja di wilayah puskesmas lain. Apabila kita sudah melakukan pemucuan di wilayah kita, dari Pra dan Pasca Pemucuan, “Apakah kita bisa mengulangi lagi dengan melakukan pemucuan selain monitoring?”*. Ibu Haryani ingin mendapatkan ketegasan dari Nara Sumber. Komentar peserta juga berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah yang dikaitkan dengan kondisi geografis di wilayah kerjanya. Hal itu seperti yang disampaikan Ibu Yani *“Bagaimana ketika ada masyarakat mau membuat atau pemasangan IPAL tetapi terkendala dengan tidak ada lahan tempat membangun?”*. Bahkan proses sharing pengalaman yang difasilitasi selama proses pembelajaran, telah membuat peserta merasa dihargai. Sebagai contoh sharing dari **Ibu Yuainiatul Faizah (Puskesmas Brang Rea)** berikut: *“Belajar dari pengalaman pemucuan, kalau kita gunakan system masyarakatnya, seperti yang dilakukan di Desa Bra, Sanitarian memicu Kepala Desanya terlebih dahulu, baru kemudian Pak Kadus dan Pak RT, jadi didalam kami melakukan pertemuan itu, akhirnya mengerucut jadi keputusan bahwa Kepala Desa, Kadus dan Pak RT membuat SPAL terlebih dahulu, itu tujuannya memberikan contoh kepada msyarakat. Dimisalkan oleh Ibu Yuaini: Pak RT memegang 10 orang sebagai penanggung jawab untuk*

pembuatan IPAL, sekarang sudah banyak yang mengikuti walaupun bentuknya sederhana yang penting memenuhi syarat. Kasi kami gambaran seperti apa sih SPAL sederhana yang bisa dibuat agar terjangkau biayanya oleh masyarakat. Karena kendalanya memang dibiaya, takutnya ujung-ujungnya minta bantuan. Karena yang sudah kami lakukan misalkan 1 orang akan membangun SPAL, 10 orang yang sudah selesai itu yang akan membantu pengerjaannya dengan sistem saling bantu. Apakah metode pemicuan itu kami rubah seperti itu, melakukan pendekatan lewat atas dulu (Kepala Desa Contohnya)". Karena pengalamannya juga membuat Ibu Yuainiatul Faizah mampu menjelaskan terkait gambar-gambar perilaku baik dan buruk bagi kesehatan. Bahkan Ibu Yuainiatul Faizah memberikan saran produktif yang berkaitan dengan Pemicuan. *"Pada saat pemicuan kita diajak ketempat yang sudah Woooo...jadi tidak ada tantangan. Buat kami untuk memicu, alangkah baiknya kita diajak masyarakat yang perilaku masih atau belum tuntas pilar 4 dan 5 nya".* Kata Ibu Faizah panggilan dari Ibu Yuainiatul Faizah (Puskesmas Brang Rea).

Setelah praktik lapangan pemicuan pilar 4 dan 5 (yang menjadi target di KSB), maka peserta pelatihan mulai merasakan bagaimana memicu pilar-pilar STBM yaitu memicu pilar 1, 2, 3, 4 dan 5, tentu dengan tema atau topik yang berbeda-beda. Sudah tentu metode pemicuan bukanlah tujuan. Metode yang digunakan hanyalah alat bantu untuk membuat masyarakat menjadi malu dan sadar dengan perilakunya yang tidak sehat tersebut dan kesadaran akan menumbuhkan tindakan perubahan. Elemen-elemen pemicuan menjadi penting sebagai entry point untuk memperdalam perilaku masyarakat yang berkaitan dengan Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga (Pilar-4) dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (Pilar-5).

Berdasarkan proses dan hasil pelatihan 5 pilar STBM untuk mendalami sanitasi menuju Sanitasi Aman, maka Tim Pelatih berhasil membuat pembulatan hasil pembelajaran sebagai berikut:

- * ***Antara Teori dengan Lapangan.*** Ketika kita tidak mengetahui kondisi lapangan-pun, mampu menyesuaikan dengan cara dan metode. Itulah hebatnya pelatihan ini. Ternyata benar semakin banyak tempat kita memicu, semakin sulit kita melihat peluang apa yang akan kita picu. Silahkan berproses dulu sambil melihat apa yang kurang. Ternyata memang masih ada kekurangan sambil berproses sambil kita melihat apa persoalan-persoalan yang ada. Ternyata memang disitu tidak ada bak sampah, atau mungkin sampah tinggal diangkut, dan persoalan lainnya yang terkadang tidak sempat dipelajari secara teori.
- * ***Kompetisi Belajar antar Kelompok di Lapangan.*** Temuan antara kelompok (tiga dan empat) tentang masalah di lapangan yang hampir sama. Kelompok empat, ternyata mampu mencari peluang untuk memicu, selama ada yang mau berubah. Menjadi peran Kader dan petugas Puskesmas di Desa Murak untuk mengawal tindak lanjut agar lebih diperkuat dengan memberikan rekomendasi untuk desa Murak (terutama dusun Tegar). Meskipun kondisi di lapangan seperti itu, boleh dikatakan tidak ada keluhan dari peserta pelatihan.
- * ***Selalu Berfikir dan Bertindak Apresiatif.*** Proses di lapangan perlu diapresiasi, karena yang sempat dilihat dan tahu prosesnya, serta berbeda dengan apa yang diharapkan. Memang tingkat pendalamannya yang masih kurang karena alasan waktu yang singkat. Tidak mungkin langsung pemecuan untuk semua rencana yang dibahas dikelas dalam waktu beberapa jam saja. Tetapi apapun itu sudah bisa kita dapatkan, dan yang paling penting adalah catatan-catatan tetap berguna kedepannya. Harus menjadi pemikiran bersama dalam proses, tetapi ada juga bahan-bahan pemecuan yang tidak digunakan, contoh gunting dan lem, ada yang menggunakan dan

ada yang tidak. Ini hanya catatan saja bahwa dalam proses persiapan itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Dari pengalaman maka keberhasilan pemicuan nampak 75% akan kelihatan di persiapan. Artinya kalau kita betul-betul sudah siap 75% keberhasilan sudah kita raih. Kedepan diharapkan untuk praktik Pilar-4 dan 5 STBM adalah lokasi yang kondisi pilar 4 dan 5 di masyarakat belum tuntas atau masih ada persoalan tentang pengamanan sampah dan pengamanan limbah cair rumah tangga.

* ***Antusias Masyarakat dalam Pemicuan.*** Keaktifan peserta atau masyarakat dengan Fasilitator dalam proses pemicuan serta kekompakan tim pada saat proses kegiatan pemicuan menjadi kunci. Pembagian peran nampak berjalan dengan baik, semua terlibat mengisi satu sama lain. Melihat proses di lapangan, nampaknya tidak ada kesan mandeg atau kehilangan arah, walaupun kaget karena ada yang tidak mampu memicu Pilar 4 dan 5 ketika tidak mendalami persoalan di lapangan.

3. PERJUANGAN DALAM MEMBANGUN GERAKAN BASNO MENUJU SANITASI AMAN

PENGERTIAN BASNO MENUJU SANITASI AMAN

Gerakan BASNO Menuju Sanitasi Aman adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan perilaku yang hygiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dan aman dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Gerakan ini lahir karena keprihatinan dengan kondisi akses masyarakat Desa/Kelurahan terhadap sanitasi NTB yang tidak bertambah secara signifikan dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir dan masih jauh dari akses sanitasi aman.

Pemerintah Provinsi NTB mengindikasikan bahwa target tujuan pembangunan SDG's untuk sanitasi sebagai suatu sasaran yang memerlukan perhatian khusus karena tidak berada pada jalur yang benar. Gerakan BASNO Menuju Sanitasi Aman sangat relevan dengan tujuan STBM Nasional. Adapun tujuan gerakan BASNO Menuju Sanitasi Aman adalah:

- * Meningkatkan martabat kemanusiaan melalui penerapan nilai-nilai keagamaan khususnya dalam bidang “menutup aurat” dan “bersuci”
- * Menurunkan angka kemiskinan dan malnutrisi/kelaparan (gizi kurang dan gizi buruk) dari berbagai hal yang diakibatkan oleh penyakit berbasis lingkungan.
- * Menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan terutama diare, ISPA yang secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan angka kematian.
- * Mencegah dan menurunkan angka *stunting* (anak kerdil).
- * Mencegah dan menanggulangi risiko pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan maupun sumber daya air yang bersumber dari air limbah domestik yang tidak dikelola dan diolah secara aman.
- * Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan system pengelolaan air limbah domestik yang aman.

Sedangkan manfaat gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman akan berimplikasi luas dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diantaranya adalah:

- * Merubah kesadaran masyarakat terhadap perilakunya untuk tidak BABS,
- * Berkurangnya angka kecacangan pada anak sehingga produktifitas serta prestasi belajar dapat meningkat,

- * Lingkungan menjadi lebih bersih dari pencemaran yang diakibatkan oleh tinja manusia,
- * Prevalensi penyakit berbasis lingkungan menjadi menurun signifikan yang pada gilirannya dapat menurunkan angka kematian bayi dan balita, angka kematian ibu melahirkan, prevalensi gizi buruk, dan stunting (pertumbuhan badan tidak optimal).
- * Meminimalkan anggaran pemerintah karena mengandalkan partisipasi dan perubahan perilaku masyarakat membangun jamban swadaya.
- * Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pengeluaran masyarakat untuk biaya kesehatan karena sakit berkurang.

PROSES PANJANG PENYUSUNAN DOKUMEN ROADMAP BASNO MENUJU SANITASI AMAN

Membangun gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman penuh perjuangan. Perjuangan karena harus mengajak parapihak untuk berpikir hal yang sama yaitu menuju kebiasaan BAB sembarangan nol, atau seluruh warga masyarakat NTB tidak lagi membuang kotoran tinja di tempat terbuka atau sembarangan termasuk pembuangan Limbah Tinja dari Penampungan setelah dari Septik Tank. Perdebatan mulai nampak ketika berbicara tentang “**data**”. Terbukti pada pertemuan pertama tanggal 5 Februari 2020 di kantor Bappeda Provinsi NTB, hadir sebanyak 16 orang dari unsur Pokja AMPL NTB (Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, Dinas LH dan Kehutanan, Baznas NTB, Dinas PMD, Faskab SMS, UNICEF) berdiskusi tentang data *baseline*. Semua pihak mempunyai data tetapi dari sumber yang berbeda (Web STBM, Bappenas, Susenas, BPS, PUPR, dan lainnya). Tetapi akhirnya disepakati bahwa “yang penting konsisten dan datanya lengkap”. Kesepakatan tersebut membantu proses diskusi dan penulisan narasi selanjutnya sampai akhirnya dilakukan

konsultasi publik (4 Agustus 2020), yang diselenggarakan secara virtual dan diseminasi pada tingkat Pokja AMPL Provinsi NTB melalui rapat koordinasi finalisasi dokumen roadmap BASNO pada 10 November 2020. Selama 9 bulan proses penyusunan dokumen roadmap BASNO menuju sanitasi aman juga menjadi bukti bahwa gerakan BASNO menuju sanitasi aman adalah sebuah perjuangan karena juga harus berhadapan dengan situasi PANDEMI Covid 19. Penerapan Protokol Kesehatan tetap menjadi kunci dalam proses pembahasan yang berkepanjangan.

Pembahasan mendalam yang juga mewarnai proses ini adalah tentang batasan Sanitasi Aman serta strategi bagaimana mencapainya, karena di NTB belum banyak pengalaman yang dapat diceritakan dalam dokumen. Atau cerita yang dapat dibangun karena ada personal dari Balai PPW (Prasarana Permukiman Wilayah) NTB yang memahami konteks sanitasi layak dan sanitasi aman.

Mebutuhkan 4-5 kali pertemuan khusus Tim Penyusun untuk finalisasi Draft Roadmap BASNO. Namun demikian pertemuan bersama (tatap muka) yang direncanakan baik di kantor Mitra Samya, Kantor Dinas Kesehatan Prov NTB, Kantor Bappeda, warung kopi dan berbagai tempat lainnya tidak semua dapat terlaksana dengan baik karena wabah COVID-19. Karena Pandemi COVID-19 mewajibkan melakukan protokol kesehatan dengan jaga jarak, sehingga pertemuan diskusi dan konsultasi lebih banyak dilakukan secara virtual, walaupun sebagian anggota tim penyusun yang ada di Kota Mataram bisa berkumpul dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan. Perjuangan panjang merumuskan roadmap BASNO Menuju Sanitasi Aman ini membuktikan bahwa komitmen parapihak tetap untuk sebuah perubahan menjadi BASNO menuju Sanitasi Aman 2023.

BATASAN-BATASAN MENDASAR TENTANG BASNO MENUJU SANITASI AMAN

Beberapa batasan dan pengertian mendasar dalam konteks BASNO Menuju Sanitasi Aman berhasil dirumuskan yaitu;

- * **Sanitasi Total** adalah kondisi ketika suatu komunitas; tidak buang air besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
- * **Sanitasi Dasar** adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah, dan limbah rumah tangga.
- * **Akses Sanitasi Layak** ialah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Syarat itu di antaranya kloset mesti menggunakan leher angsa. Tempat pengolahan setempat tinja harus menggunakan tangki septik kedap dan dilengkapi unit pengolahan lanjutan untuk wilayah perkotaan atau kloset dengan leher angsa dilengkapi lubang penampungan pada bagian bawah untuk wilayah perdesaan.
- * **Akses Sanitasi Aman** adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank atau tangki septik, atau terhubung dengan system perpipaan yang diolah melalui IPALD. Akses sanitasi yang masuk kategori aman ini umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan lumpur tinja diolah lebih lanjut ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja atau IPLT dan merupakan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).

Proses merumuskan batasan tersebut sangat penting dan mampu membangun kesadaran parapihak yang selama ini kurang perhatian tentang Sanitasi Aman. Rujukan regulasi untuk memastikan beberapa

pengertian menjadi kunci. Seperti yang dikatakan pak Samsul (Balai PPW-NTB); *“Sanitasi aman menurut permen PUPR no.4 tahun 2017 untuk pusat sarana dan prasarana system komunal itu ada 10 ke atas dan kalau ada di bawah 10 itu masih system biasa. Sebenarnya secara teknis yang dikatakan tidak perlu disedot dengan system erbc, 2–10 KK harus disedot dan dibawa IPLT. Yang teridentifikasi data IPLT-nya sudah berfungsi baru ada di kota Mataram, KSB dan Kota Bima”*. Pak Yayat dari UNICEF juga memperkuat pendapat pak Samsul dengan berucap; *“Melengkapi tadi yang disampaikan pak Samsul mengenai pembuangan ke IPLT seperti di Lombok Timur sudah disedot tapi tidak dibuang ke IPLT. Kalau di NTB berdasarkan dari Bappenas akses aman 4,68%, BABS terselubung 3,34%, BABS 17,32%”*. Sementara fakta-fakta saat ini sesuai Web STBM Kemenkes, maka Pak Rizal Smith (Dinas Kesehatan NTB) mengatakan; *“Untuk saat kita masih berkontek dengan jamban sehat permanen dan jamban sehat semi permanen dan ini proses akan tertuang dalam roadmap, dan ada salah satu prosesnya adalah IPAL. Untuk jamban aman diwajibkan diperkotaan dan untuk diperdesaan masih boleh dia tidak aman dan perlu kita samakan pandangan adalah sesuai RPJM provinsi, kabupaten/kota”*.

TIGA KOMPONEN/STRATEGI PENDEKATAN STBM YANG BERSINERGI

Dalam konteks implementasi pendekatan STBM dengan strateginya dan dikaitkan dengan Sanitasi Aman harus menggunakan 3 strategi/komponen yang saling mendukung. Alasannya dapat diilustrasikan sebagai berikut: misalnya pemicuan di masyarakat terus digalakkan tetapi secara politik regulasinya kurang mendukung dan tidak ada legal formalnya, maka pemicuan tidak akan memberikan dampak perubahan yang signifikan. Kemudian dipicu berkali-kali tentang jamban murah,

tetapi disisi lain supplier-nya tidak menyediakan pilihan-pilihan jamban yang memadai, dan akhirnya masyarakat masih ke kali/sungai karena belum tersedia jamban dengan harga terjangkau. Ketika dipicu masyarakat bertanya apakah ada jamban yang murah dan memadai bagi masyarakat yang miskin serta rumahnya tidak layak huni?. Sesuai Permenkes No 3/2014 tentang STBM, pendekatan dalam penyelenggaraannya menggunakan strategi utama meliputi 3 (tiga) komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain yaitu; (1) penciptaan lingkungan yang kondusif, (2) peningkatan kebutuhan sanitasi, dan (3) peningkatan penyediaan akses sanitasi. Apabila salah satu dari strategi/komponen STBM tersebut tidak ada maka proses pencapaian perubahan perilaku hidup bersih dan sehat tidak akan maksimal.

GAP SEBAGAI UKURAN KINERJA YANG HARUS DIKEJAR

Sebagai metoda, analisa gap digunakan untuk alat evaluasi kinerja yang menitikberatkan pada kesenjangan kinerja gerakan BASNO saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Dalam jangka pendek, analisis Gap adalah proses yang digunakan Tim Penyusun Roadmap BASNO untuk membandingkan kinerja aktual versus kinerja yang diharapkan. Tim Penyusun Roadmap BASNO mendapat banyak keuntungan dari ini, terlepas dari apakah Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memenuhi harapan atau menggunakan sumber dayanya dengan baik. Tentu banyak sekali tantangan yang harus dihadapi kedepan hingga 2023 menuju Sanitasi Aman.

Berdasarkan kondisi dan capaian gerakan BASNO serta Sanitasi Aman melalui STBM di NTB hingga 2019 jika dibandingkan dengan target nasional serta target-target dalam RPJMD, maka gap yang masih tertinggal hingga 2023 adalah seperti berikut:

ITEM	Baseline 2019	Target BASNO 2023	JUMLAH/ GAP
Desa/Kelurahan belum dipicu Tingkat Provinsi	1.125 (99 %)	1.137 (100 %)	12 (1 %)
1.1. Kabupaten Dompu	59 (85,5 %)	69 (100 %)	10 (14,5 %)
1.2. Kabupaten Sumbawa	164 (98,8 %)	166 (100 %)	2 (1,2 %)
Desa/Kelurahan belum BASNO/SBS	543 (47,8 %)	1.137 (100 %)	594 (52,2 %)
<ul style="list-style-type: none"> Akses KK ke Jamban sehat/layak Amanat pusat untuk NTB di tahun 2024: 84%. 	78,80 %	84 %	5,20 %
<ul style="list-style-type: none"> Akses Sanitasi Aman Amanat pusat untuk NTB di Tahun 2024: 11%. 	4,29 %	11 %	6,71 %.

Sumber: Dokumen Roadmap BASNO Menuju Sanitasi Aman 2020-2023

Kalau merujuk pada target seperti dalam RPJMN 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka Sanitasi Layak harus mencapai 90% dan 15% diantaranya adalah Sanitasi Aman. Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Gerakan Buang Besar Sembarangan Nol (BASNO), belum menetapkan target dalam konteks Sanitasi Aman. Sementara Pemerintah Pusat telah menetapkan target layanan sanitasi layak Provinsi NTB hingga tahun 2025 sebesar 84%, dengan 11% diantaranya target sanitasi aman. Berdasarkan data Bappenas yang bersumber dari hasil Susenas BPS pada tahun 2018, sanitasi layak Provinsi NTB mencapai 75,66% dan meningkat menjadi 90,18% pada tahun 2019 (Statistik Kesra NTB 2019). Sedangkan angka sanitasi aman Provinsi NTB pada tahun 2018 baru mencapai 4,68% (SUSENAS KOR BPS, diolah oleh Bappenas), sehingga masih ada gap sebesar 6,32% atau 6,71% (sesuai dokumen Roadmap BASNO 2020-2023).

Pemerintah Provinsi serta Kabupaten-Kota di NTB terus berupaya meningkatkan layanan air bersih, sanitasi dan hygiene. Ini ditunjukkan

dengan adanya 1 kabupaten yang telah ODF dan beberapa Kabupaten/Kota akses sanitasinya sudah diatas 80%.

Komitmen Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota melalui POKJA AMPL sedang diuji untuk mengejar gap sampai menuju Sanitasi Aman 2023. Maka dari itu, optimalisasi berbagai sumberdaya termasuk dana sedang digalakkan bersama. Dalam kerangka pencapaian ODF/SBS di seluruh Kabupaten Kota untuk ODF tingkat Provinsi NTB tercapai, maka Pemerintah Provinsi NTB mengembangkan berbagai inovasi dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk percepatannya. Roadmap diniatkan sebagai pijakan bersama parapihak yang berkompeten dalam membangun sanitasi menuju sanitasi aman 2023.

Dari proses yang dibangun Tim Penyusun bersama parapihak, banyak pembelajaran yang dapat diambil yaitu:

- * Mengikutsertakan lebih banyak **parapihak** dalam menyusun, konsultasi dan mereview roadmap, maka menghasikan dokumen roadmap yang lengkap, berkualitas dan semua pihak merasa memiliki dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tindakan menuju Sanitasi Aman 2023. Proses penyusunan roadmap BASNO menuju sanitasi aman melibatkan multisektor yang diampu oleh POKJA AMPL Provinsi NTB. Seluruh informasi di cross check oleh parapihak melalui konsultasi dan diskusi baik offline maupun secara virtual.
- * **Situasi pandemi COVID-19** telah menciptakan inisiatif dan inovasi cerdas dalam menindaklanjuti proses pengembangan roadmap dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan, melibatkan parapihak dan mengikuti alur proses, walaupun berimplikasi pada proses adaptasi dan waktu yang lebih lama. Pandemi COVID-19 tidak dijadikan hambatan, tetapi menjadi pembuka ide untuk membangun proses lebih inovatif. Beberapa pertemuan dalam skala kecil tetap dilakukan offline dengan tetap menjaga jarak,

menggunakan masker dan mencuci tangan. Tetapi pertemuan skala besar seperti konsultasi publik dan rakor Pokja AMPL, menggunakan metode kombinasi antara virtual dengan offline.

- * Pembahasan tentang Situasi/Kondisi, Target dan Strategi menuju Sanitasi Aman membutuhkan pemahaman tentang **batasan, tangga dan indikator** serta target mendasarkan amanat pusat untuk NTB 11% di tahun 2024 dan Sanitasi Layak 2024 mencapai 84 %. Untuk penetapan di NTB membutuhkan perhitungan distribusi target di setiap Kabupaten/Kota termasuk alokasi sumberdaya yang memadai. Keterlibatan POKJA AMPL Kabupaten/Kota tetap diupayakan. Pihak Tim Penyusun mengirimkan format isian Kabupaten/Kota melalui Pendamping Pokja AMPL di Kabupaten/Kota. Data isian tersebutlah yang menjadi acuan bagaimana setiap Kabupaten/Kota akan mewujudkan BASNO dengan pilihan kegiatannya masing-masing.
- * Mekanisme pengelolaan gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman dilakukan secara **terpadu** melalui Pemberdayaan masyarakat, Pelibatan semua pihak, Pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan M/E, maka menciptakan konsolidasi program yang kuat serta mem-percepat pencapaian SBS/BASNO dan Sanitasi Aman 2023. Daftar kegiatan yang disusun dalam roadmap, memberi peluang setiap pihak untuk memilih jenis kegiatan sesuai kewenangan dan potensinya. Kegiatan tersebut sudah merepresentasikan dan menter-jemahkan **4 komponen atau strategi (3 komponen STBM dan 1 Sanitasi Aman)** yaitu :
1). penciptaan lingkungan yang kondusif dan mendukung, (2) meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap sarana sanitasi, (3) peningkatan penyediaan akses sarana sanitasi dan (4). Komponen Sanitasi Aman sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran air tanah dan lingkungan, akan menciptakan gerakan yang lebih

strategis dan terukur dalam setiap komponen menuju Sanitasi Aman 2023.

- * Peningkatan capaian dari Desa/Kelurahan dipicu pada tahun 2019 (99%) menuju Desa/Kelurahan BASNO/SBS (47,8%) memerlukan strategi yang tepat dengan menjabarkan 3 komponen STBM sesuai Permenkes RI No 3/2014 tentang STBM untuk menjawab target 2023 (100%), dengan target 1% Desa/Kelurahan belum dipicu, 52,2% Desa/Kelurahan belum BASNO/SBS dan Komponen Sanitasi Aman.
- * Menuju target yang belum dicapai sebesar 5,20% Akses Sanitasi Layak dan 6,71% Akses Sanitia Aman di tahun 2023 untuk mencapai amanat pusat (84 % Sanitasi Layak dan 11 % diantaranya Sanitasi Aman), membutuhkan kerjasama kolaborasi berbagai pihak dalam mengkonsolidasikan berbagai sumberdaya dibarengi dengan peningkatan penerapan mekanisme reward dan punishment yang lebih luas tidak sekadar SBS/BASNO, tetapi juga apresiasi terhadap tindakan inovasi dari setiap tingkatan pelaku dalam pencapaian akses sanitasi aman. Upaya parapihak ini dikoordinasikan melalui aktivasi POKJA AMPL baik di tingkat Provinsi NTB maupun di setiap Kabupaten/Kota.
- * Komitmen dan sinergitas yang terbangun antar pihak untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat baik untuk rumah yang layak di permukiman yang aman, sehat dan berkelanjutan, serta akses layanan air minum dan sanitasi serta utilitas lainnya, dijamin dengan keluarnya Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol Menuju Sanitasi Aman.

4. PENDAYAGUNAAN DANA ZIS, Mendukung Gerakan BASNO Menuju Sanitasi Aman

Sebagai tindak lanjut penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015¹, Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia), pada 1 Januari 2017 menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Pendayagunaan Harta Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dengan Program Pemerintah dalam Penyediaan Layanan Air Minum dan Sanitasi untuk Masyarakat², yang berlangsung di Jakarta.

Kesepakatan ini disambut baik oleh parapihak. Melalui serangkaian kegiatan diskusi, sosialisasi dan workshop yang difasilitasi oleh UNICEF, BAZNAS Provinsi NTB bersepakat dengan Pokja AMPL Provinsi NTB untuk mendukung Gerakan Buang Air Sembarangan Nol (BASNO) yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi NTB melalui pembangunan sarana air bersih, pembangunan sarana sanitasi dan pembangunan rumah layak huni lengkap dengan sarana sanitasinya. Pendayagunaan dana ZIS diarahkan untuk membantu mustahik di 100 desa miskin yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi.

Sejak tahun 2017, BAZNAS NTB melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) menjadi bagian dari Program BAZNAS NTB PEDULI, dan Pembangunan Jamban Keluarga (JAGA) menjadi bagian dari Program BAZNAS NTB SEHAT. Dalam rentang waktu 4 tahun (2017–2020), BAZNAS NTB telah mendistribusikan 20,61% dari total penerimaan ZIS sebesar Rp. 87.955.771.805.- untuk pembangunan 927

¹ Fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015¹ Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat

² Nomor : 01/NKB/M.PPN/01/2017; Kep – 18/MUI/I/2017; 001/MOU/BP/BAZNAS/01/2017; 001/BWI/MOU/2017

unit rumah layak huni (MAHYANI) senilai Rp. 13.905.000.000.-, dan pembangunan 1.407 unit jamban keluarga (JAGA) senilai Rp. 4.221.000.000.-. Pembangunan sarana dilaksanakan oleh tim yang dikoordinir Ketua Bidang Penyaluran ZIS BAZNAS Kabupaten. Agar pembangunan sarana sesuai dengan mekanisme/ proses yang ditetapkan dan memenuhi aspek teknis, BAZNAS Provinsi NTB bersama Pokja AMPL NTB dengan dukungan Mitra Samya dan UNICEF menyusun Panduan Teknis Pendayagunaan Dana ZIS untuk Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Aman. Beberapa pembelajaran penting dalam proses dan hasil penyusunan Panduan Teknis tersebut sebagai berikut:

1. Kolaborasi pelaku di semua tingkatan menjamin pemenuhan aspek teknis, keberlanjutan sarana dan tercatat sebagai kontribusi ZIS terhadap pencapaian gerakan BASNO menuju sanitasi aman dan pemenuhan akses air minum masyarakat.

Sebagai tindak lanjut kesepakatan antara BAZNAS NTB dengan Pokja AMPL NTB untuk mendukung Gerakan BASNO dengan dana ZIS, BAZNAS NTB secara berkala berkoordinasi dengan Bappeda Litbang NTB untuk menentukan desa sasaran sesuai kuota yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS NTB. Desa sasaran dipilih dari 100 desa miskin yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi NTB. BAZNAS Provinsi kemudian menugaskan BAZNAS Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan pembangunan di desa-desa yang ditunjuk oleh Bappeda Provinsi. Ditingkat Kabupaten/Kota, BAZNAS melakukan koordinasi dengan Bappeda Litbang Kabupaten/Kota untuk menginformasikan rencana dan desa lokasi pembangunan yang didukung oleh BAZNAS NTB. Selain itu juga untuk mengkonfirmasi data calon mustahik dari data warga miskin pada Basis Data Terpadu (BDT) di tingkat Kabupaten/Kota, kemudian dilakukan verifikasi di tingkat desa. Pelaksanaan pembangunan dipercayakan kepada tim desa yang

terdiri dari Kepala Desa, 1 orang staf desa, BABINSA, tukang serta mustahik dan keluarganya.

Selain penentuan desa sasaran, BAZNAS NTB dan Bappeda Litbang NTB juga melakukan monitoring dan evaluasi bersama di lapangan. Tim monev menemukan jika pembangunan rumah layak huni menunjukkan capaian yang membanggakan. Kontribusi mustahik dan keluarganya serta masyarakat sekitar cukup besar sehingga sebagian besar rumah layak huni yang dibangun melebihi standar minimal yang ditetapkan oleh BAZNAS.

Berbeda dengan pembangunan rumah layak huni, tim monev menemukan cukup banyak sarana JAGA yang dibangun, belum layak dan belum memenuhi standar teknis. Bangunan sarana yang sempit dan/atau akses masuk dan keluar sarana yang tidak memadai serta konstruksi bangunan yang cukup membahayakan pengguna sarana. Temuan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan refleksi seperti: *apakah mustahik merasa nyaman menggunakan sarana jamban ini? Jika tidak maka akan berdampak pada keberlanjutan sarana; apakah bangunan penampung air limbah domestiknya sudah memenuhi standar teknis?.* Pertanyaan lainnya adalah, *apakah sarana JAGA yang dibangun dengan dukungan dana ZIS sudah tercatat dalam data Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau data SIM STBM sehingga tujuan BAZNAS NTB berkontribusi terhadap gerakan BASNO tercapai?.*

Monev bersama ini menghasilkan pembelajaran bahwa diperlukan keterlibatan lebih banyak stakeholders terutama OPD teknis agar kualitas sarana yang dibangun memenuhi standar teknis, sarana yang dibangun digunakan dan dirawat serta menjadi bagian dari *database* capaian program BASNO.

Pembelajaran tersebut dituangkan dalam Panduan Teknis Pendayagunaan Dana ZIS untuk Pembangunan Sarana Air Minum

dan Sanitasi Aman. Skema kolaborasi dan peran masing-masing pihak memberikan panduan bagi pelaksana program di semua tingkatan. Di tingkat provinsi, pelibatan Pokja AMPL secara kelembagaan dimulai sejak tahapan persiapan. Rekomendasi opsi teknis dihasilkan di tingkat Kabupaten agar pilihan teknis lebih sesuai dengan kondisi setempat. Dukungan pihak Kecamatan, Puskesmas dan Koramil sebagai atasan langsung memberikan kepastian keterlibatan pelaksana di lapangan. Ditingkat desa, Kepala Desa dan BABINSA memastikan sarana dibangun sesuai prosedur, memenuhi standar teknis, sesuai jadwal dan mendorong keswadayaan masyarakat. Sanitarian berperan menyiapkan mustahik penerima manfaat untuk menggunakan dan merawat sarana, serta menginput data sarana terbangun pada data Kabupaten dan/atau data SIM STBM.

2. Informasi akses air minum dan sanitasi aman sebagai pemicu replikasi program BAZNAS–BASNO di tingkat Kabupaten untuk mendukung percepatan pencapaian gerakan BASNO menuju sanitasi aman dan pemenuhan akses air minum masyarakat di Kabupaten/Kota

Dukungan BAZNAS Provinsi NTB terhadap Gerakan BASNO dengan mengalokasikan dana ZIS untuk pembangunan sarana sanitasi dan rumah layak huni belum banyak diikuti oleh BAZNAS Kabupaten/Kota. Tercatat, replikasi hanya dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah yang mengalokasikan dana ZIS untuk pembangunan rumah layak huni dan JAGA, serta BAZNAS Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa untuk pembangunan JAGA.

BAZNAS Kabupaten/Kota lainnya berpartisipasi sebagai pelaksana pembangunan. Pemahaman bahwa pembangunan rumah layak huni dan jamban keluarga merupakan program BAZNAS Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten masih berkembang dalam pemikiran

pengurus BAZNAS Kabupaten/Kota. Bahkan ada pernyataan “*seharusnya BAZNAS Provinsi melibatkan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam penentuan desa sasaran*”. Situasi ini mengindikasikan bahwa informasi tentang BAZNAS – BASNO belum secara utuh diterima oleh BAZNAS Kabupaten/Kota.

BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat tidak melaksanakan pembangunan JAGA karena sudah ODF/SBS/BASNO Kabupaten sejak tahun 2017. Selain itu ada kesepakatan dengan Pokja AMPL Kabupaten, bahwa pembangunan sarana jamban menjadi tanggung-jawab Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Di bidang air minum, kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi NTB maupun BAZNAS Kabupaten/Kota masih bersifat karitatif, berupa distribusi air minum dengan mobil tangki serta penyediaan tandon air untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga pada musim kemarau. Pembangunan sarana penyediaan air minum yang berorientasi pada pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan belum pernah dilakukan.

Dalam Workshop Konsultasi Publik Panduan Teknis Pendayagunaan Dana ZIS untuk Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Aman pada akhir Nov. 2020 di Mataram, Pokja AMPL Provinsi menjelaskan bahwa ada pembagian tanggungjawab antara pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengentasan 500 desa/kelurahan miskin di NTB. Pemerintah provinsi bertanggung jawab mengentaskan kemiskinan di 100 desa miskin, sehingga kegiatan BAZNAS–BASNO yang dibiayai melalui dana ZIS oleh BAZNAS Provinsi dilaksanakan di 100 desa/kelurahan miskin tersebut. BAZNAS Kabupaten/Kota didorong untuk membantu pemerintah Kabupaten/Kota dengan mereplikasi program BAZNAS–BASNO di desa/kelurahan miskin yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam Panduan Teknis dijelaskan bahwa sanitasi aman tidak hanya membangun sarana jamban tetapi merupakan serangkaian aktivitas dalam sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD). Pengelolaan meliputi pembangunan sarana jamban dengan kloset leher angsa dan tempat penampungan sendiri atau komunal/terpusat yang kedap dan aman (septic tank), operasional dan pemeliharaan termasuk penyedotan lumpur tinja secara berkala (3-5 tahun sekali), serta pengolahan lumpur tinja pada instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) sehingga menjadi aman dan tidak mencemari lingkungan.

Sarana penyediaan air minum (SPAM) yang dibangun diupayakan memenuhi unsur 4K yaitu: 1) air minum harus sesuai dengan standard kesehatan (kualitas); 2) jumlah air yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan air minimum 60 liter/hari/orang (kuantitas); 3) air minum tersebut dapat diakses selama 24 jam (kontinuitas); dan 4) biaya yang harus dikeluarkan untuk iuran bulanan dan/atau pemeliharaan tidak lebih dari 4% pendapatan rumah tangga (keterjangkauan). Berbagai opsi pembangunan sarana penyediaan air minum yang dapat memenuhi unsur 4K tersebut dijabarkan dalam Buku Panduan.

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa pembangunan dan pengelolaan SPALD dan SPAM membutuhkan biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna, sehingga dana ZIS diharapkan dapat digunakan untuk membantu mustahik dalam pembangunan dan/ atau pengelolaannya. Penjelasan ini dapat menggugah dan mengubah mindset para pengelola ZIS, sehingga pada tanggal 1 Des. 2020 bertempat di Mataram, dilakukan penandatanganan Deklarasi Dukungan dalam rangka pencapaian Akses Sanitasi Layak dan Aman serta Akses Air Minum melalui pendanaan dari ZIS. Penandatanganan deklarasi oleh 10 perwakilan BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dan perwakilan LAZ DASI NTB dan LAZ BMH NTB ini disaksikan oleh Ketua BAZNAS NTB serta

Bappeda Litbang NTB. Deklarasi Dukungan ini memberi harapan baru untuk mempercepat pencapaian universal access di Provinsi NTB. Opsi Pendayagunaan ZIS yang dapat dilakukan meliputi pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum, pembangunan sarana Sanitasi Aman dan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3. Informasi dalam Panduan Teknis memberi penyadaran pengelola ZIS di NTB untuk mengembangkan program pendayagunaan dana ZIS dalam mendukung pencapaian gerakan BASNO menuju sanitasi aman dan pemenuhan akses air minum masyarakat

Pelaksanaan program BAZNAS–BASNO selama ini masih berbasis data mustahik. Artinya, manfaat kegiatan hanya dinikmati oleh mustahik dan keluarganya. Kondisi ini menunjukkan jika program BAZNAS–BASNO yang dilaksanakan oleh BAZNAS NTB masih pada tataran pendistribusian ZIS, belum pada tataran pendayagunaan ZIS. Penilaian ini disampaikan oleh narasumber BAZNAS Pusat pada Workshop Konsultasi Publik Panduan Teknis Pendayagunaan Dana ZIS untuk Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Aman pada akhir November 2020 di Mataram.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sasaran pendayagunaan dana ZIS adalah komunitas sehingga sarana yang dibangun merupakan sarana komunal. Selain itu pembangunan sarana juga disertai dengan kegiatan lain seperti program peningkatan ekonomi masyarakat agar status mustahik dapat berubah menjadi muzakki. Program tersebut dikemas dalam program *Zakat Community Development* (ZCD). Pelaksanaan ZCD juga harus melibatkan stakeholders lainnya dalam bentuk kolaborasi pelaku dan kolaborasi pendanaan. Penjelasan inii diamini oleh pengurus BAZNAS NTB dan berharap kedepan dapat melakukan pendayagunaan dana ZIS melalui program ZCD untuk mendukung gerakan BASNO menuju sanitasi aman dan pemenuhan akses air minum masyarakat.

Opsi-opsi teknis pembangunan sarana SPAM dan SPALD dalam lampiran Panduan Teknis tidak hanya untuk pembangunan sarana pribadi, tetapi juga pembangunan sarana komunal. Opsi teknis komunal ini dapat dijadikan sebagai entry point untuk pengembangan program ZCD. Terlebih lagi, saat ini kolaborasi dengan berbagai stakeholders sudah dibangun sehingga pengembangan program dapat lebih mudah untuk dilakukan.

5. PROMOSI MEMBANGUN PENGETAHUAN PERILAKU MASYARAKAT MENUJU PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA AMAN

APA URGENSINYA?

Potret akses sanitasi di Indonesia dan di NTB berdasarkan dokumen resmi target RPJMN 2020-2024 bahwa 90 % akses layak air limbah, termasuk 25% akses aman. Sementara di NTB; 84 % akses layak air limbah, termasuk 11 % akses aman. Sedangkan capaian hingga 2019 adalah 77,44 % akses layak (dengan 7,5 % akses aman), ada 8,03% akses belum layak dan 6,92% BABS tertutup serta 7,61 % BABS terbuka. Indikator pengetahuan dan pemahaman warga adalah salah satu yang menunjang mereka akan melakukan tindakan dan perlakuan menuju Sanitasi Aman.

Salah satu upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik menuju Sanitasi Aman adalah melalui kegiatan Promosi. Kegiatan promosi tentang pengelolaan air limbah domestik aman menjadi ajang penyadaran masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di 48 Desa/Kelurahan di 11 Puskesmas wilayah Kabupaten Lombok Timur dan 10 Desa/ Kelurahan di 5 Puskesmas Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dengan lebih dari 2.000 responden di kedua

kabupaten tersebut. Lebih dari 66 % responden tersebut belum pernah mendapatkan sosialisasi/ promosi/ penjelasan mengenai pengelolaan air limbah rumah tangga yang aman. Sehingga survey ini penting dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan air limbah domestik yang aman melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat maupun pemerintah daerah terkait layanan sanitasi aman.

BAGAIMANA PROSESNYA?

Kegiatan promosi dan kampanye perubahan perilaku menggunakan berbagai media audio visual terutama video. Dalam rangka menilai keberhasilan kegiatan promosi dan kampanye perubahan perilaku maka diuji dengan survey awal (*Baseline*) dan Survei Akhir (*Endline*).

Baseline Survey dimaksudkan untuk menilai pengetahuan, sikap, dan perilaku awal masyarakat terkait pengelolaan air limbah rumah tangga yang aman. Sedangkan *Endline* Survey untuk menilai pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat setelah dilakukan kegiatan promosi dan kampanye perubahan perilaku dalam jangka waktu tertentu. Dari data survey diperoleh efektifitas dan keberhasilan kegiatan *safely managed sanitation* di Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Timur.

Rangkaian kegiatan sejak survey base line, pelaksanaan promosi dan survey end line terjadi di hari yang sama dan rata-rata membutuhkan waktu antara 3 s.d 4 jam. Komitmen awal dari pemerintah setempat di sebagian besar desa/kelurahan disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah. Kemudian pelaksanaan survey base line secara online membutuhkan waktu 35-45 menit. Sedangkan pelaksanaan promosi yang diberikan oleh Sanitarian bersama Enumerator membutuhkan waktu 1 s.d. 1,5 jam dengan tahapan yang diawali penjelasan Sanitasi Aman melalui bahan tayang, penjelasan Lembar Informasi dan Penayangan Video Sanitasi dan diakhiri dengan tanya jawab. Survey End Line langsung dilakukan sesaat setelah promosi berakhir, dan membutuhkan waktu 30-40 menit.

Video yang diputar dan ditonton bersama adalah hasil karya siswa/siswi SMK yang masuk dalam nominasi. Video yang digunakan di wilayah Sumbawa adalah (Wilayah Kec. Taliwang menggunakan Video Promosi MENTARI MANEMENG, Kec. Maluk video Geng Cinta Sehat dan desa lainnya menggunakan video Jamban Sehat Masyarakat Sehat). Sedangkan video yang digunakan di wilayah Lombok Timur adalah “Jamban Kami Masa Depan Kami” oleh SMKN 1 Selong, “Bara” oleh SMAN 1 Sikur dan video “Secercah Harapan” oleh MAN 1 Lotim. Untuk mengimbangi informasi dan data pengelolaan air limbah rumah tangga, enumerator juga berkunjung ke rumah warga yang memiliki jamban. Fokus pengamatan adalah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik atau Pembuangan air kotor atau limbah tinja manusia dan lumpur tinja seperti tentang infrastruktur pelengkap di penampungan tinja/ septik tank, aliran air dari penampungan tinja, jenis pengolahan lanjutan setelah diolah di penampungan tinja, lubang akses yang digunakan untuk penyedotan lumpur tinja, dan hal teknis lainnya yang berhubungan dengan Pengelolaan Lumpur Tinja.

PENDALAMAN KUESIONER DAN UJICOBALAPANGAN

Pendalaman kuesioner oleh Enumerator dan Pendamping serta Fasilitator Kabupaten adalah bagian tahapan penting dalam kegiatan ini sebelum proses survey dan promosi dilakukan. Pendalaman dilakukan melalui training dan ujicoba penggunaan kuesioner. Tahapan penting yang terjadi dalam training ini adalah:

- * **Memahami bagian pokok Kuesioner.** Proses ini dilakukan dengan mengantarkan bahwa kuesioner dibagi menjadi 7 bagian pokok yaitu (A) Identitas wilayah, (B) Informasi umum, (C) Informasi responden, (D) Pengelolaan Air Limbah Domestik, (E) Pengelolaan Sumber Air Minum, (F) Kejadian Diare dan (G) Kegiatan promosi Kesehatan.

- * **Memahami isi dan keterkaitan antar pertanyaan.** Pemahaman isi dilakukan dengan menyampaikan keterkaitan antar pertanyaan dengan alat “jika – maka”. Peserta melihat kuesioner, kemudian TA menjelaskan alur dalam kuesioner. Misalnya dari Kelompok pertanyaan C 1-7, kemudian akan pecah menjadi (1) C8-9 dan (2) langsung ke D1. Setelah pertanyaan D1 s.d. 4 akan menjadi 2 yaitu D5 s.d. 10 dan D21 s.d. 29. Begitu seterusnya dan peserta menguji kebenaran hubungan tersebut satu persatu.
- * **Memahami pertanyaan.** Tahapan ini dilakukan dengan mengajak peserta untuk mendiskusikan satu persatu pertanyaan secara rinci. Memaknai isi dibalik pertanyaan, melihat kata yang paling sederhana dan memastikan rumusan pertanyaan menjadi sederhana dan mudah dipahami.
- * **Mencoba mengisi/simulasi melalui link online.** Simulasi oleh peserta dilakukan sebanyak 2 kali yaitu (1) Setelah memahami pertanyaan melalui diskusi kuesioner sebelumnya dan sebelum praktik ke lapangan dan (2) setelah kembali dari praktik lapangan dan IT sudah melakukan perbaikan link online pasca praktik lapangan. Dalam 2 kali simulasi, peserta diajak mencoba menggunakan link online, selain menguji tingkat kemudahan menggunakan online, juga mendokumentasikan waktu yang diperlukan untuk semua alur dari Kelompok pertanyaan A s.d. G.
- * **Memandu warga desa untuk mensimulasikan penggunaan kuesioner melalui online.** Praktik lapangan dilakukan di Desa Kuranji, Kota Mataram. Praktik dilakukan di 2 kelompok (@ 6 orang warga masyarakat).

APAKAH ADA PERUBAHAN PENGETAHUAN?

Data yang menunjukkan pemahaman responden tentang tempat penampungan tinja/ kotoran manusia atau air dari toilet/jamban/WC, sebelum dan sesudah promosi adalah seperti tabel berikut:

Tabel-1. Pemahaman Responden Tentang Tempat Penampungan Tinja/Kotoran Manusia atau air dari toilet/jamban/WC sebelum dan sesudah promosi

Kemana SEHARUSNYA tempat penampungan tinja/kotoran manusia atau air dari toilet/jamban/WC ini ditampung?		
Pilihan tempat penampuangn Tinja/ Air dari Toilet	Jawaban responden (%)	
	Sebelum Promosi	Setelah Promosi
Penampungan tangki septik kedap	50.61	80.54
Penampungan tangki tidak septik/ tidak kedap	8.53	8.58
Penampungan cubluk/lubang tanah	30.90	8.17
Langsung ke saluran drainase	1.23	0.72
Langsung Sungai /danau/pantai/laut	1.58	0.26
Langsung Kolam/sawah	0.00	0.00
Langsung Kebun/tanah lapang	0.36	0.15
Tidak Tahu	6.69	1.53
Lainnya	0.10	0.05

Sumber: Dokumen Laporan Kegiatan Survey

Sedangkan pengetahuan responden sebelum dan sesudah promosi yang berkaitan dengan kemana seharusnya lumpur tinja dibuang setelah tangki septik dikosongkan atau disedot?, nampak seperti Tabel berikut:

Tabel–2. Pengetahuan Responden sebelum dan sesudah promosi Tentang Tempat Pembuangan Lumpur Tinja setelah Tangki Septik Dikosongkan/Disedot

Apakah Ibu/Bapak tahu, kemana lumpur tinja dibuang setelah tangki septik/septitank dikosongkan/disedot ?		
Pilihan tempat penampungan lumpur tinja dari septik tank setelah dikosongkan	Jawaban responden (%)	
	Sebelum Promosi	Setelah Promosi
Ke sungai besar, sungai kecil, selokan/parit, kolam/ empang, saluran drainase	8.62	3.59
Dikubur di halaman	7.15	2.76
Dikubur di tanah orang lain	0.16	0.10
IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)	41.04	81.58
Tidak tahu	42.40	11.81
Lainnya	0.63	0.16

Sumber: Dokumen Laporan Kegiatan Survey

Jika dilihat dari waktu pengosongan atau penyedotan septik tank, maka pemahaman responden sebelum dan sesudah promosi seperti table berikut:

Tabel–3. Pengetahuan Responden sebelum dan sesudah promosi Tentang Durasi Waktu Pengosongan/Penyedotan Tangki Septik

Kapan SEHARUSNYA tangki septik/septitank dikosongkan atau disedot ?		
Pilihan Periode Waktu Pengosongan/ Penyedotan Septik Tank	Jawaban responden (%)	
	Sebelum Promosi	Setelah Promosi
1 tahun sekali	13.03	15.38
2-3 tahun sekali	15.06	35.12
4-5 tahun sekali	18.97	29.14
lebih dari 5 tahun sekali	12.28	9.92
Tidak perlu dikosongkan/disedot	6.69	1.77
Tidak tahu	33.98	8.68

Sumber: Dokumen Laporan Kegiatan Survey

Berdasarkan ke 3 tabel di atas, maka jelas ada penurunan proporsi responden dari yang tidak tahu menjadi tahu atau sebaliknya pengetahuan atau pemahaman masyarakat menjadi lebih baik setelah promosi. Seperti yang disampaikan Ibu Zakiyah salah seorang responden dari Desa Keselet, Kecamatan Sakra Lombok Timur “*setelah mendengar penjelasan, menonton video/file “**Secercah Harapan**”, maka lebih mudah dan cepat menjawab pertanyaan di HP*”. Dibuktikan dengan data bahwa waktu yang dibutuhkan untuk proses *baseline* (30-40 menit) dan pengisian *Endline* (15-20 menit). Hal tersebut mengindikasikan bahwa beberapa hal yang ditanyakan seperti dalam kuesioner menjadi lebih mudah dijawab karena sudah dapat penjelasan tentang Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga secara Aman. “*Pertanyaan di HP sesuai dengan kondisi di kampung, tetapi terkadang belum tahu mana yang benar*” lanjutnya. Antara kegiatan Survey Base Line, Promosi Kesehatan (PALD) aman dan End Line Survey jelas terkonsolidasi sejak persiapan (secara personil, substansi materi, logistik dan penyelenggaraan atau pelaksanaan di lapangan). Walaupun Ibu Zakiyah yang didampingi oleh Sanitarian Puskesmas Sakra (Baiq Yuliariza) merasa bahwa harapan tentang Sanitasi Aman adalah “ *mungkin*” itu jawaban yang diberikan. Hal tersebut disebabkan karena kondisi perilaku masyarakat di desa Keselet, 50% lebih warganya masih BAB di sungai, kebun dan sebagian kecil di sawah. Walaupun sudah ada komitmen positif dari Kepala Desa akan menggerakkan melalui arisan WC, tetapi menuju sanitasi aman, masih perlu perjuangan yang berat.

APA PEMBELAJARAN DARI KEGIATAN INI?

1. Pemahaman tentang batasan-batasan seputar Pengelolaan Air Limbah Domestik hingga Sanitasi Aman menjadi penting untuk terjun ke lapangan dalam rangka promosi. Batasan dasar yang dipahami adalah seperti dalam Box berikut :

BATASAN-BATASAN DALAM SANITASI DAN SPALD YANG AMAN

- 1) BABS Terbuka adalah Praktik buang air besar di hutan, kebun, sungai, pantai, atau ruang terbuka lainnya;
- 2) BABS Tertutup adalah Penggunaan fasilitas sanitasi yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa kolam/sawah/sungai/danau/laut atau pantai/tanah lapang/kebun;
- 3) Akses Sanitasi Belum Layak adalah praktik buang air besar pada fasilitas yang tidak menjamin terputusnya kontak antara tinja dengan manusia secara higienis, seperti lubang tanah/ cubluk di perkotaan dan fasilitas sanitasi yang tidak dilengkapi dengan leher angsa;
- 4) Akses Sanitasi Layak adalah Penggunaan fasilitas sanitasi yang sudah memutus kontak antara tinja dengan manusia secara higienis, seperti Tangki Septik (sesuai SNI 2398:2017) yang dilengkapi leher angsa, Lubang tanah/ cubluk yang dilengkapi leher angsa pada wilayah perdesaan dengan kepadatan < 25 jiwa/ha;
- 5) Akses Sanitasi Aman adalah Penggunaan fasilitas sanitasi layak sendiri (tidak sharing dengan rumah tangga lain), dimana telah dilakukan pengolahan tinja lanjutan secara aman, baik pada IPLT maupun pada IPAL yang telah dilengkapi dengan pengolahan lumpur lanjutan;
- 6) SPALD adalah Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik (Pasal 1 PermenPUPR 4/2017). Masyarakat menggunakan sarana sanitasi yang layak, yang tidak digunakan secara bersama dengan rumah tangga lain serta terdapat pengolahan air limbah domestik, baik secara setempat maupun terpusat. Melingkupi keseluruhan rantai layanan sanitasi, mulai dari rumah tangga hingga pembuangan/pemanfaatan akhir;
- 7) Air Limbah Domestik (Psl 6 Permen PUPR 4/2017) terdiri dari: (a) air limbah kakus (black water); dan (b) air limbah non kakus (grey water).
- 8) IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) adalah Instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- 9) IPALD (Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik) adalah Bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.

2. Proses pelatihan enumerator yang hanya melibatkan 4 orang (2 Koordinator Kabupaten, 1 Pendamping AMPL dan 1 orang manajer program) akan dilanjutkan kembali di tingkat Kabupaten masing-masing untuk memastikan lebih dari 13 orang Enumerator betul-betul memahami bagaimana survey online ini dijalankan dan bagaimana substansi kuesioner dipahami. Itupun masih berhadapan dengan berbagai tantangan dan pertanyaan pada diri peserta "*bagaimana nanti enumerator akan menghadapi langsung puluhan responden?*". Beberapa diantaranya yang dihadapi enumerator saat survey adalah:
 - * Responden kesulitan membuka link, karena browser yang tidak sesuai.
 - * Responden bertanya di tengah proses pengisian kuesioner (sulit dihindari), sementara Enumerator sedang memandu sebagian responden untuk pengisian kuesioner online (bagi responden yang tidak membawa HP Android).
 - * Nomor HP peserta bukan Nomor WA dan tidak akan dapat menerima link survey.
3. Pemahaman isi kuesioner menggunakan metode ujicoba sebelum proses survey di lokasi masing-masing. Metode ujicoba dilakukan dengan cara simulasi penggunaan link kuesioner yang dilakukan 2 kali yaitu 1 kali sebelum peserta ke lapangan dan 1 kali setelah perbaikan kuesioner dari lapangan. Hal tersebut membuat peserta lebih memahami isi kuesioner termasuk alur dari 1 pertanyaan ke pertanyaan lainnya serta semakin mudah menggunakan kuesioner. Pada akhirnya responden akan terbantu dengan tuntunan pengalaman para enumerator.
4. Di wilayah desa dengan jaringan internet yang kuat, membantu proses survey online dan sebaliknya merasa kesulitan di wilayah desa dengan jaringan internet yang tidak memadai. Fasilitator Kabupaten bersama Sanitarian memastikan bahwa Desa lokasi survey dan

promosi adalah desa dengan jaringan internet yang cukup memadai. Penyelenggara menyiapkan paket data atau hotspot/tethering bagi peserta yang tidak punya paket data. Jika paket data terbatas, diantisipasi dengan meminta mengisi kuesioner secara offline dengan cara: buka paket data saat memulai membuka link, dan jika sudah dibuka dan siap untuk mengisi kuesioner, paket data boleh dimatikan. Kemudian paket data dihidupkan kembali setelah semua pertanyaan dijawab dan akan mengirim hasil (submit). Antisipasi lain yang dilakukan (khusus survey di Lombok Timur) adalah pengisian kuesioner secara offline (dengan mengisi kuesioner secara manual) oleh beberapa responden yang tidak membawa HP dan dari sisi jumlah tidak mungkin ditangani oleh enumerator untuk dipandu online menggunakan HP-nya enumerator. Hal ini supaya semua peserta selesai base line akan ikut promosi bersamaan dan tidak ada lagi yang mengisi kuesioner.

5. Dengan hanya 50 % (dari 6 orang) responden yang hadir pada saat training persiapan dan tidak memiliki paket data, membuat peserta training (tenaga enumerator) kewalahan dalam menyiapkan proses pengisian kuesioner. Di satu sisi ada responden yang harus difasilitasi atau dipandu dalam pengisian kuesioner, disisi lain ada responden yang harus disiapkan hotspot-nya serta ada responden yang sudah mulai mengisi link kuesioner, bertanya bertubi-tubi. Situasi itu yang kemudian harus disiapkan untuk jumlah responden yang lebih besar (minimal 35 orang). Termasuk memastikan berjalannya protokol kesehatan yang kadang sering dilupakan.
6. Responden yang tidak membawa KTP dan lupa dengan nomor HP, cukup menghambat atau memperlambat proses pelaksanaan survey karena proses memberi layanan ke peserta lain menjadi terganggu. Mengantisipasi hal tersebut, maka peserta yang diundang dan menjadi responden serta mengikuti kegiatan promosi, dipastikan

membawa KTP dan atau KK serta dihimbau untuk membawa HP Android.

7. Kegiatan *baseline* dan end line survey yang dirangkaikan dengan proses promosi PALD aman dalam hari yang sama, membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Proses ini membutuhkan konsolidasi yang kuat baik dari sisi persiapan, personal, kontens substansi, goal besar-nya hingga penyelenggaraannya. Penyelenggara survey meminta nomor HP sebelum mereka hadir, sehingga WA Grup yang disiapkan memudahkan pengiriman link. Sebagian dilakukan dengan menuliskan link **bit.ly/.....** di papan tulis/ layar dan kemudian meminta peserta mengetik di **Search Google**, terus enter dan proses selanjutnya pengisian bisa dilakukan.
8. Kombinasi dalam penggunaan media dengan power point presentasi, link video di youtube dan pembagian leaflet/brosur lembar informasi, menciptakan proses yang disenangi responden untuk menyerap pengetahuan dalam konteks SPALD yang aman. Melalui proses tersebut sekaligus mampu memicu dan mensosialisasikan/ mempromosikan PALD menuju Sanitasi Aman. Walaupun media leaflet kurang terlalu efektif karena kadang dibaca dan setelah itu dibuang atau dibiarkan di tempat (dimana proses promosi dilangsungkan), dan sedikit responden yang membawa pulang.
9. Di awal proses, sesaat sebelum memulai base line survey, enumerator memastikan ke seluruh peserta untuk; menggunakan browser yang bisa membuka link kuesioner (misalnya Google Chrome) dan bukan browser bawaan HP, mengeluarkan KTP atau KK, menyiapkan Nomor HP dan mencatat dalam kertas tersendiri serta, menjaga anak yang kadang mengganggu saat responden menggunakan HP dalam pengisian kluesioner. Batasan dan aturan penting tersebut, sangat membantu enumerator dalam memastikan pemahaman responden secara bertahap, sehingga tidak ada yang

ketinggalan. Ketinggalan 1 atau lebih responden dalam pengisian online survey akan menyulitkan dalam memberikan pelayanan kepada responden lainnya dalam 1 kelas.

6. YOUTH SANITATION INFLUENCER MENCETAK GENERASI MILENIAL SEBAGAI AGEN PERUBAHAN BIDANG SANITASI

“Peran kaum milenial dalam kampanye dan promosi sanitasi di lingkungan pendidikan menuju keluarga dan masyarakat untuk tidak lagi berperilaku BAB sembarangan (BABS 0%), akses sanitasi layak 84%, dan 11 % diantaranya adalah akses sanitasi aman pada tahun 2024,”.

KALA ITU DI SEPUTARAN BUKIT KHASRI-SESAOT

Pagi itu, Ahad 20 Desember 2020 hujan turun dengan lebat di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Namun terlihat suasana berbeda di seputaran Bukit Khasri. Jalan rabat menuju Bukit Khasri terpasang umbul-umbul dan di atas pintu gerbang terpasang spanduk ucapan selamat datang. Di areal parkir, nampak satu unit ambulan bertuliskan PMI Lombok Barat lengkap dengan tim paramedis. Didekat ambulan tersebut dibangun terop bertuliskan PANITIA. Melewati terop panitia, terpasang beberapa tenda dan 5 buah terop besar yang berhadapan dengan sebuah panggung. Di pojok barat dan utara dekat pagar, tampak bangunan MCK yang masing-masing diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan. Di areal tersebut juga dibangun beberapa tempat CTPS dan *trash bag* yang berfungsi sebagai tempat sampah. Tenda lainnya berisi sound system dan sebuah *berugak* difungsikan sebagai dapur umum.

Menjelang siang, hujan mulai reda dan rombongan peserta mulai berdatangan. Wajah mereka terlihat ceria, ditemani hujan rintik dan tidak mengurangi semangat mereka untuk datang ke Bukit Khasri. Setelah mencuci tangan, kemudian dengan tertib mereka mengantri di depan tenda panitia untuk melakukan registrasi dan menerima paket *tools kit* yang berisi ATK, tas ransel, baju kaos, *face shield*, masker dan jas hujan. Panitia membagikan kotak makan siang dan mereka bergegas mengisi terop yang sudah disiapkan. Mereka adalah utusan dari masing-masing 5 SMK dan SMA di Kabupaten Lombok Timur dan Sumbawa Barat. Mereka diundang untuk mengikuti Jambore Sanitasi Promosi dan Kampanye Perubahan Perilaku Menuju Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Aman Provinsi NTB. Setiap sekolah diwakili oleh 4 orang siswa dan 1 orang guru pendamping yang pernah mendapat pelatihan pembuatan film dan menjadi peserta lomba film promosi sanitasi.

INTERAKSI DAN MEMBANGUN PEMAHAMAN SANITASI MELALUI JAMBORE

Jambore Sanitasi ini dilaksanakan oleh Mitra Samya bekerjasama dengan *Asosiasi Eksperiential Learning Indonesia (AELI) NTB*, Pemerintah Desa Sesaot dan Pokja AMPL NTB dengan dukungan UNICEF. Kegiatan dilaksanakan dengan tetap menjaga Protokol COVID 19. Peserta diwajibkan tetap memakai masker, *face shield* dan mencuci tangan dengan sabun serta selalu diingatkan untuk menjaga jarak aman untuk interaksi. Jambore ini dirancang agar peserta dapat belajar dari pengalaman. Peserta menginap di rumah warga yang sudah disediakan oleh Pemerintah Desa Sesaot dengan tujuan agar dapat berinteraksi dengan warga diluar lingkungan mereka, sekaligus melakukan promosi sanitasi menggunakan media film yang sudah mereka buat. Peserta juga didorong untuk berinteraksi dan bertukar pengalaman dengan peserta

dari sekolah lainnya serta dengan para pelaku pembangunan sanitasi di NTB.

Setelah semua peserta hadir, dilakukan kegiatan penyambutan peserta Jambore yang dipandu oleh AELI NTB. Sambutan selamat datang diawali oleh Bapak Husnuzzoni, Direktur Mitra Samya dan dilanjutkan dengan ucapan selamat datang oleh Bapak Yayat Hidayat selaku perwakilan UNICEF dan ibu Yuni, Kepala Desa Sesaot. Dalam sambutannya, Ibu Yuni memotivasi peserta perempuan untuk menjadi pemimpin dan tidak takut bersaing dengan laki-laki. Acara penyambutan peserta diakhiri dengan penjelasan kegiatan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan. Peserta diingatkan untuk selalu mematuhi Protokol COVID 19.

Untuk mencairkan suasana, Pemandu AELI kemudian mengajak peserta untuk melakukan *ice breaking*. Beberapa game yang dimainkan ternyata mampu menumbuhkan keakraban antar peserta dan panitia. Peserta kemudian dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan perannya dalam pembuatan film sanitasi, yaitu: Kelompok Editor (10 orang); Kelompok Penulis Script (10 orang); Kelompok Cameramen (10 orang); Kelompok Sutradara dan Aktor (11 orang); dan Kelompok Produser (7 orang). Guru pendamping di minta untuk bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut sesuai keinginan masing-masing. Setiap kelompok diminta untuk memilih ketua, saling memperkenalkan diri, membuat yel-yel kelompok. Tiap kelompok secara bergiliran memperkenalkan anggota kelompoknya dan melakukan performance yel-yel kelompoknya.

PERSIAPAN KAMPANYE SOSIAL MENJADI AGENDA LUHUR

Setelah itu peserta diminta untuk melakukan persiapan *social campaign* yang akan dilakukan besok. Persiapan ini dipandu oleh Bapak Rikrik dan Ibu Orin. Kehadiran Bapak Rikrik dan Ibu Orin dalam kegiatan jambore menjadi kejutan bagi peserta, karena selama ini mereka hanya berinteraksi melalui media daring dengan kedua orang yang selama ini

melatih mereka membuat film sanitasi. Kegiatan persiapan diawali dengan menyepakati peserta yang akan melakukan presentasi untuk masing-masing peran, sebagai berikut: Sutradara: Syallu Mahsyah Holky dari MAN 1 Lotim; Penulis Script: Saftina Apriyanti dari MAN 1 Lotim; Konten Sanitasi: Agustina dari SMKN 1 Maluku; Kameramen: Rizaldi Mujahid dari SMAN 1 Sikur dan Editor: Darmawan Aryandani dari SMAN 1 Sakra. Sebagai moderator disepakati Dicky dari SMKN 1 Maluku. Peserta yang tidak mendapatkan tugas presentasi diminta untuk melakukan persiapan kampanye sanitasi dengan media film yang mereka buat di tempat menginap masing-masing.

Pemandu AELI dan Pemerintah Desa Sesaot kemudian membagi tempat menginap berdasarkan kelompok masing-masing. Kegiatan hari pertama diakhiri dan peserta berangkat menuju tempat menginap yang telah disediakan.

KEMERIAHAN JAMBORE MENGHADIRKAN ARTIS DUTA AMPL NASIONAL DAN PEJABAT PENTING

Hari Senin, 21 Desember 2020 matahari bersinar cerah. Hari masih pagi, namun peserta jambore sudah berkumpul di bukit Khasri. Menjelang jam 8 pagi, tamu undangan mulai berdatangan. Ada kelompok-kelompok pelajar dari SMA dan Madrasah Aliyah di seputaran Kecamatan Narmada dan anggota Pokja AMPL NTB. Layar infocus di depan terop peserta menampilkan gambar undangan yang sudah bergabung secara virtual. Tampak Kepala Bappeda NTB, Bupati Lombok Timur, Bupati KSB, Perwakilan UNICEF NTB – NTT, serta artis Ike Nurjanah selaku duta sanitasi hadir di tengah peserta Jambore secara virtual.

Kegiatan dimulai dengan pentas seni yang menampilkan beberapa tarian dari peserta, dilanjutkan dengan Opening Ceremony. Dalam laporan yang disampaikan oleh Direktur Mitra Samya, disampaikan bahwa jambore

merupakan puncak dari rangkaian kegiatan pengembangan dokumen film sanitasi. Pada hari ini disampaikan pengumuman pemenang lomba film sanitasi dan pemberian hadiah. Sementara itu, UNICEF wilayah NTB-NTT yang diwakili oleh Ibu Rostia menjelaskan bahwa UNICEF adalah Lembaga PBB yang diberi mandate untuk menjamin bahwa hak-hak anak itu terpenuhi, hak untuk mendapat pelayanan, hak untuk dilindungi dan hak untuk dikasihi serta disayangi termasuk hak untuk mendapatkan akses air bersih, sanitasi, promosi kesehatan dan pengelolaan sanitasi yang aman. UNICEF bersama Pemerintah Provinsi NTB mendukung percepatan pencapaian Stop BABS dan implementasi pengelolaan sanitasi aman di masyarakat, sekolah dan Puskesmas. Melalui jambore sanitasi yang mengangkat tema perubahan perilaku menuju pengolahan air limbah domestik yang aman di provinsi NTB, diharapkan para peserta menjadi salah satu mitra dari POKJA dalam mencapai sanitasi aman. Pembukaan jambore dilakukan oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB secara virtual dan dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh undangan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

Milenial sanitasi merupakan salah satu terobosan baru dalam mendukung program sanitasi di NTB. Kaum milenial yang akan menjadi corong pembaharuan untuk membantu pemerintah dalam mencapai target 84 % sanitasi layak dan 11% didalamnya untuk sanitasi aman seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dr Amry Rahman (Kepala Bappedalitbang) NTB. Konsep pelibatan milenial dalam melakukan kampanye sanitasi baru dilaksanakan di NTB. Dan harapannya akan bisa direplikasi ke provinsi lain yang sedang mengembangkan program sanitasi menuju akses sanitasi aman. Dalam kesempatan ini, milenial diharapkan akan mampu melakukan kampanye perubahan perilaku mulai dari sekolah, tempat tinggal siswa sampai dengan masyarakat secara umum.

Penghargaan juga diberikan kepada sekolah dan siswa yang memiliki talenta dibidang sinematografi. Ada tiga (3) sekolah di masing-masing Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Penghargaan diberikan kepada masing-masing sekolah, siswa berprestasi dengan kategori siswa sebagai sutradara terbaik, kameramen terbaik, dan guru terbaik dalam membimbing sekolahnya.

Praktisi Film dan Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Rikrik Saptaria, menerangkan tentang proses lokakarya pembuatan video promosi sanitasi. Lokakarya berjalan dua bulan dengan peserta dari 10 sekolah di KSB dan Lotim. Dijelaskan bahwa dalam prosesnya, masing-masing sekolah membentuk satu tim berisi 6 orang siswa. Tim tersebut telah menghasilkan 10 judul film pendek sebagai media promosi. *“Ini pengalaman yang sangat berharga, karena hampir seluruh kegiatan lokakarya kita laksanakan secara daring. Di sini para peserta belajar disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan dan lain-lain dalam produksi filmnya,”* ujar Rikrik.

Saat webinar yang difasilitasi oleh Yayasan Hidayat sebagai PF SMS UNICEF menghadirkan narasumber dari Pokja AMPL Provinsi NTB (Made Parnaya dari Dinas Kesehatan NTB), Rostia La Ode Pado (WASH Officer UNICEF NTT dan NTB) dan Duta AMPL Nasional (Ikke Nurjannah). Pokja AMPL NTB menyampaikan materi singkat untuk memotivasi para anggota YSI NTB untuk terus berkarya dalam melakukan promosi sanitasi. WASH Officer UNICEF NTT&NTB menyampaikan materi terkait upaya UNICEF dalam memastikan hak anak untuk mendapatkan sanitasi yang layak dan aman. Sedangkan Duta AMPL Nasional, juga menyampaikan hal yang sama *“para milenial diharapkan mampu melakukan perubahan perilaku di masyarakat dalam mencapai target sanitasi di Indonesia’ termasuk di NTB dan kaum milenial hendaknya dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah”*.

Kegiatan webinar juga diisi dengan kuis yang pertanyaannya diberikan oleh para narasumber.

APA KESAN MEREKA?

Bagi peserta siswa dan guru yang mendapat kesempatan dalam pengembangan media film singkat, sangat berkesan dan merasakan banyak pembelajaran yang sangat berharga. Seperti yang disampaikan beberapa peserta. Ibu Rohyatul guru pembimbing; *“awalnya kami tidak paham dengan cara pembuatan film, namun saya (selaku pembimbing sekolah) memberanikan diri untuk ikut dalam acara pembuatan film sanitasi ini. Namun setelah saya mengikuti kegiatan tersebut, baru saya mengetahui maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut. Sampai sekarang saya menganggap kegiatan sangat baik dalam rangka mendukung program sanitasi di Lombok Timur dan NTB”*. Berbeda dengan kesan yang disampaikan oleh Agustina Yusiana Poy, Siswa SMKN 1 Maluk yang turut hadir sebagai peserta Jambore Sanitasi *“Banyak ilmu yang saya dapat disini, terutama untuk pembuatan film. Dari proses ini juga kami baru tahu sanitasi itu apa, termasuk tantangan-tantangannya di lapangan,”* ujarnya. Menurut Agustina, dalam proses pembuatan film tentang sanitasi berjudul Geng Cinta Sehat yang digarapnya memang tidak gampang. Terlebih untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa sanitasi adalah kebutuhan bersama. *“Sempat ketika kami mau mengambil bahan atau gambar video, orang-orang meremehkan. Mereka menganggap anak kecil seperti kami tidak tahu lebih banyak tentang sanitasi ketimbang mereka yang lebih dewasa,”* jelasnya. Pelibatan generasi milenial perlu menjadi bagian khusus dan mendapat ruang inovasi dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. *“Terutama untuk mendukung percepatan ODF (Open Defecation Free) menuju sanitasi aman di NTB,” jelas Husnuzzonni dalam acara Webinar.*



BAGIAN 4

CERITA DARI WORKSHOP
PENDOKUMENTASIAN BEST PRACTICES
PROGRAM LAYANAN SANITASI AMAN

1. KATEGORI KOMITMEN

Praktik Baik dan Kurang Baik

Pertemuan berkala dan komunikasi intensif yang dibangun di tingkat Pokja ini menjadi landasan komitmen terbentuk. Komitmen yang sudah terbentuk, tidak akan berpengaruh walaupun ada pergantian personil pada unsur pemerintah. Disisi lain, pergantian personil membutuhkan proses adaptasi lebih lanjut, dan terkadang menjadi kurang baik karena belum nyambung dengan keputusan sebelumnya. Sampai saat ini walaupun sudah ada komitmen yang dibuktikan dengan kehadiran, tetapi belum dibarengi dengan dukungan anggaran (terutama operasional pokja).

Pembelajaran Utama

Komitmen yang terbangun cukup kuat untuk meningkatkan partisipasi aktif anggota Pokja. Anggota Pokja menjadi lebih respon dalam setiap kegiatan dan selalu hadir.

Cerita Sukses

Yang Dilupakan yang Berperang

L. Saharudin (Dinas Kesehatan KSB)

Pokja AMPL mulanya merupakan sebuah kelompok kerja yang dulunya lebih didominasi oleh perannya Bappeda. Hampir keterlibatan anggota lain di semua kegiatan sangat kurang (numpang nama dalam SK). Oleh Pemerintah Daerah, Peran Pokja AMPL belum dianggap begitu penting, sehingga sangat sulit mendapat dukungan (baik dana atau lainnya) dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Seiring berjalannya waktu, dimulai awal 2019, dilakukan pembicaraan/permintaan dukungan UNICEF untuk membantu penyelesaian permasalahan sanitasi di KSB. Pada tahun 2020, UNICEF menunjuk Mitra Samya sebagai mitra pendamping dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam mewujudkan kualitas sanitasi yang lebih baik dan penguatan kelembagaan. Diawali dengan pertemuan non formal, loby-loby sederhana hingga pertemuan formal dalam skala lebih besar. Peran Pokja AMPL mulai diperhitungkan dan hampir semua program pemerintah maupun swasta yang mengarah ke sanitasi dan air bersih selalu melibatkan Pokja AMPL.

Kami Muda Kami Bisa, Bawa Perubahan Untuk

Generasi Milenial

Darmawan Aryandani SMKN 1 Selong

Sebelum mengikuti kegiatan ini, saya kurang paham dan kurang memperhatikan kondisi sanitasi yang ada dilingkungan masyarakat serta tidak mengerti apa dampak dari BABS. Bahkan saya pun belum mengetahui apa itu sanitasi, saya dan keluarga menerapkan sanitasi yang tidak baik. Semenjak berpartisipasi

dalam kegiatan ini, saya mendapat banyak ilmu terutama dalam masalah sanitasi, sehingga membuat saya menjadi lebih sadar akan pentingnya mewujudkan sanitasi aman. Faktor yang mendorong saya untuk merubah pola pikir saya dan menjadikan saya lebih peduli terhadap sanitasi yaitu para mentor-mentor yang telah memberikan pemahaman tentang sanitasi aman, yaitu dari Mitra Samya, UNICEF, Pokja AMPL serta instansi dan lembaga yang ada di NTB. Pemahaman saya tentang sanitasi menjadi lebih luas dan terbuka. Saya bersyukur dapat berpartisipasi untuk mewujudkan program BASNO di NTB karena saya sebagai anak muda harus mengambil langkah dini, supaya ke depannya dapat memberikan impact yang besar bagi masyarakat khususnya anak muda seperti saya. Nantinya anak-anak muda saling merangkul, sehingga kita semakin menjadi lebih baik dan semakin peduli terhadap diri kita sendiri dan orang lain, serta harapan yang kita inginkan dapat tercapai.

Dengan pedulinya kita terhadap kondisi sanitasi, secara tidak sadar dapat merubah pola hidup dan perilaku didalam diri kita masing-masing. Menjadi pribadi yang lebih bersih, sehat dan ceria. Pedulinya kita dapat berdampak besar bagi orang, lingkungan dll. Harapan kedepannya, semoga dengan perubahan ini saya dapat menjadi role model bagi masyarakat khususnya kaum muda agar lebih peduli tentang sanitasi, maka terus melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai anak muda di era global ini tentu saya juga akan memanfaatkan sosial media seperti, instagram, twitter, facebook, youtube dan sosial media lainnya yang bisa mencakup banyak kalangan muda.

Faktor Sukses dan kurang Sukses

▪ **Faktor Sukses**

- Karena adanya kesamaan visi/tujuan.
- Transparansi dan akuntabilitas anggaran. Program kegiatan dan anggaran dibahas/diketahui bersama anggota pokja.

▪ **Faktor Kurang Sukses.**

- Masih sering dijumpai adanya ego Sektoral

-

Rekomendasi

- Memperluas pihak-pihak yang berkomitmen (Private sektor) Lembaga pendidikan/Pokja
 - Perlu penguatan komitmen dukungan anggaran (Pemprov dan Pemkab).
1. Penguatan kelembagaan Pemda-Kab./Kota.
 2. Peningkatan kapasitas POKJA AMPL
 3. Support anggaran.
 - Regulasi yang kuat (Pemda)

2. KATEGORI PEMBERDAYAAN

Praktik Baik dan Kurang Baik

1. Praktek Baik

- Mahirnya masyarakat dalam penggunaan media HP android pada saat survey.
- Tersedianya media edukasi yang lebih mudah dijangkau.
- Lebih peduli dengan lingkungan.
- Masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu (Media promosi)

2. Praktek Kurang Baik

- Munculnya agenda tentang kerja bakti di lingkungan.
- Kurangnya antusias dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan.
- Tidak bisa menerima perubahan
- Ego Sektoral.
- Fasilitas tidak mendukung sehingga menghambat kegiatan.
- Tidak semua Pokja terlibat/ Partisipatif.
- Mutasi jabatan yang sering terjadi di OPD.

Pembelajaran Utama

- Antusiasme masyarakat tinggi.
- Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menggunakan HP Android.
- Meningkatkan kesadaran diri tentang sanitasi.

- Perlengkapan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan.

Cerita Sukses

Sanitasi dan Air Tinja

Agustina (SMKN 1 Maluk)

Saya Agustina merasa bersyukur sekali bisa terlibat dalam project ini. Keterlibatan saya dalam project ini karena terpilih untuk mengikuti lomba pembuatan film sanitasi. Kondisi awal terutama di desa tempat saya tinggal masih belum sadar tentang penyedotan tangki septic, karena kesadaran masyarakat tentang tangki septic sangat rendah atau kecil sekali dan pemahaman tentang tangki septic sangat kurang. Saat mengikuti lomba pembuatan film sanitasi, kami diharuskan untuk melakukan kampanye sanitasi. Kebetulan saya memilih desa saya sendiri untuk dilakukannya kampanye sanitasi tersebut. Jadi saya menjelaskan tentang materi-materi sanitasi yang telah saya dapatkan dari zoom meeting sebelumnya. Bersyukur ibu-ibu yang saya ajak untuk bergabung dalam kampanye tersebut merasa *excited* dan *welcome* tentang materi yang saya sampaikan. Mereka mencerna dan mulai memahami tentang sanitasi terutama tentang tangki septic sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Setelah saya melakukan kampanye tersebut, perubahan yang sangat jelas terlihat adalah ibu-ibu atau masyarakat yang telah mengikuti kampanye tersebut mulai memperhatikan tangki septic di rumah masing-masing. Kebetulan saya mengundang ibu Kepala Desa tersebut, lalu oleh Ibu Kepala Desa langsung ingin melakukan penyedotan tangki septic secara rutin di desa tersebut atau desa saya tempat dimana saya melakukan kampanye sanitasi. Menurut saya, jelas penting sekali perubahan ini untuk saya bahkan sangat

penting untuk banyak orang, dan dampaknya sangat luas sekali seperti masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu tentang sanitasi yang aman dan bahkan langsung ingin melakukan penyedotan tangki septik yang rutin untuk desa dan rumahnya masing-masing. Dampak yang lebih luas, lingkungan menjadi lebih bersih dan tidak mudah terkontaminasi tinja jika dilakukan penyedotan tinja secara rutin. Yang perlu diperbaiki berkaitan dengan cerita saya adalah IPLT setempat atau daerah masing-masing lebih diperhatikan atau bisa memberitahukan keberadaan dan manfaat dari IPLT dan usahakan bisa melakukan pengenalan IPLT kepada masyarakat.

Upaya Pemberdayaan, Praktik Kongkrit di Lapangan

Pada awalnya masyarakat NTB khususnya di Mataram, memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kebanyakan membuang sampah di got, pinggir jalan, lahan kosong, sehingga ketika musim hujan sampah terbawa ke sungai dan masuk ke laut. Untuk mengatasi hal tersebut, hal yang dilakukan untuk mengajak masyarakat melakukan perubahan perilaku dengan cara: 1) Sosialisasi tentang dampak sampah dan memberdayakan perilaku bakar sampah; 2) Kampanye melalui media sosial untuk menyentuh generasi milenial; 3) Revitalisasi gotong royong dengan melibatkan masyarakat dan komunitas setempat; 4) Pelatihan tentang bagaimana mengurangi, memilah dan mengolah sampah di rumah masing-masing; dan 5) Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak seperti komunitas, lembaga pendidikan (pesantren, universitas, dll). Perubahan yang terjadi setelah melakukan upaya-upaya yang tersebut diatas adalah: 1) Masyarakat mulai mengenal dan membicarakan bagaimana membudayakan gaya hidup bebas sampah; 2) Bermunculan

komunitas/kelompok masyarakat untuk bergotong royong melaksanakan clean up/membersihkan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut di atas, yang perlu diperbaiki ke depannya; 1) Pembentukan kelompok pengelola sampah disetiap lingkungan; 2) Dukungan dari pemerintah terkait peningkatan infrastruktur, regulasi dan dukungan anggaran; 3) Peningkatan kapasitas bagi stakeholder terkait; dan 4) Perlunya inovasi baru terkait teknologi pengelolaan sampah.

Faktor Sukses dan kurang Sukses

- (+)Sukses: Semangat/ Kemauan untuk berubah menjadi lebih baik.
- (-)Sukses: Miss Komunikasi

Rekomendasi

- Pembuatan konten edukasi yang relevan agar diterima masyarakat (Kominfo, Dikes, LH).
- Memperluas kerjasama dengan berbagai pihak (OPD, Swasta).
- Prioritas anggaran untuk kegiatan sanitasi aman (Dinas PU, BAZNAS, Dikes, BPMPD).
- Stakeholder terlibat aktif dalam setiap kegiatan terkait dengan sanitasi aman. (Pokja AMPL).

3. KATEGORI KEBERLANJUTAN

Praktik Baik dan

Kurang Baik

- Ada aplikasi berbasis WEB
- GO PINKI
- Ada kerangka regulasi NA – L2T2.
- Ada kelembagaan yang memisahkan operator dan regulator UPTD – ALD
- Peningkatan kapasitas SDM
- Pelatihan Regulator dan Operator.
- Penyedotan lumpur tinja gratis.
- Ketergantungan masyarakat.

Pembelajaran

Utama

- Peningkatan akses sanitasi aman.
- Layanan L2T2.

Cerita Sukses

Penyediaan Regulator dan Operator L2T2 untuk Mendorong Sanitasi Aman Dhita (DLHK Provinsi NTB)

Pada awalnya masyarakat belum mengetahui pentingnya sanitasi yang layak dan aman. Dengan dilakukannya pemicuan, sosialisasi dan edukasi akhirnya masyarakat memahami dan mengetahui pentingnya sanitasi yang layak dan aman tersebut. Dibuktikan dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap BAB ditempat yang mereka bangun dengan layak dan aman. Disisi lain Pokja AMPL bersama program kemitraan mensupport masyarakat dalam penyelesaian bidang sanitasi dan air minum dengan melakukan pendampingan dalam penyusunan regulasi terkait dengan L2T2. Selain itu terbentuknya kelembagaan yang menangani infrastruktur berkaitan dengan sanitasi (UPTD ALD). Dalam peningkatan

kapasitas kelembagaan tersebut, pemerintah juga melakukan pelatihan regulator dan operator untuk keberlanjutan dan keberfungsian dari regulasi yang sudah tersusun dan infrastruktur yang sudah terbangun. Namun regulasi tersebut belum berjalan dengan maksimal karena masyarakat masih dimanjakan oleh pemerintah dengan dibebaskannya biaya penyedotan lumpur tinja. Untuk keberlanjutan jangka panjang pemerintah melalui Pokja AMPL dan Kemitraan Program, diharapkan tetap melakukan pendampingan sosialisasi dan edukasi secara berkala untuk menyelesaikan 5 pilar STBM.

Pengelolaan Sanitasi Aman KSB

Kondisi awal di wilayah KSB sudah ODF dan sudah memiliki IPLT, sudah memiliki lembaga yang memisahkan regulator dan operator tetapi IPLT tidak berfungsi. Dukungan yang diperoleh sebagai pendorong perubahan adalah: 1) Keberlanjutan dalam pengelolaan sanitasi memuat 5 aspek yang harus berjalan bersama yaitu teknis, regulasi, kelembagaan, pendanaan, peran serta masyarakat; 2) Dengan program SMS dapat melengkapi 5 aspek dalam pengelolaan dengan adanya pergeseran regulasi NA-L2T2, pembuatan aplikasi Go Pinki (L2T2), peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan regulator dan operator serta adanya peningkatan peran serta masyarakat melalui promosi dan kampanye perubahan menuju pengelolaan air limbah aman; dan 3) Namun ada hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kebijakan gratis penyedotan lumpur tinja untuk pengelolaan jangka panjang yang menimbulkan ketergantungan masyarakat.

Faktor Sukses dan kurang Sukses ▪ Sukses: Sudah ODF (BASNO)

Rekomendasi

- Kurang Sukses: Ketergantungan Masyarakat.
- Melakukan pendampingan sosialisasi dan edukasi secara berkala untuk menyelesaikan 5 pilar STBM.
- Perlu adanya regulasi dalam penetapan tarif retribusi dalam pengelolaan LLTT
- Pokja AMPL Kabupaten.

4. KATEGORI MULTIPIHAK

Praktik Baik dan Kurang Baik

- Keterlibatan aktor semakin banyak (guru, siswa, Pemdes, masyarakat desa, Reman kecamatan).
- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Monev
- Laporan

Pembelajaran Utama

Jika dinamika kerja terkonsolidasi multipihak maka permasalahan yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik.

Cerita Sukses

Pemahaman Sanitasi Aman Mendorong Komitmen Parapihak

Apip (DLHK Kab. Lotim)

Saya mulai jadi sanitarian sejak tahun 2020 mengajak masyarakat BAB di jamban melalui tangga sanitasi, mulai dari cemplung ke leher angsa. Dengan BAB di jamban saya anggap aman karena tidak mencemari badan sungai. Saat ini cakupan akses jamban

keluarga 76% dan menuju BASNO. Lalu datang program sanitasi aman yang dibawa Mitra Samya, saya baru menyadari bahwa sanitasi yang saya perjuangkan selama ini belum aman, karena masyarakat tidak lagi BAB disungai atau dikebun. Tetapi septic tank-nya diresapkan sehingga mencemari air permukaan yang 90% masyarakat memanfaatkannya. Selama Mitra Samya mengajak semua pihak untuk melaksanakan sanitasi aman dengan cara semua septic tank kedap, Pembangunan IPLT dan L2T2. Kegiatan ini harus menjadi komitmen semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Perubahan ini kami pilih karena sanitasi aman bukan hanya tanggungjawab seorang/pihak tertentu saja, melainkan tanggungjawab semua pihak. Dalam mewujudkan sanitasi aman membutuhkan dukungan semua pihak. Keterlibatan multipihak dalam program sanitasi awalnya hanya terbatas pada persepsi pada sanitasi layak saja tanpa melirik apakah itu sudah aman atau tidak. Melalui program SMS dari Mitra Samya bersama UNICEF, membuka pemahaman para pihak dan komitmennya terhadap penguatan sanitasi aman sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sanitasi layak. Keterlibatan multipihak dalam berbagai kegiatan rapat koordinasi, pelatihan-pelatihan, joint monitoring dan peningkatan kapasitas lainnya, meningkatkan pemahaman dan menguatkan komitmen para pihak untuk menjadikan sanitasi aman, melalui konsolidasi perencanaan, penganggaran, monev secara terpadu dan berkesinambungan.

Faktor Sukses dan kurang Sukses

- Adanya peningkatan kapasitas para pihak.
- Intensitas komunikasi oleh semua pihak (Mitra, Pemda).

- Adanya penggerak intensitas koordinasi multipihak (Pokja AMPL, Pendamping, Mitra).
- Adanya dukungan anggaran (Mitra, Pemda).

Rekomendasi

Untuk UNICEF dan Mitra Samya

- Dibutuhkan pendamping untuk meningkatkan kapasitas Pokja AMPL dan memastikan kerja-kerja multipihak ini berjalan dan berkelanjutan

Untuk Pokja AMPL/PKP (Provinsi/Kabupaten)

- Melakukan advokasi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan dukungan komitmen. (Paket kebijakan pro Sanitasi Aman).

Untuk Pokja AMPL Kabupaten

- Advokasi Pemerintah Kecamatan, Desa (pro sanitasi aman).

5. KATEGORI KESEIMBANGAN GENDER DAN KEIKUTSERTAAN KAUM DIFABLE

Praktik Baik dan Kurang Baik

- Pelibatan siswa dalam pembuatan film.
- Pelibatan tokoh wanita
- Pelibatan masyarakat miskin.
- Sudah ada panduan yang mencakup pembangunan jamban bagi kelompok difabel.

Pembelajaran Utama

- Dominasi siswa laki-laki
- Tingkat kesulitan membuat jamban untuk keragaman difabel.

Cerita Sukses

WAJIB, Keterlibatan Perempuan dalam Setiap Kegiatan

Rahyatul K. (Guru SMKN 1 Selong)

Pada awalnya dilibatkan oleh Mitra Samya untuk ikut kegiatan diklat promosi video sanitasi dengan melibatkan 5 orang siswa yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan (dalam setiap kelompok sebisa mungkin ada keterlibatan perempuan). Kami tidak tahu apa-apa tentang sanitasi, apalagi sanitasi aman, sampai saya ber-google ria mencari referensi. Kami sangat senang dan bersyukur bahwa kami diberikan kesempatan untuk ikut diklat. Setelah ikut diklat secara daring dalam interval 3 bulan, sebagai pembimbing maka perilaku dan mindset kami tentang sanitasi berubah total. Selama pelatihan kami mendapatkan pemahaman dan tehnik pembuatan film dan promosi sanitasi. Sehingga kami sebagai guru pendamping semakin paham tentang film dan promosi sanitasi serta lebih peduli lagi tentang

sanitasi aman. Sanitasi aman sangat penting dan berpengaruh terhadap kesehatan diri, keluarga dan masyarakat Lombok Timur ke depannya.

**Faktor Sukses
dan kurang
Sukses**

Sukses:

- Memanagement waktu yang baik sehingga mendapatkan video terbaik 1 dan editor terbaik.
- Perencanaan yang mengakomodir keragaman.

Kurang Sukses:

- Tidak mengakomodir difabel.
- Tim kurang koordinasi dan tidak solid.
- Kepada Mitra Samya dan UNICEF untuk melibatkan Dikmen untuk mengadakan kegiatan yang sama di Kabupaten lain di NTB.
- Kepada Pokja Provinsi untuk koordinasi melibatkan Bappeda Kabupaten dalam hal anggaran untuk kegiatan promosi sanitasi.

Rekomendasi

SHARING CERITA PERUBAHAN ANTAR PESERTA

Setiap peserta memiliki cerita perubahan berdasarkan pengalamannya masing-masing. Tetapi karena keterbatasan waktu, maka pada sesi ini hanya dibatasi 4 perwakilan peserta (Darmawan Arya (Siswa SMKN 1 Selong), Baiq Win (Enumerator Lombok Timur, Subhan (Bappeda Kabupaten Lombok Timur) dan Rita Bunga P (Guru SMKN 1 Maluk), yang bertutur unik berdasarkan pengalamannya masing-masing. Tutar pengalamannya seperti tertuang dalam bagian lain buku ini (Bagian 3 Perubahan Terjadi Dimana-mana).

Ada catatan unik yang disampaikan guru pendamping Ibu Rita Bunga P. *“Sejak Mitra Samya menyodorkan kegiatan ini, kita tidak tahu apa-apa dan yang kami punya adalah semangat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Selain semangat kami bersyukur dan menjadi sekolah yang terpilih untuk belajar langsung sama para ahli. Saya sebagai seorang guru berharap bagaimana anak-anak ini termotivasi serta bisa melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi. Kami tidak tahu tentang WC sampai ke dalam-dalamnya. Setelah kami dimotivasi ternyata begini isi septic tank. Setelah pembuatan film ini, kami mengikuti trend anak-anak muda dengan membuat media tik-tok untuk menggunakan topik sanitasi, kami bergerak mengikuti jaman anak-anak untuk mempromosikan kegiatan ini”*. Penggunaan berbagai media akan sangat membantu dalam memperluas area kampanye tentang sanitasi aman. Bahkan Ibu Bunga akan menggunakan media sosial tik-tok untuk mempromosikan tentang sanitasi aman ini.

PESAN PENTING PARA PEJABAT

Dalam rangka memastikan komitmen dari para pihak untuk menindaklanjuti gagasan dan rekomendasi yang muncul dari setiap kelompok diskusi, maka para pejabat memberikan pernyataan dan komitmennya masing-masing. Diantaranya adalah dari Bappeda NTB, Dinas Kesehatan NTB, Pokja AMPL, Mitra Samya dan Perwakilan UNICEF sebagai berikut:



Ada beberapa catatan dirangkum untuk 2020, bahwa sinergitas dibidang WASH ini cukup solid di kabupaten dan kota. Kami berterima kasih kepada pendamping pokja selama ini yaitu Pendamping KSB dan Lombok Timur. Untuk KSB kita sudah menjadi best practice untuk wilayah NTB dan sekitarnya.

Hari ini kita ngobrol heppy dan sekaligus menginventaris apa yang sudah kita lakukan selama ini. Yang kita urusin adalah apa yang orang tidak mau urus. Mengupayakan NTB bisa secepatnya ODF, bagaimana BASNO dan Sanitasi Aman nantinya menjadikan NTB bersih dan melayani. Kemudian misi NTB sehat, cerdas, asri, lestari bisa dinikmati oleh generasi penerus. Kemudian misi sejahtera dan mandiri, bagaimana masyarakat bisa punya jamban sendiri. Yang terakhir adalah aman yaitu bagaimana kita menikmati jamban kita dengan aman dan nyaman.

Untuk pokja AMPL, kita bukan mengurus air minum saja seperti yang kita bicarakan, tetapi ada sanitasinya juga. Kenapa guru dan siswa kita libatkan karena untuk melakukan perubahan kita mengharapkan guru dan siswa yang sudah mendapatkan reward untuk mengkampanyekan kegiatan-kegiatan tentang sanitasi. Kedepan mungkin kita bisa kolaborasi juga baik dari sumber pendanaan juga maupun kegiatannya. Mudah-



mudahan hari ini bisa menghasilkan apa yang menjadi goal kita dan untuk NTB yang lebih baik. Kolaborasi parapihak yang menempatkan diri pada posisi setara adalah kunci dari apa yang sudah dicapai sampai saat ini.



Salam dan penghormatan kepada peserta kegiatan pada hari ini. Hari ini kita akan mencoba mendokumentasikan dan memetakan pengalaman-pengalaman atau pembelajaran apa saja yang menarik yang bisa kita publikasikan. Pembelajaran ini sudah sangat menarik dari para siswa dan Pokja, khususnya untuk KSB dan Lombok Timur ternyata cukup luar biasa. Pokja Provinsi hanya Bappeda provinsi saja yang melaksanakan kegiatan ini dan pihak Bappeda sangat terbantu dengan banyaknya teman. Pokja AMPL yang ada di kabupaten kita mencoba mempublikasikannya dan saya harap nanti kabupaten lain bisa berkenan dan membaca hasil kegiatan kita selama ini. Kenapa kita melibatkan siswa dan guru?, karena nanti kita berharap bisa mengkampanyekan kegiatan sanitasi ini. Peluang ini menjadi baik dan kita dokumentasikan. Kegiatan jambore kemarin baru pertama kali di NTB yang kita lakukan.

Terkait dengan best practice yang ada di sekolah di Lombok Timur dalam pengembangan video sanitasi, hanya ada 9 sekolah yang kita seleksi. Ke depan bukan hanya di Lombok Timur dan KSB saja, kita akan mencoba memperluas di wilayah 9 kab./Kota di NTB. Untuk pendampingan di Lombok Timur mudah-mudahan tahun 2021 kita bisa ketemu lagi dan pada bulan Januari akan dimulai dari proses seleksi. Harapan dalam Renstra ada 2 Kabupaten yang menjadi pengikut yaitu KSB dan Lotim dan semoga ada kabupaten lainnya.



Kalau kita berbicara masalah pemberdayaan itu sangat seru dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Saya senang selalu diutus untuk mewakili kegiatan-kegiatan di kantor. Kalau dipromosi kesehatan kita mengenal prokes gila dan no



gila. Kami juga mengikuti kegiatan jambore sanitasi di Sesaot dan kedepan kita bisa melibatkan bina pramuka dan bagaimana ke depan kita satukan jambore sanitasi ini dengan pramuka bakti husada ini biar semakin seru.



Pada bulan Februari saya pertama di NTB dan sebelumnya saya sempat di Sumatera selatan, Bengkulu, Lampung dan belum menemukan seperti di NTB. Disini sedikit saja dipicu responnya positif. Ada hal lain cukup membanggakan dan idenya diluar naluri dan untuk melibatkan siswa SMA ini untuk melakukan promosi. Mereka diedukasi untuk membuat video dan keterampilan pembuatan video ini cukup bagus sekali. Kemudian video digunakan oleh Sanitarian untuk mempromosikan kegiatan sanitasi ini. Komitmen teman-teman SMA ini cukup intens dalam membuat video, didampingi oleh tim pendamping. Untuk yang like sudah mencapai 2 ribu youtuber. Apa yang disampaikan oleh pak Made (Dinkes NTB), semoga teman-teman nanti bisa bergabung di Saka Bhakti Husada dan



Sanitasi adalah hal mendasar bagi semua orang sehingga sanitasi harus menjadi perhatian dan tersedia untuk semua, termasuk anak-anak dan kelompok masyarakat rentan. Banyak pembelajaran dan pengalaman yang dapat dipetik dari berbagai inisiatif yang telah dijalankan bersama. Semoga berbagai upaya ini dapat menginspirasi banyak pihak.



Implementasi dana ZISWAF BAZNAS di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam percepatan pencapaian BASNO Provinsi NTB, semoga bisa menjadi pembelajaran dan pengalaman baik bagi penggiat sanitasi lainnya. Harapannya sanitasi untuk semua termasuk anak-anak terpenuhi hak dasar hidupnya termasuk hak untuk air, sanitasi dan hygiene. Komitmen yang kuat dari Pemerintahan Daerah Provinsi NTB melalui Pokja AMPL dan kolaborasi semua pihak mendukung pencapaian BASNO dan pengelolaan air limbah domestik yang aman.



BAGIAN 5

**MENGGAGAS AGENDA WASH NTB 2021,
MERAH IMPIAN BASNO MENUJU
SANITASI AMAN**

BERANGKAT DARI PERTANYAAN KUNCI

Dalam setiap melakukan kampanye dan promosi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang aman, maka dalam lembar informasi selalu dimulai dengan 2 pertanyaan kunci yaitu:

1) **Seberapa penting Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Aman?**

Benar bahwa pengelolaan air limbah domestik (PALD) yang aman sudah pasti akan dapat mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan sumber air yang digunakan oleh masyarakat. Tetapi kondisi kita di Indonesia cukup mengkhawatirkan karena walau lebih dari 70% warga telah mendapatkan akses layanan sanitasi, hanya 7,42 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air limbah domestik yang aman (BPS, 2018, diolah Bappenas). Dengan kata lain, hampir 93% air limbah domestik di Indonesia dibuang secara tidak aman ke lingkungan. Situasi ini berkontribusi langsung pada angka kesakitan dan kematian anak di Indonesia. Artinya PALD masih sangat urgent untuk ditangani supaya aman. Tentu membutuhkan *Enabling Environment* yang kuat dan solid dari berbagai pihak, misalnya dengan penerbitan berbagai regulasi, dukungan pengembangan SDM serta penganggaran yang memadai

2) **Apakah kita telah memiliki regulasi yang mendasari SPALD ini?**

Kalau berbicara tentang pemerintah pusat, barangkali regulasi yang mendasari sudah cukup memadai. Walaupun dalam implementasinya di daerah masih menjadi tantangan tersendiri. Beberapa peraturan yang terkait dengan PALD yang aman, diantaranya sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang memberikan mandat kepada

- pemerintah daerah salah satunya untuk memberikan layanan air limbah domestik yang aman;
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik untuk memastikan air limbah yang telah diolah dapat dibuang secara aman ke lingkungan.
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; yang menguraikan ada 6 tujuan penyelenggaraan SPALD.
 - d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; yang mengatur misalnya salah satu jenis Pelayanan Dasar pada Pemerintah Daerah provinsi adalah penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sementara di Provinsi NTB, gerakan menuju sanitasi aman dimulai dengan BASNO yang diatur dari tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota dalam bentuk gerakan khas di setiap kabupaten, seperti Tubabas di Kabupaten Sumbawa Barat, Gerbang Samas di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara pengaturan terkait dengan SPALD sudah mulai seperti di Kabupaten Lombok Tengah dengan Perda Kabupaten Lombok Tengah No. 3/2017 tentang Air Limbah Domestik, termasuk KSB dan rancangan Peraturan di Lombok Timur. Sementara Kabupaten Sumbawa Barat yang sudah mendeklarasikan pelaksanaan Pilar 1 s.d. 3 STBM pada 2019 sedang menyiapkan perangkat regulasi dalam rangka PALD Aman.

PENGALAMAN WASH 2020 ADALAH PEMBELAJARAN BERHARGA UNTUK 2021

Program *Safely Managed Sanitation* (SMS) yang dilaksanakan Mitra Samya dengan dukungan UNICEF di Provinsi NTB berakhir pada akhir tahun 2020. Berbagai kegiatan yang direncanakan, terlaksana dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari Pokja AMPL NTB. Dukungan ini ditunjukkan dengan keterlibatan aktif anggota Pokja dalam setiap kegiatan. Selain itu, dinamika yang terbangun di tingkat Pokja menjadi lebih berkualitas. Komunikasi antar anggota pokja menjadi lebih aktif, cair dan konstruktif.

Pokja AMPL NTB menjelaskan bahwa pendekatan dan strategi yang dilakukan oleh Mitra Samya dan UNICEF menjadi salah satu pemicu terjadinya perubahan dan dukungan parapihak. Beberapa pembelajaran baik yang diperoleh dari proses tersebut adalah sebagai berikut :

1) Menyusun Bersama, Membangun Kepemilikan Bersama, Menumbuhkan Tanggung-jawab Bersama

Sejak menerima mandat sebagai pelaksana program SMS dari UNICEF, Mitra Samya secara aktif membangun komunikasi dengan Bappeda Provinsi NTB selaku pelaksana harian Kelompok Kerja AMPL NTB. Komunikasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kegiatan-kegiatan dalam program SMS akan dirancang bersama oleh UNICEF, Mitra Samya dan Pokja AMPL NTB. Keterlibatan Pokja AMPL NTB sangat strategis karena merupakan lembaga koordinasi para pelaku dan pengampu kebijakan pembangunan AMPL ditingkat Provinsi. Anggota Pokja memiliki data base, peta masalah, potensi pembangunan dan gagasan serta lokus-lokusnya dalam payung AMPL.

Proses penyusunan rencana kegiatan dilakukan oleh anggota Pokja AMPL atas fasilitasi Mitra Samya dengan dukungan UNICEF.

Pengembangan gagasan dilaksanakan dengan semangat kebersamaan dan kesetaraan. Berbagai masalah dalam pembangunan WASH di NTB yang ingin dituntaskan dibahas dengan lebih tajam. Pokja AMPL NTB menyadari bahwa tidak semua kegiatan yang menjadi kebutuhan dan diusulkan dapat didukung oleh UNICEF. Disadari pula bahwa UNICEF selaku lembaga donor juga memiliki indikator yang harus dicapai, sehingga rencana kegiatan tersebut merupakan kombinasi antara pemenuhan kebutuhan pemerintah dalam mencapai target daerah dalam konteks WASH serta inovasi/*best practices* yang juga berkontribusi terhadap pencapaian target indikator UNICEF. Yang pasti, bahwa kegiatan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian perencanaan daerah (RPJMD). Dengan keterlibatan sejak awal, pemerintah provinsi NTB dapat menghitung seberapa besar kontribusi program SMS dalam pembangunan WASH di NTB. Proses-proses yang dilakukan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program sehingga anggota Pokja AMPL NTB merasa bertanggungjawab untuk mengawal pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan program SMS.

2) Menjaga Silaturahmi, Menjalin Pertautan Dinamis antar Pihak

Meskipun program pembangunan AMPL di Provinsi NTB selama ini tetap berjalan, namun sifatnya masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terkoordinasikan dan kurang solid. Pelibatan anggota Pokja sejak awal mampu membangun komunikasi yang cair terutama antar pilar-pilar utama Pokja AMPL seperti Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas LHK, Dinas Perkim, Dinas PMPD dan yang lainnya. Bahkan ada group kecil yang selalu siap diajak mendiskusikan berbagai permasalahan pembangunan AMPL di NTB.

Dalam pelaksanaan program SMS di tingkat provinsi, anggota pokja AMPL diposisikan sebagai pelaku utama. Misalnya dalam penyusunan Road Map BASNO, dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh para pelaku pembangunan AMPL di NTB seperti dokumen SSK, RAD AMPL yang selama ini hanya sebatas dokumen dan belum menjadi acuan pembangunan, dibedah bersama dan menjadi bahan dasar penyusunan Road Map BASNO. Proses ini menyadarkan anggota Pokja AMPL bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai dokumen perencanaan terpadu dan saling mengisi untuk memecahkan berbagai permasalahan pembangunan AMPL di NTB. Sharing pembelajaran baik dari para pelaku pembangunan WASH di NTB memperkaya Pedoman BAZNAS–BASNO. Selain BAZNAS Provinsi dan Kabupaten, pedoman yang dihasilkan dapat diacu oleh parapihak yang mau berkontribusi dalam pembangunan AMPL di NTB karena dokumen tersebut menguraikan secara rinci bagaimana mekanisme kerja bersama pemerintah provinsi dan kabupaten. Pokja AMPL NTB mengakui bahwa proses-proses yang dikembangkan mampu membangun kerja bareng yang terpadu dan lebih terarah, meskipun belum maksimal.

Merawat silaturahmi menjadi strategi Pokja AMPL NTB untuk menjaga dinamika dan pertautan dinamis yang sudah terbangun. Pokja AMPL NTB mengagendakan untuk melakukan kunjungan/ *roadshow* ke kantor/sekretariat pelaku pembangunan AMPL di provinsi NTB, serta melaksanakan pertemuan rutin Pokja AMPL NTB di kantor anggota Pokja secara bergantian. Selain itu, silaturahmi dan komunikasi melalui media sosial juga tetap dipertahankan.

3) **Mereplikasi Praktek Baik, Mengembangkan Gagasan 2021**

Meskipun merupakan program prioritas, namun capaian pembangunan AMPL di NTB masih belum optimal. Kondisi APBD NTB cukup berat sehingga sulit mendapatkan dukungan penganggaran. Kondisi ini disampaikan oleh Taufiq Hari Suryanto, SKM., anggota Pokja AMPL dari Bappeda Provinsi NTB. Untuk meniyasati keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah Provinsi NTB selalu berusaha menarik minat berbagai pihak untuk berkontribusi di bidang pembangunan AMPL.

Pokja AMPL NTB mencatat, pada saat bencana gempa bumi menimpa provinsi NTB tahun 2019, terdapat 47 lembaga cluster WASH yang bekerja di NTB. Pokja AMPL memfasilitasi pertemuan lembaga-lembaga tersebut, ternyata mereka bisa saling mengisi. Misalnya ada lembaga yang punya program pembangunan jamban, airnya di-*supply* oleh PMI. Ada yang butuh pipa, ternyata pipa ada di BPBD Provinsi.

Pelaksanaan program SMS 2020, menghasilkan pembelajaran positif, terutama keterlibatan Pokja AMPL dalam merancang berbagai kegiatan. Lebih lanjut, Taufik menyampaikan "*Dengan melibatkan kami sejak awal, masalah yang mau diuraikan dan dituntaskan akan lebih tajam dapat kita capai bersama. Adapun inovasi yang mereka bawa bisa diinsert-kan dalam program. Tidak semua inovasi atau best practice dari wilayah lain yang dibawa dapat diterapkan langsung, tetapi harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, karakteristik dan kearifan lokal daerah. Misalnya siapa agen perubahan yang akan menjadi garda terdepan akan berbeda-beda di setiap daerah*".

PENGEMBANGAN GAGASAN WASH 2021

Terkait pengembangan gagasan pembangunan WASH 2021 pasca program SMS 2020, Mitra Samya memfasilitasi serangkaian diskusi dengan Pokja AMPL NTB, UNICEF dan parapihak yang focus dalam pembangunan WASH di NTB, sebagai berikut :

1) Menggali Pengalaman 2020 dan Membentuk Tim Perumus

Tahapan ini dilakukan melalui Mini Rakor Penyusunan Rencana Kerja Pokja AMPL 2021. Mini rakor dilaksanakan dalam bentuk workshop dengan metode semi daring, dimana peserta dari luar kota Mataram mengikuti kegiatan melalui media daring secara virtual. Mini workshop difasilitasi oleh Bagus Aryawa dari Mitra Samya dan menghasilkan informasi tentang capaian, peluang dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan WASH yang dilaksanakan oleh parapihak di Provinsi NTB. Dalam kegiatan ini juga teridentifikasi berbagai pembelajaran pembangunan WASH TA 2020 yang sudah dilakukan oleh parapihak, serta gagasan untuk pembangunan WASH 2021. Tim Perumus untuk mengembangkan agenda WASH 2021 adalah produk lain dalam mini rakor tersebut.

2) Kerja Marathon Tim Perumus untuk Kerangka Logis Pembangunan WASH 2021

Tim perumus bekerja dan diawali dengan satu pertemuan offline. Pertemuan Tim Perumus ini bertujuan untuk merumuskan Kerangka Logis Pembangunan WASH Provinsi NTB Tahun 2021. Proses difasilitasi oleh Ir. I Nyoman Oka, MM dari Mitra Samya, yang diawali dengan mereview visi misi dalam RPJMD Provinsi, dilanjutkan dengan analisa GAP antara tujuan dan capaian saat ini. Pembahasan difokuskan pada pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik (SPALD) untuk mendukung pencapaian BASNO menuju sanitasi aman 2021.

Berdasarkan hasil analisis GAP dan hasil mini rakor sebelumnya, tim perumus menyepakati Goal dan Hasil/Outcome pembangunan WASH di NTB 2021. Tim perumus kemudian dibagi dalam kelompok-kelompok kecil (2-3 orang) untuk merumuskan Output/Keluaran dari masing-masing Outcome/Hasil beserta indikatornya serta merumuskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Output/Keluaran.

Tim Perumus bekerja keras untuk menuntaskan rancangan kegiatan 2021 dalam bentuk matrik kerangka logis Pembangunan WASH NTB 2021. Kerja keras dilakukan melalui konsultasi rutin dengan POKJA AMPL NTB di bawah fasilitasi Mitra Samya. Dokumen kerangka logis ini menjadi penting untuk kemudian dibahas dalam forum yang lebih besar melalui Rakor bersama parapihak di NTB.

Goal dan Hasil/Outcome pembangunan WASH di NTB 2021, seperti tabel berikut :

GOAL	:	Buang air sembarangan nol (BASNO) menuju sanitasi aman
INDIKATOR	:	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi NTB ODF tahun 2023 • Akses sanitasi layak di Provinsi NTB % dan Akses sanitasi aman %

1. Kebiasaan masyarakat menggunakan fasilitas sanitasi berupa jamban sehat dan layak	<ul style="list-style-type: none"> • 175 Desa/ kelurahan di Provinsi NTB mencapai BASNO terverifikasi di akhir tahun 2021. • Masyarakat 9 kabupaten/kota di Provinsi NTB (kecuali KSB) pada tahun 2021 rata-rata mengakses sanitasi layak 1,80%.
---	--

<p>2. Masyarakat mendapatkan layanan sanitasi Aman</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat mengakses sanitasi aman 2,17 % dari 1,80 % sanitasi layak tahun 2021 • Terbangun 45 unit SPALDT – SR di 9 kabupaten/kota • Terbangunnya X unit tangki saptik SPALD-S pengguna 2-10 KK/Sharing Septik Tank Komunal • Terbagunnya 2 IPLT di KLU dan Sumbawa • Tersedianya truk sedot tinja di 5 kabupaten /kota (Lombok Tengah, Sumbawa, KSB, Kota Mataram dan Kota Bima)
<p>3. Kelembagaan penyelenggaraan BASNO menuju sanitasi aman berfungsi dan memberikan layanan sanitasi aman</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ada 2 Kabupaten mempunyai Lembaga PALD yang terpisah antara oprator dan regulator tahun 2021 • Tersedianya regulasi air limbah domestic di 7 kabupaten 2 kota. • Kelembagaan Pokja berfungsi optimal di 10 Kabupaten/Kota • Tersedianya alokasi anggaran untuk BASNO menuju Sanitasi Aman tahun 2021 sebesar Rp. 176.681.423.000,- • Pada tahun 2021, ada 9 kabupaten/kota melakukan Kerjasama dengan perguruan tinggi (KKN Mahasiswa) dalam rangka BASNO untuk sanitasi aman

Sumber: Dokumen Rancangan Program WASH NTB 2021.

3) Mengkonsolidasikan Gagasan Pemberdayaan WASH di NTB 2021

Kegiatan akhir dalam menetapkan agenda AMPL untuk WASH 2021 adalah melalui rakor konsolidasi gagasan Pemberdayaan WASH. Sebelum rakor, tim perumus menyerahkan hasil rancangan atau desain agenda WASH NTB 2021 kepada Pokja AMPL NTB. Rakor dihadiri oleh Pokja AMPL dari 10 kabupaten/kota di NTB, dan difasilitasi oleh Titik Soeprijati dari Mitra Samya. Dalam Rakor ini, Pokja AMPL Provinsi mempresentasikan Kerangka Logis Pembangunan WASH Provinsi NTB Tahun 2021 yang dihasilkan oleh Tim Perumus untuk kemudian dibahas bersama oleh seluruh peserta. Para peserta diajak untuk mencermati, kemudian mengkonfirmasi kegiatan mana yang merupakan konsern dari setiap peserta tersebut. Kebutuhan parapihak dalam memastikan konsern tersebut dikaitkan dengan kontribusi yang terkonsolidasi untuk pencapaian target yang sudah ditetapkan dalam Roadmap BASNO 2021 menuju sanitasi aman 2023.

Menyemai

BENIH PERUBAHAN

Kumpulan Pembelajaran Program Kemitraan Pokja AMPL NTB, Mitra Samya dan UNICEF

Buku ini memuat alur sederhana yang diawali dengan cerita tentang cikal bakal program kemitraan Pokja AMPL, Mitra Samya dan UNICEF dibangun. Pada uraian selanjutnya di bagian 2 adalah tentang narasi bagaimana memahami Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Aman sebagai landasan para pihak melakukan kegiatan di lapangan. Selama 8 bulan efektif program berjalan, sudah bisa menunjukkan benih-benih sebuah perubahan, seperti kata Mahatma Gandhi “Anda harus menjadi perubahan yang ingin Anda lihat di dunia”. Maka dari itu bagian selanjutnya dari buku ini adalah tentang tutur para pelaku, bagaimana mereka jatuh bangun meletakkan landasan pemahaman dan mempraktikkan tentang Sanitasi Aman sebagai bagian serpihan pengalaman dari lapangan. Buku ini menunjukkan bahwa sudah terjadi berbagai perubahan dimana-mana. Perubahan mendasar lainnya yang juga di urai dalam buku ini adalah tentang bagaimana mendalami sanitasi, memahami 5 pilar STBM melalui satu kegiatan pelatihan di Sumbawa Barat. Dari situlah lahir pesan penting Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat baik oleh Bupati, Pokja AMPL maupun Kepala Dinas Kesehatan yang menyampaikan pesan berharga khususnya untuk Sumbawa Barat, dan umumnya untuk NTB dan juga Indonesia dalam menuntaskan target 5 pilar STBM di lapangan. Dari situ juga kemudian menjadi salah satu sumber pengalaman untuk NTB merumuskan gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman yang diuraikan pada bagian lain buku ini. Sebagai upaya mengoptimalkan sumber daya yang ada di NTB, maka bagian lain dalam buku ini juga kita akan dapat pelajari bagaimana mendayagunakan dana ZIS untuk mendukung Gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman.

Perubahan yang terjadi dalam proses membangun pemahaman tentang Sanitasi Aman juga digalakkan melalui promosi tentang pengelolaan air limbah domestik aman bagi rumah tangga di tingkat desa yang diikuti dengan kegiatan survey perubahan pemahaman. Pada level generasi millennial, khususnya sekolah lanjutan tingkat atas, juga memperkuat program promosi melalui jambore yang berhasil mencetak generasi millennial sebagai agen perubahan bidang sanitasi.

